

Peta Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Yogyakarta



Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta
dengan Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Indonesia (UII)



2016

**Peta Program
Pemberdayaan Perempuan
di Kota Yogyakarta**

Peta Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Yogyakarta

Penulis:

Ninik Sri Rahayu

Laila Kholid Alfirdaus

Ashari Cahyo Edi

Tim Asisten:

Maya Sandra Rosita Dewi

Amin Nurohmah

Kerjasama

**Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta
dan Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Indonesia (UII)**

Cetakan 1, Maret 2016

X + 148 hlm

15 x 23 cm

ISBN : 978-602-7677-93-7

Diterbitkan oleh :



GRE PUBLISHING

Road Abstract

Jln. Magelang Km.4 Gang Margo Agung

Karangwaru Lor TR II/417C Yogyakarta 55241

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GRAFIK | vii |
| PENGANTAR | viii |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan | 9 |
| 1.3. Tujuan | 9 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 10 |
| | |
| BAB 2 METODE PENELITIAN | 13 |
| 2.1. Literature Review | 14 |
| 2.2. Baseline Survey | 16 |
| 2.3. Focus Group Discussions (FGD) | 22 |
| 2.4. <i>In-depth Interviews</i> (Wawancara Mendalam) | 26 |
| | |
| BAB 3 ANALISIS SITUASI : ISU KESETARAAN GENDER DI KOTA YOGYAKARTA | 37 |
| 3.1. Kondisi Demografis Kota Yogyakarta | 38 |
| 3.2. <i>Setting</i> Sosial Kota Yogyakarta | 41 |
| 3.3. Analisis Situasi Kesetaraan Gender di Kota Yogyakarta | 48 |
| 3.3.1. Aspek Politik | 49 |
| 3.3.2. Ekonomi | 51 |
| 3.3.3. Pendidikan | 54 |
| 3.3.4. Kesehatan | 57 |
| 3.3.5. Perlindungan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 59 |
| | |
| BAB 4 BASELINE SURVEY PETA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA YOGYAKARTA | 63 |
| 4.1. Karakteristik Responden (Lembaga) | 64 |
| 4.2. Fokus program | 69 |
| 4.3. Kelompok Sasaran | 77 |

| | | |
|--|--|------------|
| 4.4. | Lingkup | 84 |
| 4.5. | Pendekatan | 90 |
| 4.6. | Masukan | 91 |
| BAB 5 PETA PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA | | 97 |
| 5.1. | Isu Paling Krusial dalam Pemberdayaan Perempuan di Kota Yogyakarta | 98 |
| 5.2. | Hambatan dalam Program Pemberdayaan Perempuan..... | 105 |
| 5.3. | Perbaikan yang Diperlukan dalam Program Pemberdayaan Perempuan | 118 |
| BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN | | 129 |
| 6.1. | Prioritas Isu Pemberdayaan Perempuan | 130 |
| 6.2. | Prioritas Pendekatan (Strategi) | 133 |
| 6.2.1. | Variasi Cakupan Penerima Manfaat | 133 |
| 6.2.2. | Variasi Sumber Pendanaan | 134 |
| 6.2.3. | Pelibatan Laki-laki (Suami) dalam Program Pemberdayaan Perempuan | 135 |
| 6.2.4. | PKK sebagai Penerima Manfaat Inti | 135 |
| 6.3. | Prioritas Desain Pengelolaan Program | 137 |
| 6.3.1. | Sinergi dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan | 137 |
| 6.3.2. | Penguatan Gender Mainstreaming di Level Pemerintah Kota | 138 |
| 6.3.3. | Penguatan Monitoring dan Evaluasi Program / Kebijakan | 141 |
| 6.4. | Agenda Penelitian Kedepan | 142 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 145 |
| BIODATA SINGKAT | | 147 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|-------------|--|---------|
| Tabel 1.1. | Perkembangan IPM, IPG dan Rasio IPM dan IPG | 2 |
| Tabel 1.2. | Indeks Pemberdayaan Gender DIY | 5 |
| Tabel 1.3. | Perkembangan Variabel Penghitungan GDI dan Disparitas Gender Kabupaten Kota Yogyakarta 2010-2014 | 6 |
| Tabel 1.4 | Perkembangan <i>Indeks Pemberdayaan Gender</i> (IDG) Tahun 2010-2014 | 7 |
| Tabel 2.1. | Daftar pertanyaan <i>In-Depth Interview</i> | 28 |
| Tabel 3.1. | JenisKelamin | 39 |
| Tabel 3.2. | Persentase Rumah Tangga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/kota di Propinsi DI Yogyakarta pada tahun 2013 | 40 |
| Tabel 3.3. | Tingkat Kemiskinan Kota/Kabupaten di Propinsi DIY pada 2013 | 45 |
| Tabel 3.4. | Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan di Kota/Kabupaten di Propinsi DIY dari tahun 2009-2013 | 46 |
| Tabel 3.5. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta dibandingkan dengan Kota / Kabupaten Lain di Propinsi DIY tahun 2012-2013 .. | 47 |
| Tabel 3.6. | Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019 | 50 |
| Tabel 3.7. | Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin 2013 (jiwa) | 52 |
| Tabel 3.8. | Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Kota Yogyakarta 2012-2013 | 54 |
| Tabel 3.9. | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 ... | 55 |
| Tabel 3.10. | Jumlah Kematian Ibu di Kota/Kabupaten di Propinsi DIY tahun 2009 | 58 |
| Tabel 3.11. | Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Propinsi DIY tahun 2009 | 59 |
| Tabel 3.12. | Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilaporkan 2012-2015 | 60 |
| Tabel 4.1. | Karakteristik Lembaga | 65 |

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 4.2. | Bidang Garapan Responden Penelitian | 70 |
| Tabel 4.3. | Cakupan Program | 86 |
| Tabel 4.4. | Masukan Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta | 91 |
| Tabel 4.5. | Masukan Untuk KPMP Kota Yogyakarta | 94 |

DAFTAR GRAFIK

| | Halaman |
|---|---------|
| Grafik 1.1. Perkembangan IDG 2010-2013 | 4 |
| Grafik 1.2. Perkembangan IDG 2013 | 4 |
| Grafik 4.1. Komposisi Responden Penelitian | 68 |
| Grafik 4.2. Bidang Fokus | 72 |
| Grafik 4.3. Kelompok Sasaran | 77 |
| Grafik 4.4. Jumlah Penerima Manfaat Program | 84 |
| Grafik 4.5. Pendekatan Pemberdayaan Perempuan | 90 |

PENGANTAR

KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KOTA YOGYAKARTA

Pemerintah kota Yogyakarta terus berupaya untuk mengaplikasikan pembangunan responsif gender. Komitmen ini terbaca jelas dalam rencana strategis Pemerintah Kota Yogyakarta yang secara tegas menyebutkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari visi, misi dan strategi pembangunan. Keyakinan inipun selaras dengan visi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 yakni "Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, berkarakter dan inklusif, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan."

Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan perempuan sebagai salah satu sasaran pembangunan melalui program afirmasi, selain empat kelompok lain, yaitu anak, lansia, difabel dan orang miskin. Hal ini cukup beralasan karena keterpinggiran perempuan masih menjadi isu di Kota Yogyakarta, tercermin dari angka Gender Development Index dan Gender Empowerment Measure. Angka GDI menunjukkan disparitas gender di hampir semua indikator. Begitupun juga Indeks Pemberdayaan Perempuan, pada semua komponen pembentuk IDG, baik dalam partisipasi politik, pengambilan keputusan, maupun dalam bidang perekonomian, perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki.

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dan masyarakat. Berdasarkan Tugas Pokok Fungsinya Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta berupaya untuk mengidentifikasi, inventarisasi dan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan kelompok rentan dalam hal ini adalah perempuan.

Kerjasama kajian ini menghasilkan peta potensi pemberdayaan perempuan di kota Yogyakarta. Buku ini menyajikan temuan penting berupa inventarisasi isu-isu prioritas terkait pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta termasuk identifikasi bagaimana prioritas pendekatan, prioritas desain pengelolaan program, dan agenda riset yang kedepan perlu dilakukan. Sumber informasi dalam riset ini adalah para pelaku langsung kegiatan program pemberdayaan perempuan di kota Yogyakarta dan Provinsi DIY yang meliputi para penggiat PKK, Organisasi Masyarakat (ORMAS), LSM, Pusat studi di universitas, dan instansi pemerintah di Kota Yogyakarta.

Meskipun masih merupakan *assesment* awal, pemetaan ini diharapkan menjadi informasi yang penting bagi identifikasi permasalahan dan pemecahan masalah kesetaraan gender di Kota Yogyakarta dan daerah lain terkait. Pemetaan lebih mendalam, diharapkan akan dapat dilakukan dalam waktu-waktu ke depan.

KPMP mengucapkan terimakasih kepada para peneliti dan asisten Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan penerbitan buku ini. Terimakasih juga kami sampaikan kepada segenap responden *baseline survey*, peserta FGD dan informan wawancara mendalam yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Saran dan masukan kami harapkan untuk perbaikan dalam mengidentifikasi isu, hambatan dan rekomendasi pada Program pemberdayaan perempuan ke depan di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 Desember 2015
Kepala KPMP Kota Yogyakarta

Dra. Ch. Lusy Irawati
NID 196104251986032004

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak-hak perempuan menuju pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi isu kritis pasca berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Mengaitkan kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan sangat krusial karena beragam alasan, salah satunya adalah faktor etika dan moral. Usaha-usaha pencapaian pembangunan berkelanjutan tidak bisa menafikan hak, martabat, dan kapabilitas perempuan yang merupakan separuh lebih penduduk bumi.

Laporan survey UN (United Nation)-Women mengenai peran perempuan dalam pembangunan baru-baru ini menyebutkan bahwa pendorong dan sekaligus penyebab ketidaksetaraan gender dan instabilitas pembangunan saling terpaut mendalam. Keduanya diakibatkan oleh pola-pola pembangunan yang mereproduksi ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan serta eksploitasi tenaga kerja perempuan. Pembangunan yang berdampak secara tidak proporsional bagi perempuan secara ekonomi, sosial, politik dan lingkungan semestinya perlu dikoreksi kembali. Perempuan tidak boleh lagi diposisikan sebagai korban, tetapi harus menjadi pemain penting dan berdaya dalam pembangunan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk memperkecil ketidaksetaraan gender dan memastikan perempuan

terlibat dalam setiap proses, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program-program pembangunan. Namun demikian ketimpangan gender masih terjadi di sejumlah lini dan menjadi persoalan serius di Indonesia, ini terlihat dari capaian GDI (Gender Development Index/Indeks Pembangunan Gender) yang selalu di bawah HDI (Human Development Index/Indeks Pembangunan Manusia). Artinya kualitas pembangunan manusia lebih menguntungkan laki-laki dibanding perempuan. GDI merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti HDI dengan memperhatikan ketimpangan gender. GDI digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan HDI, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Semakin lebar jarak antara GDI dan HDI maka kesenjangan gender semakin tinggi pula. Tabel berikut menggambarkan perkembangan GDI dan HDI dari tahun 2004-2013.

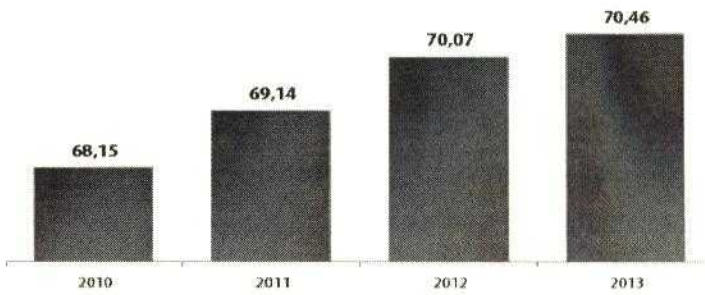
Tabel 1.1 : Perkembangan IPM,IPG dan Rasio IPM dan IPG

| Tahun | Indeks pembangunan Manusia (IPM) | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) | Rasio (%) |
|--------------|---|---|------------------|
| 2004 | 68,69 | 63,94 | 93,1 |
| 2005 | 69,57 | 65,13 | 93,6 |
| 2006 | 70,08 | 65,27 | 93,1 |
| 2007 | 70,59 | 65,81 | 93,2 |
| 2008 | 71,17 | 66,38 | 93,3 |
| 2009 | 71,76 | 66,77 | 93,0 |
| 2010 | 72,27 | 67,20 | 93,0 |
| 2011 | 72,77 | 67,80 | 93,2 |
| 2012 | 73,29 | 68,52 | 93,5 |
| 2013 | 73,81 | 69,57 | 94,3 |

Sumber : Kemenegpp, 2014

Pencapaian pembangunan gender di Indonesia menunjukkan kecondongan positif sepanjang 10 tahun terakhir. IPG Nasional dalam kurun waktu tahun 2004-2013 meningkat dari 63,94 pada tahun 2004 menjadi 69,57 pada tahun 2013. Ini berarti terdapat peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Program-program Pemerintah yang telah dilaksanakan, sebenarnya sudah memberikan hasil positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia. Tetapi, peningkatan IPG ternyata belum mampu mengurangi jarak (*gap*) secara nyata dalam pencapaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. *Gap* antara IPM dengan IPG selama kurun waktu tersebut masih terlihat tetap dan cenderung tidak berubah besarnya yaitu pada angka rasio 94,25 persen.

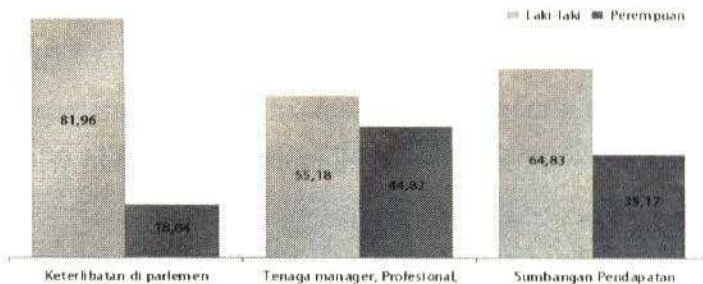
Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Grafik 1.1 menggambarkan kecondongan (*trend*) IDG Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2010, IDG Indonesia sebesar 68,15, dalam kurun waktu 3 tahun, IDG Indonesia terus meningkat hingga tahun 2013 nilainya menjadi 70,46. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. Dengan demikian, peranan perempuan semakin strategis dibanding sebelumnya.



Grafik 1.1 Perkembangan IDG 2010-2013

Sumber : Kemenegpp, 2014

Namun, secara umum capaian komponen IDG perempuan masih lebih rendah dari laki-laki. Sebagai ilustrasi grafik 1.2 menyajikan gambaran IDG nasional tahun 2013.



Grafik 1.2 Perkembangan IDG 2013

Sumber : Kemenegpp, 2014

Pada semua komponen pembentuk IDG, baik dalam partisipasi politik, pengambilan keputusan maupun dalam bidang perekonomian, perempuan tertinggal dibanding laki-laki.

Kesenjangan gender tidak saja terjadi ditataran nasional, pada tingkatan provinsi/kabupaten/kota juga menunjukkan gambaran serupa. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menduduki peringkat lima besar tertinggi dalam capaian IPG dan IDG secara nasionalpun tidak luput dari fenomena tersebut sebagaimana terinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 : Indeks Pemberdayaan Gender DIY

| NO. | WILAYAH | IDG | |
|-----|-------------------|-------|-------|
| | | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kota Yogyakarta | 74.34 | 74.64 |
| 2. | Kab. Bantul | 63.60 | 63.83 |
| 3. | Kab. Kulon Progo | 60.09 | 60.87 |
| 4. | Kab. Gunung Kidul | 57.81 | 58.62 |
| 5. | Kab. Sleman | 62.78 | 63.04 |
| | Propinsi DIY | 62.87 | 63.32 |

Sumber : BPPM DIY,2011

Berdasarkan wilayah, tampak Kota Yogyakarta memiliki IDG tertinggi dibandingkan empat kabupaten lain, artinya Kota Yogyakarta relatif lebih berdaya gender. Meski terdapat kecondongan lebih setara, ketimpangan sebagaimana disinyalir pada bagian atas latar belakang ini tampak mewarnai proses pembangunan di Yogyakarta. Data-data berikut ini mendeskripsikan ketertinggalan perempuan dalam beberapa dimensi pembangunan.

Tabel 1.3 Perkembangan Variabel Penghitungan GDI dan Disparitas Gender Kabupaten Kota Yogyakarta 2010-2014

| Variabel | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|
| Angka Harapan Hidup | | | | | |
| Laki-laki | 72,64 | 71,59 | 71,68 | 71,88 | 73 |
| Perempuan | 76,33 | 75,37 | 75,44 | 75,63 | 74 |
| Disparitas Gender | 3.69 | 3.69 | 3.76 | 3.75 | 1 |
| Angka Melek Huruf (>15 tahun) | | | | | |
| Laki-laki | - | 98,81 | 99,46 | 99,98 | 99,94 |
| Perempuan | - | 95,71 | 96,55 | 97,00 | 98,27 |
| Disparitas Gender | | -3.1 | -2.91 | -2,98 | -1,67 |
| Rata-rata Lama Sekolah | | | | | |
| Laki-laki | 11,95 | 11,96 | 12,11 | - | 11,83 |
| Perempuan | 11,29 | 11,30 | 11,32 | - | 11,00 |
| Disparitas Gender | -0,66 | -0,66 | -0,79 | | -0,83 |
| % Angkatan Kerja | | | | | |
| Laki-laki | 89 | 90,27 | 85,58 | - | - |
| Perempuan | 75,14 | 75,71 | 66,11 | - | - |
| Disparitas Gender | -13,85 | -14,56 | -19,47 | - | - |
| Indeks Pembangunan Gender | 77,56 | 77,92 | 78,71 | - | - |

Sumber: BPPM DIY, 2015 ; Profil Gender Kota Yogyakarta, 2014

Disparitas gender untuk Angka Melek Huruf (AMH), rata-rata lama sekolah dan persentase angkatan kerja menunjukkan angka negatif, ini memperlihatkan perempuan berada dalam posisi tertinggal dibanding laki-laki dalam ketiga aspek tersebut. Sebaliknya, jika dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH), perempuan berada dalam situasi yang lebih baik ketimbang laki-laki, artinya perempuan di kota Yogyakarta memiliki peluang harapan hidup lebih lama di banding laki-laki. Indikator-indikator GDI tersebut digunakan

sebagai dasar untuk mengukur pemenuhan kebutuhan dasar perempuan, seperti aspek kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Kemajuan pembangunan gender di Kota Yogyakarta juga tercermin dari indikator *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan (Tabel 1.4)

Tabel 1.4 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2010-2014

| VARIABEL | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|--------|--------|-------|---------|---------|
| Perempuan di Parlemen | 15% | 15% | 15% | 15% | 25% |
| Perempuan pekerja Profesional | 9,78 % | 9,47 % | 20% | 10,59 % | 14,07 % |
| Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 69,85 | 70,00 | 70,70 | - | - |

Sumber : BPPM DIY, 2015

Tabel 1.4 diatas menggambarkan keteringgalan perempuan dalam bidang politik jika dibandingkan dengan laki-laki. Representasi perempuan di parlemen untuk periode 2010-2014 masih jauh dari target 33% keterwakilan perempuan. Meskipun Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan kecondongan perbaikan, namun peran perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Sebagai gambaran Angka IDG pada tahun 2012 adalah 70,70, artinya peranan perempuan dalam pengambilan keputusan sebesar 70,70 persen dari peranan yang dijalankan laki-laki.

Pembangunan berkelanjutan hanya akan mewujudkan jika persoalan gender dan pemberdayaan perempuan terakomodasi

dengan baik dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah Kota Yogyakarta terus berkomitmen untuk mendorong dan mengaplikasikan pembangunan yang responsif gender. Rencana strategis Pemerintah Kota Yogyakarta menyebutkan dengan tegas keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari visi, misi dan strategi pembangunan dimaksud. Komitmen ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 yaitu, "Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, berkarakter dan inklusif, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan." Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan perempuan sebagai salah satu sasaran pembangunan melalui program afirmasi, selain empat kelompok lain, yaitu anak, lansia, difabel, dan orang miskin.

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah merespon ketertinggalan perempuan dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008. Peraturan ini mengatur tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta. Peraturan ini mendorong program pemberdayaan perempuan di wilayah kota Yogyakarta secara lebih jauh. Sie Perlindungan Kelompok Rentan pun mengamankan untuk mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kelompok rentan.

Terkait dengan keperluan inventarisasi dan pemecahan masalah, KPMP berupaya untuk mengidentifikasi peta potensi pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta. Pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah usaha sistematis dan terencana

untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Peta ini selanjutnya akan menjadi rujukan sekaligus rekomendasi bagi penyusunan program pemberdayaan perempuan pemerintah Kota Yogyakarta.

1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta;
4. DPASKPD Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta Nomor 44/DPA-SKPD/I/2015 tanggal 2 Januari 2015.

1.3. Tujuan

Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk melakukan pendalaman dan refleksi mengenai potensi pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta, sekaligus menghimpun masukan dari para pegiat pemberdayaan perempuan dan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik di Kota Yogyakarta. Hasil yang diharapkan dari diskusi ini adalah:

1. Tersusunnya peta potensi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik di Kota Yogyakarta;
2. Teridentifikasinya rekomendasi program pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini terbagi dalam enam bab. Bab pertama berisi pendahuluan, dasar hukum penyusunan, tujuan, dan sistematika penyajian. Bab kedua menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data, baik selama *desk study* maupun turun ke lapangan. Secara umum, penelitian ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah *preliminary research* berupa *literature review* guna mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis.

Pada bagian ketiga akan menyajikan analisis situasi dan kondisi kesetaraan gender di Kota Yogyakarta berdasarkan data-data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi dan lembaga terkait. Aspek-aspek yang dipaparkan meliputi politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap kekerasan domestik pada perempuan. Bab berikutnya mendeskripsikan hasil *baseline survey* peta pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta. Survey ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran *baseline* data peta pemberdayaan perempuan di Kabupaten/Kota Yogyakarta. Subyek yang menjadi responden penelitian adalah representasi NGO, ormas, universitas (Pusat Studi Gender/Wanita), PKK, dan institusi pemerintah yang bergerak dalam aktivitas pemberdayaan perempuan.

Selanjutnya pada bab kelima diuraikan potensi pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta berdasarkan hasil FGD dan *in-depth interviews*. FGD dilaksanakan pada 20 November 2015 terhadap kurang lebih 25 peserta. Analisis dalam bab ini merangkum temuan dalam FGD dan *in-depth interview* yang merupakan persepsi dan informasi dari para informan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka sebagai praktisi, pelaku maupun penerima manfaat dalam pemberdayaan perempuan, baik di ranah pemerintahan, PKK, LSM, disertai dengan melakukan kajian akademik.

Terakhir, bab enam adalah kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini merupakan refleksi yang berisi resume dan *review* singkat dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. Refleksi dalam bab ini berisi poin-poin rekomendasi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan KPMP dalam menyusun strategi, program maupun kegiatan pemberdayaan di masa-masa yang akan datang.

Tentu saja temuan dalam penelitian bukan merupakan hal final. Temuan dalam penelitian ini masih merupakan pemetaan awal yang mencakup aspek-aspek yang bersifat umum. Ke depan, guna memperoleh gambaran pemetaan yang lebih detail, khususnya menyangkut pemetaan potensi pemberdayaan perempuansampai di level kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta, diperlukan penelitian lebih lanjut.



BAB 2

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Secara umum, penelitian ini dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah riset pendahuluan (*preliminary research*) yakni berupa telaah pustaka (*literature review*). Tujuannya untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis. Hasilnya adalah gambaran awal situasi dan kondisi perempuan di Kota Yogyakarta, sebagai informasi latar belakang kesetaraan gender di Kota Yogyakarta.

Tahap kedua adalah penelitian lapangan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*). Data kuantitatif diharapkan memberikan informasi tentang peta umum, sementara data kualitatif diharapkan memberi kedalaman informasi. Selain itu, penggunaan metode campuran juga ditujukan sebagai upaya triangulasi (*check and recheck*).

Penelitian kuantitatif dilakukan melalui *baseline survey*. Sementara, penelitian kualitatif dilakukan melalui serangkaian metode *Focus Group Discussions* (FGDs atau diskusi kelompok terfokus) dan *in-depth interviews* (wawancara mendalam). Penelitian tahap kedua ini sudah berupaya menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi peta program pemberdayaan perempuan yang

dilakukan SKPD, LSM, PKK, maupun pusat studi universitas. Isu-isu dan permasalahan gender di Kota Yogyakarta juga turut dialami.

Penjelasan lanjut tentang masing-masing metode penelitian yang digunakan secara lebih detail yang mencakup pengertian, tujuan penggunaan dan justifikasi penggunaan metode, serta sumber informasi tertulis yang digunakan dan responden/informan yang relevan diuraikan sebagai berikut.

2.1. Literature Review

Literature review, dalam bahasa Indonesia disebut telaah pustaka, adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis maupun tidak tertulis yang sudah dipublikasikan untuk kemudian ditelisik sebagai bahan analisis dan interpretasi.¹ Sumber tertulis itu misalnya manuskrip, buku, laporan penelitian, laporan data statistik, *trend*, dan sebagainya. Sumber tidak tertulis misalnya video, foto, hasil karya seni, dan sebagainya. Dalam melakukan *literature review*, peneliti melakukan *deskstudy* yakni bekerja di ruang belajar, perpustakaan, dan sebagainya, untuk mencermati data-data penelitian yang sudah ada berdasarkan relevansinya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Literature review dalam konteks penelitian ini dilakukan sebagai tahap awal penelitian, sebelum penelitian lapangan yang sesungguhnya dilakukan. Tahapan ini diawali dengan menentukan isu-isu krusial terkait dengan kesetaraan dan kesejahteraan

¹ Baglione, L 2012, *Writing a research paper in political science*, CQ Press, Thousand Oaks.

perempuan. Setelahnya dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data statistik yang sudah dilaporkan oleh berbagai instansi pemerintahan dan nonpemerintah seperti LSM dan media yang terkait dengan isu gender. Informasi-informasi statistik yang diperoleh dari proses *literature review* ini memberikan potret situasi dan kondisi awal serta kecondongan persoalan kesetaraan gender di Kota Yogyakarta. Ini menjadi titik pijak langkah berikutnya yaitu melakukan identifikasi potensi pemberdayaan perempuan di lapangan melalui *baseline survey*, FGD maupun *in-depth interview*.

Bahan-bahan yang digunakan sebagai sumber informasi tertulis dalam proses *literature review* ini adalah Propinsi DIY Dalam Angka 2014, Statistik Kota Yogyakarta 2015, Profil Kesehatan Provinsi DIY 2009, dan berbagai laporan media yang dipublikasikan secara *online* maupun cetak. Bahan-bahan ini digunakan untuk menelisik akses kaum perempuan di ranah politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Cakupan aspek-aspek ini didasarkan pada pemikiran tentang kebutuhan gender (*gender needs*) yang terdiri dari kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis. Aspek politik merupakan representasi kebutuhan strategis (*strategic needs*) yang mengacu pada akses perempuan terhadap pembuatan keputusan di dalam *kebijakan* publik. Aspek lainnya adalah representasi kebutuhan praktis (*practical needs*) yang mengacu pada kesejahteraan dan kelayakan hidup kaum perempuan.

Aspek strategis dan praktis ini digunakan untuk membedah berbagai aspek-aspek di ranah sektoral. Aspek ekonomi merujuk

pada penyerapan tenaga kerja antara kaum laki-laki dan perempuan, serta tingkat pendapatan antara keduanya. Aspek pendidikan berkaitan dengan kesempatan memperoleh pengetahuan dan keahlian di bangku sekolah dan perguruan tinggi. Aspek kesehatan fokus pada tingkat kematian ibu melahirkan serta bayi dan balita. Terakhir, aspek perlindungan terhadap KDRT bagi kaum perempuan merujuk pada kecondongan jumlah KDRT di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun.

Sangat disadari bahwa idealnya data-data yang disajikan bersifat detail dan komprehensif agar informasi awal yang diperoleh lebih lengkap. Hanya saja, karena keterbatasan waktu, sumber daya dan data yang tersedia, *literature review* hanya mencakup isu-isu utama. *Literature review* berfungsi menyediakan *preview* tentang situasi dan kondisi perempuan di Kota Yogyakarta.

2.2. Baseline Survey

Menurut FAO (2013) *baseline survey* adalah “a descriptive cross-sectional survey that mostly provides quantitative information on the current status of a particular situation – on whatever study topic – in a given population. It aims at quantifying the distribution of certain variables in a study population at one point in time”.²Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa *baseline survey* bersifat deskriptif dalam kurun waktu tertentu, maupun yang mencakup daerah tertentu, sebagai informasi kuantitatif tentang situasi-situasi saat ini, dalam topik kajian apapun, di dalam populasi. Tujuan dari *baseline survey*

² Dapat dilihat dalam <http://www.fao.org/docrep/008/y5793e/y5793e07.htm>

adalah melakukan penghitungan (*quantification*) variabel-variabel tertentu dalam mempelajari populasi pada kurun waktu tertentu.

Dalam penelitian ini, *baseline survey* merupakan teknik pengumpulan data awal tentang peta pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta. Bedanya dengan *literature review* adalah, meski sama-sama menyediakan informasi awal, *literature review* bertujuan mengidentifikasi gambaran awal situasi dan kondisi perempuan dalam ranah politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan KDRT. Sebaliknya, *baseline survey* sudah menasar langsung pada peta pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta. Hanya saja, sifatnya deskriptif dan bukan analitis sebagaimana metode penelitian kualitatif yang dilakukan dalam tahap berikutnya. Temuan dari *baseline survey* ini, selain sebagai informasi dasar, juga dapat digunakan sebagai referensi untuk konfirmasi dan klarifikasi sekaligus mengecek validitas temuan dalam penelitian kualitatif selanjutnya.

Pertanyaan yang dicakup dalam *baseline survey* yang diselenggarakan sejak November-Desember 2015 dalam penelitian ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:³

1. Identitas lembaga, yang mencakup:
 - a. Nama lembaga;
 - b. Alamat;
 - c. Telp/fax/email;
 - d. Tahun berdiri;

³ Lebih detail bisa dilihat di lampiran yang menjelaskan kuesioner yang disebar selama *baseline survey*

- e. Jenis lembaga: Pemerintah, Pusat studi, Ormas, NGO, PKK, Pesantren, Lain-lain;
 - f. Sumber daya: peneliti, pendamping dan staf administrasi;
 - g. Komposisi staf: laki-laki dibandingkan perempuan;
 - h. Mitra kerjasama/funding.
2. Fokus Kegiatan/Program pemberdayaan perempuan, yang mencakup:
- a. Isu-isu yang dicakup dan/atau kegiatan yang dilakukan di bidang:
 - Politik;
 - Pendidikan;
 - Ekonomi;
 - Sosial budaya;
 - Kesehatan;
 - Keagamaan;
 - Lain-lain.
 - b. Kelompok Sasaran, dengan Kegiatan/Program yang Pernah dilakukan kepada:
 - Anak-anak perempuan;
 - Perempuan miskin pedesaan;
 - Perempuan miskin perkotaan;
 - Perempuan kel. minoritas (etnis maupun agama);
 - Perempuan pemimpin/birokrat/politisi DPR-DPRD;
 - Perempuan Pekerja rumah tangga;
 - Lansia perempuan;
 - Perempuan kepala rumah tangga;
 - Pemilih perempuan (dalam pemilu);
 - Perempuan pekerja seks komersial (PSK);

- Transgender dan kelompok LGBTQ;
 - Perempuan pekerja migran;
 - Perempuan aktivis komunitas/LSM dan akademisi;
 - Perempuan pesantren (ustadzah dan santri);
 - Pendeta perempuan, suster, bikhuni, dan lain-lain;
 - Lain-lain.
- c. Cakupan (*coverage*), yang meliputi:
- Rata-rata jumlah penerima manfaat program per tahun;
 - Lokasi sasaran di wilayah Kota Yogyakarta;
 - Lokasi sasaran di dalam Propinsi DIY, selain di wilayah Kota Yogyakarta;
 - Lokasi sasaran di luar DIY.
- d. Pendekatan yang dilakukan (jawaban bisa lebih dari 1) dengan rata-rata Persentase per tahun, berupa:
- Penelitian;
 - Advokasi hukum/kebijakan;
 - Pelatihan/workshop/seminar;
 - Pendampingan masyarakat.
3. Masukan bagi Pemerintah Kota terkait program pemberdayaan perempuan;
4. Masukan bagi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP).

Salah satu data penting untuk mendukung pemetaan tersebut adalah data lembaga-lembaga yang *concern* dengan isu perempuan dan pemberdayaan perempuan di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Data ini selanjutnya akan menjadi salah satu rujukan

Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta dalam menyusun program pemberdayaan perempuan ke depan. Untuk itu, responden dalam *baseline survey* ini sudah ditentukan sejak awal, disebut dengan *purposive sampling*, responden dipilih sesuai dengan relevansi fokus kegiatan pada program pemberdayaan perempuan. Sebagian besar responden fokus pada perempuan, dan sebagian yang lain fokus pada isu lain tetapi masih bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan isu perempuan.

Responden dalam *baseline survey* ini terdiri dari 1 Kelompok PKK tingkat kelurahan yang diambil dari tiap kecamatan di Kota Yogyakarta dan PKK tingkat Kota Yogyakarta, LSM, Pusat Studi Perempuan/Wanita/Gender yang masih aktif di kampus-kampus negeri dan swasta di Propinsi DIY (tidak harus di Kota Yogyakarta, dengan pertimbangan kampus-kampus di Propinsi DIY biasanya juga punya pengalaman dalam penelitian maupun pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta), ormas, organisasi sosial/keagamaan, dan instansi pemerintah. Ada sekitar 39 kuesioner yang disebar ke masing-masing organisasi tersebut, dengan jumlah pengembalian kuesioner terjawab sekitar 25 eksemplar.

Dari responden yang diidentifikasi, peneliti kemudian mengelompokkan berdasarkan kategorinya. Responden yang diidentifikasi antara lain:

1. Instansi pemerintah, antara lain Disperindagkoptan Kota Yogyakarta, Dinsos Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, dan KPMP Kota Yogyakarta;

2. PKK, antara lain: PKK Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo, PKK Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen, PKK Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Pakuncen, PKK Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Gedongkiwo, PKK Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan, PKK Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede, PKK Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton, dan PKK Tingkat Kota Yogyakarta;
3. LSM (NGO) dan/atau Ormas, antara lain: Yakkum Emergency Unit, CD Bethesda, Rifka Annisa Woman Crisis Center, Mitra Wacana, Narasita, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), Arkom, LSPPA (pemberdayaan ekonomi), Aksara, Rumpun Tjoet Nyak Dien, Rekso Dyah Utami (RDU), IHAP (Institusi Hak Asasi Perempuan Indonesia), LBH Yogyakarta, Yasanti (Yayasan Annisa Swanti), LBH APIK Yogyakarta, Paluma Nusantara dan IDEA;
4. Pusat studi: PSG UII Yogyakarta, PSW UIN Yogyakarta, PSW UGM Yogyakarta, PSW UNY Yogyakarta dan PSW UMY;
5. Organisasi sosial/keagamaan: Aisyiyah Yogyakarta, Muslimat NU, Fatayat NU, Wanita Katolik dan Yayasan Sawo Kembar.

2. 3. Focus Group Discussions (FGD)

Menurut ODI (Overseas Development Institute 2009),⁴ Focus Group Discussion adalah, “*a good way to gather together people from similar backgrounds or experiences to discuss a specific topic of interest. The group of participants is guided by a moderator (or group facilitator who introduces topics for discussion and helps the group to participate in a lively and natural discussion amongst themselves.*” Dengan kata lain, Focus Group Discussion (FGD) adalah cara untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang yang mempunyai latar belakang dan pengalaman yang mirip untuk mendiskusikan topik maupun isu tertentu.

Sekelompok peserta FGD ini dipandu oleh seorang moderator atau fasilitator kelompok yang mengenalkan topik untuk didiskusikan bersama, sekaligus membantu/menstimulasi sekelompok peserta tersebut untuk berpartisipasi dalam diskusi secara langsung di antara mereka. ODI juga menyebutkan, FGD dapat juga digunakan untuk mengelaborasi data-data kuantitatif yang diperoleh dari *baseline survey* agar memperoleh penjelasan yang lebih dalam.

Penjelasan ini sangat relevan dengan metode FGD yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam FGD yang diselenggarakan pada 20 November 2015, peserta dikelompokkan berdasarkan latar belakang organisasi. Kelompok PKK dijadikan satu dengan ormas. Sementara itu, kelompok FGD yang lain terdiri dari instansi pemerintah, LSM dan pusat studi. Pengelompokan ini dimaksudkan

⁴ Sebagaimana bisa dilihat di www.odi.org/publications/5695-focus-group-discussion

untuk memastikan bahwa peserta berasal dari latar belakang yang relatif sama, sehingga satu sama lain dapat saling memahami informasi yang diberikan, dapat saling menambahkan, sekaligus mengklarifikasi. Peserta FGD dipandu oleh seorang fasilitator, yang membantu peserta untuk menjawab secara lebih mendalam poin-poin yang sudah ditanyakan dalam *baseline survey*, dengan elaborasi penjelasan yang lebih lengkap. Tentu saja ada modifikasi-modifikasi pertanyaan guna memudahkan peserta menjawab pertanyaan. Modifikasi-modifikasi mencakup aspek-aspek dalam peta potensi pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam FGD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa fokus utama kegiatan pemberdayaan perempuan organisasi Bapak/Ibu?
2. Apa fokus tambahannya?
3. Apa persoalan yang mendasari penentuan fokus utama tersebut?
4. Apa persoalan yang mendasari penentuan fokus tambahan tersebut?
5. Bagaimana kapasitas organisasi/lembaga Bapak/Ibu dalam mengelola fokus kegiatan pemberdayaan tersebut?
6. Bagaimana pendanaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan diatasi?
7. Bagaimana organisasi/lembaga Bapak/Ibu menentukan penerima manfaat (*beneficiaries*) kegiatan pemberdayaan perempuan?

8. Strategi apa saja yang diterapkan organisasi/lembaga Bapak/Ibu untuk menyukseskan kegiatan pemberdayaan perempuan?
9. Isu perempuan seringkali merupakan isu yang sensitif di masyarakat. Bagaimana organisasi/lembaga Bapak/Ibu menyiasatinya?
10. Bagaimana tanggapan keluarga/lingkungan terdekat *beneficiaries* terhadap kegiatan Bapak/Ibu?
11. Bagaimana organisasi/lembaga Bapak Ibu menghadapinya?
12. Bagaimana dukungan dari pemerintah?
13. Apa yang perlu diperbaiki dari peran pemerintah kota dalam pemberdayaan perempuan?
14. Bagaimana dengan jaringan dengan organisasi/lembaga yang fokus pada isu serupa?
15. Seberapa jauh mendukung, atau sebaliknya menghambat?
16. Apa yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait program pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta?

Peserta yang dilibatkan dalam FGD sama dengan responden dalam *baseline survey*. Relevansi fokus kegiatan lembaga dengan isu pemberdayaan perempuan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan peserta FGD. Dari 39 undangan yang disebar, kurang lebih dua pertiganya berkenan datang dan berpartisipasi dalam FGD. Sebagaimana dalam baseline, peserta FGD yang diundang adalah sebagai berikut:

1. Instansi pemerintah, antara lain Disperindagkoptan Kota Yogyakarta, Dinsos Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, dan KPMP Kota Yogyakarta;
2. PKK, antara lain: PKK Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo, PKK Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen, PKK Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Pakuncen, PKK Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Gedongkiwo, PKK Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan, PKK Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede, PKK Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton, dan PKK Tingkat Kota Yogyakarta;
3. LSM (NGO) dan/atau Ormas, antara lain: Yakkum Emergency Unit, CD Bethesda, Rifka Annisa Woman Crisis Center, Mitra Wacana, Narasita, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), Arkom, LSPPA (pemberdayaan ekonomi), Aksara, Rumpun Tjoet Nyak Dien, Rekso Dyah Utami (RDU), IHAP (Institusi Hak Asasi Perempuan Indonesia), LBH Yogyakarta, Yasanti (Yayasan Annisa Swanti), LBH APIK Yogyakarta, Paluma Nusantara dan IDEA;
4. Pusat studi: PSG UII Yogyakarta, PSW UIN Yogyakarta, PSW UGM Yogyakarta, PSW UNY Yogyakarta dan PSW UMY;
5. Organisasi sosial/keagamaan: Aisyiyah Yogyakarta, Muslimat NU, Fatayat NU, Wanita Katolik dan Yayasan Sawo Kembar.

2. 4. *In-depth Interviews* (Wawancara Mendalam)

Menurut Boyce dan Neale (2006),⁵ *in-depth interview* adalah, “a qualitative research technique that involves conducting intensive individual interviews with a small number of respondents to explore their perspectives on a particular idea, program, or situation. For example, we might ask participants, staf, and others associated with a program about their experiences and expectations related to the program, the thoughts they have concerning program operation, processes, and outcomes, and about any changes they perceive in themselves as a result of their involvement in the program.”

Dari definisi di atas, dapat kita tarik pengertian bahwa *in-depth interview* adalah teknik penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara individual secara intensif dengan jumlah responden yang relatif sedikit guna mengeksplorasi perspektif-perspektif mereka terkait dengan ide-ide, program, atau situasi tertentu. Boyce dan Neale memberikan contoh *in-depth interview* dalam pelaksanaan sebuah program, peneliti menanyakan kepada partisipan, staf, dan pihak lain yang terkait dengan program, pikiran yang mereka miliki berhubungan dengan penyelenggaraan, proses dan dampak dari program, juga tentang perubahan yang mereka rasakan di dalam diri mereka sebagai hasil dari keterlibatan mereka di dalam program.

Dari pengertian di atas, kita bisa menarik beberapa persamaan dan perbedaan *in-depth interview* dengan FGD. *In-depth interview* dan FGD sama-sama bermaksud mengelaborasi pertanyaan

⁵ Boyce, C dan Neale, P 2006, *Conducting in-depth interviews: A guide for designing and conducting in-depth interviews for evaluation input*, Pathfinder International Tool Series, Monitoring and Evaluation-2, Pathfinder International.

secara lebih mendalam secara langsung (tanpa instrumen kuesioner). Tetapi *in-depth interview* lebih bersifat individual, sementara FGD lebih bersifat kelompok. Di dalam *in-depth interview*, penanya memegang kunci kedalaman dari *interview*, sementara di FGD moderator/fasilitator lebih banyak berperan. Karena bersifat individual, *in-depth interviews* memungkinkan dileborasinya pertanyaan lebih dalam dari FGD. Hanya, *in-depth interview* akan memerlukan waktu yang lebih lama, karena informasi mesti didatangi satu per satu, dan satu kali wawancara bisa memakan waktu antara 1-2 jam. Sementara itu, FGD dapat berlangsung dalam waktu yang lebih singkat, antara 2-4 jam di hari yang sama, dengan kemungkinan rangkuman informasi dari berbagai pihak di dalam kelompok secara lebih cepat. Tetapi, kelemahan dari FGD ini adalah tidak memungkinkan untuk dilaborasi satu per satu secara lebih mendalam, mengingat berbagai kendala teknis, maupun psikologis yang dialami oleh para peserta. Kelemahan dalam FGD ini kemudian ditutupi dengan teknik *in-depth interviews* yang memungkinkan relasi dan komunikasi yang intens dan personal dengan para informan.

In-depth interview dalam penelitian ini dilakukan dengan 10 informan yang dipilih berdasarkan kategori yang telah dibuat untuk keperluan *baseline survey* dan FGD sebagaimana dijelaskan sebelumnya. *In-depth interview* dilakukan sepanjang bulan November sampai dengan Desember 2015, menyesuaikan ketersediaan waktu masing-masing informan. *In-depth interview* dilakukan dengan cara menyusun *plan A* dan *plan B*, *plan A* adalah rencana guna mewawancarai informan-informan prioritas.

Sementara *plan B* adalah rencana kedua jika tidak secara keseluruhan *plan A* terlaksana, dengan mengganti informan-informan di daftar semula yang ternyata berhalangan.

Daftar pertanyaan *utamain-depth interview* menasar secara langsung pada peta potensi pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta berdasarkan perspektif dan pengalaman masing-masing informan. Dalam praktiknya, pertanyaan-pertanyaan ini dikembangkan lebih dalam (*probing*) tergantung alur percakapan selama wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam *in-depth interview* antara lain sebagai berikut, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2. 1:

Tabel 2. 1
Daftar pertanyaan *In-Depth Interview*

| No. | ASPEK | PERTANYAAN |
|-----|---|---|
| 1. | Isu-isu krusial dalam pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta | a. Apa saja masalah mendasar yang dihadapi kelompok perempuan di Kota Yogyakarta menurut organisasi Ibu/Bapak? b. Bagaimana persoalan-persoalan tersebut melatarbelakangi kegiatan/program pemberdayaan yang dilakukan organisasi Ibu/Bapak? c. Apa persoalan utama yang dihadapi perempuan di sektor/isu yang dikerjakan |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>organisasi Ibu/Bapak? (Jika sudah dijawab, berikan pertanyaan penegasan bahwa memang persoalan-persoalan tersebut yang utama di sektor/isu tersebut).</p> |
| 2. | <p>Strategi (misalnya: apakah <i>self-help</i>, yakni membangun kapasitas untuk menuju kemandirian; <i>policy engagement</i>, yakni membangun kapasitas untuk mengubah kebijakan atau mengubah praktik buruk; konflik, yakni <i>vis a vis</i> dengan negara, pemerintah, atau kelompok lain yang menjadi lawan gerakan, dll, sesuai jawaban narasumber)?</p> | <p>a. Apa strategi yang dipilih organisasi Ibu/Bapak untuk merespon persoalan mendasar di atas Mengapa strategi tersebut dipilih? Sejauhmana strategi tersebut relevan dan terbukti tepat?</p> <p>b. Dari hasil evaluasi selama ini, apa kelebihan dan kekurangan dari strategi tersebut?</p> <p>c. Bagaimana organisasi Ibu/Bapak merespon kelemahan tersebut?</p> |
| 3. | <p>Program dan kegiatan</p> | <p>a. Bertolak dari pilihan strategi, apa saja program/kegiatan turunan dari strategi tersebut (peningkatan kapasitas, pendampingan, advokasi, dll)?</p> <p>b. Apa dasar utama dalam penentuan program/kegiatan (murni manifestasi dari strategi dan ditentukan sepihak oleh organisasi,</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>atau permintaan dari <i>beneficiaries</i>, ataukah berbasis tawaran donor)?</p> <p>c. Apakah ada pergeseran pilihan program/kegiatan dari tahun ke tahun? Mengapa itu terjadi?</p> |
| 4. | Sasaran program/ <i>target beneficiaries</i> | <p>a. Siapa sasaran program organisasi Ibu/Bapak?</p> <p>b. Apa kriteria yang digunakan untuk menentukan sasaran program?</p> <p>c. Bagaimana penentuan distribusi penerima manfaat dilakukan?</p> <p>d. Dengan melihat problem umum dan problem di sektor/isu dimana organisasi Ibu/Bapak bekerja, kelompok mana yang belum mampu dicakup? Mengapa itu terjadi? Bagaimana organisasi Ibu/Bapak merespon hal itu?</p> |
| 5. | Tatakelola program dan kegiatan | <p><i>Aspek Pendanaan</i></p> <p>a. Menurut Ibu/Bapak, apa tantangan dan hambatan secara umum dalam hal pendanaan?</p> <p>b. Sumber-sumber potensial apa saja bagi pendanaan program pemberdayaan perempuan?</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Sejauhmana potensi itu tergal?</p> <p>c. Khusus untuk organisasi Ibu/Bapak, darimana saja sumber pendanaan bagi program/kegiatan?</p> <p>d. Bagaimana dana yang tersedia diprioritaskan?</p> <p>e. Bagaimana organisasi Ibu/Bapak memperoleh sumber pendanaan program (calls for proposal, penunjukkan langsung, dll.)? Darimana saja?</p> <p>f. Apa pelajaran berharga/refleksi Ibu/Bapak ketika mengelola program dengan sumber-sumber pendanaan saat ini (donor internasional, pemerintah, swasta, dll)?</p> <p>g. Bagaimana skema ideal pendanaan bagi program pemberdayaan perempuan?</p> <p><i>Aspek Sumber daya Manusia</i></p> <p>a. Apa masalah utama terkait SDM pegiat/aktivis/pelaku pemberdayaan perempuan?</p> <p>b. Apakah persoalan tersebut juga terjadi di organisasi Ibu/Bapak?</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| | | <p>Bagaimana organisasi Ibu/Bapak mensiasati?</p> <p>c. Adakah potensi SDM yang belum tergarap (voluntir, KKN, dll.)?</p> <p>d. Apa visi Ibu/Bapak terkait pengembangan SDM di LSM, pemerintah dan perguruan tinggi?</p> <p>Aspek Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. Bagaimana organisasi Ibu/Bapak melakukan monitoring dan evaluasi guna menjaga kualitas pelaksanaan program?</p> <p>b. Apa saja yang diukur dalam monev?</p> <p>c. Apa saja upaya yang dilakukan agar hasil monev diterapkan? Apa hambatan dan tantangan monev di organisasi Ibu/Bapak?</p> <p>d. Sejauhmana keterlibatan <i>beneficiaries</i> dalam monev (jika belum terjawab di pertanyaan sebelumnya)?</p> <p>e. Apa praktik baik yang selama ini sudah berjalan terkait monev?</p> |
| 6. | Peran dan kemitraan dengan parapihak | <p><i>Pemerintah, LSM, PTN</i></p> <p>a. Menurut Ibu/Bapak, bagaimana seharusnya pemerintah berperan</p> |

| | | |
|----|-------------|--|
| | | <p>dalam pemberdayaan perempuan terkait aspek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan ? - Jenis program/kegiatan yang dilaksanakan? - Pelaksanaan program? - Koordinasi antar pelaku pemberdayaan? <p>b. Apa evaluasi secara umum Ibu/Bapak terkait kebijakan dan program pemerintah dalam program pemberdayaan (kelebihan dan kekurangan)?</p> <p>c. Apa evaluasi terhadap peran-peran para-pihak tersebut terkait program/kegiatan yang dilakukan organisasi Ibu/Bapak?</p> <p>d. Dalam hal apa kemitraan terjadi?</p> <p>e. Apa faktor-faktor yang memungkinkan kemitraan terjadi?</p> <p>f. Apa hasil dari kemitraan?</p> <p>g. Adakah tantangan dan hambatan?</p> <p>h. Bagaimana mensiasati hal tersebut?</p> |
| 7. | Rekomendasi | <p>a. Apa rekomendasi Ibu/Bapak bagi</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>pemerintah terkait perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan monev program pemberdayaan perempuan?</p> |
|--|--|--|

In-depth interview dilakukan dengan memperhatikan kode etik wawancara, misalnya ijin untuk melakukan wawancara, aspek kerahasiaan jika memang dikehendaki, dan ijin untuk mempublikasikan hasil wawancara sebagai temuan penelitian, sehingga hak-hak informan sebagai pihak pemberi informasi dapat tetap terjaga. Beberapa langkah yang dilakukan guna menjamin hak-hak informan yang menjadi perhatian selama wawancara antara lain adalah sebagai berikut:

- *In-depth interview* diawali dengan menyampaikan maksud wawancara, yakni sebagai pendalaman terhadap FGD yang telah dilakukan.
- Dilanjutkan dengan permintaan izin untuk merekam wawancara guna memudahkan dokumentasi data dan menjaga akurasi.
- *Recorder* tidak ditempatkan mencolok agar narasumber merasa nyaman, tanpa mengganggu proses perekaman.
- Menyampaikan pertanyaan satu per satu. Pertanyaan ganda akan menyulitkan karena peneliti harus mencermati apakah jawaban sudah menjawab pertanyaan; narasumber juga akan bingung, pertanyaan mana yang harus dijawab.

Daftar informan yang terlibat dalam *in-depth interview* adalah sebagai berikut:

1. Unsur instansi pemerintah: Bappeda (2 orang) dan KPMP;
2. Unsur PKK: PKK Wirobrajan;
3. Unsur LSM: Yasanti, Paluma Nusantara;
4. Unsur pusat studi: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan PSW UNY;
5. Unsur organisasi sosial/keagamaan/ormas: Aisyiyah (Muhammadiyah) dan Yayasan Sawo Kembar.

- ∞ -

BAB 3

ANALISIS SITUASI : ISU KESETARAAN GENDER DI KOTA YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan. Predikat ini tidak hanya berarti Yogyakarta menjadi kota yang kondusif untuk belajar bagi para pelajar sekolah dan mahasiswa. Secara tidak langsung, label kota pendidikan juga mengandaikan ketersediaan akses pendidikan bagi warganya yang memadai, terutama untuk kelompok perempuan. Akan tetapi, apakah faktanya demikian? Isu pendidikan hanya satu ilustrasi untuk melihat kondisi perempuan di Yogyakarta. Pertanyaan lebih jauh, bagaimana dengan kondisi perempuan di Kota Yogyakarta dalam aspek-aspek yang lain? Bagian ini berupaya menelisik data statistik terkait dengan situasi perempuan di Kota Yogyakarta.

Bab ini menjelaskan situasi dan kondisi kesetaraan gender di Kota Yogyakarta berdasarkan data resmi dari berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait. Aspek-aspek yang dipaparkan meliputi politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap kekerasan domestik bagi perempuan. Isu kesetaraan gender tentu saja mencakup banyak sekali aspek. Agar fokus, bab ini memotret sejumlah aspek-aspek paling utama sebagaimana disebutkan di atas.

Tujuan pemaparan data-data statistik terkait kesetaraan gender ini tidak lain adalah untuk memperjelas peta permasalahan kesetaraan perempuan di Kota Yogyakarta. Peta permasalahan

tersebut dapat menjadi pijakan awal bagi identifikasi potensi pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya menjadi rujukan bagi pembuatan kebijakan terkait perempuan. Sebagai catatan, tidak semua data merupakan data mutakhir, tergantung pada ketersediaan data. Namun, pemaparan data tersebut tetap membantu melihat pemetaan masalah kesetaraan perempuan di Kota Yogyakarta.

Sebelum memaparkan lebih rinci data-data statistik terkait kondisi perempuan di Kota Yogyakarta, penting kiranya memaparkan kondisi demografis dan *setting* sosial Kota Yogyakarta. Pemaparan kondisi demografis mencakup jumlah penduduk secara umum di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun beserta perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di dalamnya. Sedangkan pemaparan *setting* sosial di Kota Yogyakarta bertujuan untuk memaparkan kondisi sosiologis di Kota Yogyakarta secara umum yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi kesetaraan maupun ketidaksetaraan gender di Kota Yogyakarta.

3. 1. Kondisi Demografis Kota Yogyakarta

Secara umum, jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2013 adalah 402.709 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun hampir sama. Populasi penduduk laki-laki berkisar antara 48 persen lebih, sedangkan jumlah penduduk perempuan berkisar 51 persen lebih. Kendati jumlah penduduk berkurang dan bertambah dari tahun ke tahun, tetapi rerata pengurangan dan penambahannya antara 1000-2000 jiwa,

dengan perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan yang tidak berubah secara signifikan. Rincian jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2008-2013 dan perbandingan jenis kelamin disajikan di tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta dan Perbandingan Jenis Kelamin

| Tahun | Jumlah penduduk | Perbandingan Jenis Kelamin | |
|-------|-----------------|----------------------------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan |
| 2008 | 390 783 | - | - |
| 2009 | 389 685 | - | - |
| 2010 | 388 627 | 48,60% | 51,40% |
| 2011 | 390 553 | - | - |
| 2012 | 394 012 | - | - |
| 2013 | 402 709 | 48,67% | 51,33% |

Sumber: Propinsi DIY Dalam Angka 2014.

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2013 sebesar 402.709 ini merupakan yang paling sedikit di Propinsi DIY dibandingkan dengan Kabupaten yang lain. Kabupaten Sleman adalah yang tertinggi dengan jumlah penduduk mencapai 1.141.684, membentuk sebesar 31,76 persen jumlah total penduduk Propinsi DIY. Jumlah penduduk tertinggi kedua adalah Kabupaten Bantul yang membentuk 26,35 penduduk Propinsi DIY, disusul dengan Gunungkidul dengan 19,48 persen dengan jumlah penduduk 700192, lalu Kulon Progo sebesar 11,22 persen dengan jumlah penduduk 403.203. Kota Yogyakarta sendiri hanya berkontribusi kurang lebih 11,2 persen dari total penduduk Propinsi DIY.

Dalam hal perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, karakteristik Kota Yogyakarta dapat dikatakan hampir sama dengan rata-rata perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di kota/kabupaten di Propinsi DIY. Kecuali di Kabupaten Sleman, jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki. Tabel 3. 2 menjelaskan hal tersebut.

Tabel 3.2
Persentase Rumah Tangga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/kota di Propinsi DI Yogyakarta pada tahun 2013

| Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i> | Rumah Tangga <i>Number of Household</i> | Penduduk/ <i>Number of Population</i> | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | Laki-laki <i>Male</i> | Perempuan <i>Female</i> | Jumlah <i>Total</i> |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Kulonprogo | 10,23 | 49,01 | 50,99 | 100,00 |
| 2. Bantul | 24,22 | 49,62 | 50,38 | 100,00 |
| 3. Gunung Kidul | 18,80 | 48,23 | 51,77 | 100,00 |
| 4. Sleman | 33,97 | 50,35 | 49,65 | 100,00 |
| 5. Yogyakarta | 12,77 | 48,60 | 51,40 | 100,00 |
| DIY | 100,00 | 49,01 | 50,99 | 100,00 |

Sumber: Propinsi DIY Dalam Angka Tahun 2014.

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah (persentase) penduduk laki-laki di Kota Yogyakarta adalah ke-4 tertinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Propinsi DIY.

Sementara itu, dari segi persentase penduduk perempuan, Kota Yogyakarta adalah kedua tertinggi (setelah Gunungkidul) dibandingkan kota/kabupaten lain di Propinsi DIY.

3. 2. *Setting* Sosial Kota Yogyakarta

Lalu, bagaimanakah *setting* sosial Kota Yogyakarta? Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Keberadaan beragam kampus dan sekolah-sekolah favorit menjadikan Kota Yogyakarta sebagai magnet tujuan para pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk menuntut ilmu. Keberadaan Keraton Yogyakarta dengan adat, tradisi, dan budaya Jawa yang masih kuat di antara para penduduknya juga menjadikan kota ini identik sebagai kota budaya. Label sebagai kota pendidikan dan budaya memiliki implikasi sosiologis, ekonomi, dan politik yang menarik. Bagian ini mencoba menjelaskan situasi sosial kota Yogyakarta sebagai basis awal untuk memahami relasi gender dan kesetaraan gender di Kota Yogyakarta.

Secara kultural, Kota Yogyakarta terikat kuat dengan budaya Jawa. Tidak hanya dalam hal pakaian, tetapi juga perilaku, dan pemikiran. *Unggah-ungguh*, *andhap asor*, dan *tepa selira* merupakan beberapa contoh nilai budaya Jawa yang terus diperlihara oleh masyarakat Kota Yogyakarta. *Unggah-ungguh* berarti menjunjung tinggi sopan santun. *Andhap asor* berarti menjaga kerendahan hati di hadapan orang lain. *Tepa selira* berarti memahami orang lain, bertoleransi, dan mau mengerti kondisi orang lain (tidak egois). Seperangkat nilai ini tidak hanya menjadi kode etik dalam pergaulan sehari-hari, tetapi juga menjadi alat ukur tentang baik dan buruk.

Nilai ini menjadi acuan dalam menjaga kohesi dan harmoni sosial di masyarakat. Tidak hanya itu, seperangkat nilai ini juga dipercaya membantu daya adaptasi masyarakat Jawa ketika bersentuhan dengan masyarakat lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda.

Tanpa menampik nilai kegunaannya dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat, sebagaimana para ilmuwan sosial mengamini, nilai-nilai di dalam masyarakat tidak pernah netral. Ada relasi kekuasaan yang melekat di dalamnya. Seperangkat nilai ini juga berbicara banyak mengenai struktur relasi kekuasaan dalam masyarakat Jawa. Seperangkat nilai ini tidak hanya bersifat menentukan dalam hubungan antara yang muda dengan yang tua, melainkan juga antara laki-laki dan perempuan. Terlebih, dengan karakter sosial yang patriarkis, seperangkat nilai ini sangat berpengaruh dalam relasi gender yang terbentuk. Selain relasi gender antara laki-laki dan perempuan, pengaruh budaya juga berimbas pada relasi antara perempuan kelas atas dan perempuan kelas bawah di dalam masyarakat Jawa.

Tidak bisa dipungkiri, masyarakat Kota Yogyakarta juga diuntungkan dengan karakter pemimpinnya yakni Sultan HB X yang sangat terbuka terhadap kemajuan pendidikan maupun karier kaum perempuan. Terlepas dari ditekankannya nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi sopan santun, rendah hati, dan toleransi, Sultan HB X telah memberikan contoh pentingnya membuka kesempatan kaum perempuan untuk berkarya di masyarakat.

Aktivisme Ibu Ratu Hemas di ranah publik sebagai penggerak PKK, anggota DPD RI, maupun tokoh gerakan perempuan di level

Propinsi DIY maupun nasional menjadi teladan betapa kemajuan kaum perempuan adalah sesuatu yang juga penting bagi masyarakat. Menjunjung tinggi nilai budaya Jawa, idealnya dengan demikian, tidak berarti harus menjadikan kaum perempuan terbelakang. Menjunjung tinggi nilai budaya Jawa, dapat juga diselaraskan dengan upaya memajukan peran kaum perempuan di berbagai ranah kehidupan. Nilai-nilai budaya Jawa, dengan demikian, sejatinya tidak perlu dinegasikan dengan kesetaraan gender.

Masyarakat Kota Yogyakarta terikat secara kultur dengan budaya Jawa yang sangat kuat, namun secara sosiologis adalah masyarakat urban. Kota Yogyakarta mungkin satu-satunya daerah di Propinsi DIY yang memiliki ketergantungan mata pencaharian terhadap pertanian paling rendah. Pertanian di Indonesia sangat identik dengan kehidupan masyarakat rural. Masyarakat Kota Yogyakarta juga tidak terlalu tergantung pada industri, dalam arti sektor produksi barang-barang dalam skala besar, sebagaimana karakter masyarakat urban pada umumnya. Sebagian besar masyarakat urban Kota Yogyakarta bekerja di sektor industri kreatif yang banyak mengelola hasil-hasil seni dalam skala rumah tangga, selain juga bertumpu pada industri pariwisata.

Karakter urban masyarakat Kota Yogyakarta juga dapat dilihat dari segi kemajemukan masyarakat. Meski suku Jawa mendominasi komposisi penduduk Kota Yogyakarta, tetapi masyarakat Kota Yogyakarta dapat dikatakan sebagai masyarakat majemuk. Sebagai kota pendidikan dan budaya, yang dikenal dengan sektor pariwisatanya, masyarakat Kota Yogyakarta telah terbiasa dengan pendatang dari beraneka suku bangsa maupun mancanegara.

Di berbagai sudut kota bahkan dikenal kelompok masyarakat berdasarkan suku bangsanya. Ada kampung Cina di sekitar Malioboro, ada kampung Arab di Sayidan yang letaknya juga tidak jauh dari pusat perdagangan Malioboro, ada Bugisan yang dulunya dikenal sebagai tempat berkelompoknya orang-orang Bugis (Sulawesi), dan sebagainya. Meski terkadang tetap tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan sosial berbasis suku dan ras, sejauh ini dapat dikatakan bahwa kondisi sosial Kota Yogyakarta relatif kondusif. Keragaman ini turut berkontribusi dalam pembentukan karakter masyarakat Kota Yogyakarta yang terbuka.

Di sisi lain, kondisi kemiskinan di Kota Yogyakarta masih memerlukan perhatian. Meski terus mengalami penurunan, dan merupakan daerah di Propinsi DIY dengan persentase kemiskinan paling rendah, tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta pada 2013 mencapai titik 8,82 persen.

Tabel 3.3
Tingkat Kemiskinan Kota/Kabupaten di Propinsi DIY pada 2013

| Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i> | September 2012 | | | September 2013 | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|--------------|
| | Garis Kemiskinan <i>Poverty Line</i> (Rp/kap/bulan Rp/cap/month) | Penduduk Miskin <i>Poor People</i> | | Garis Kemiskinan <i>Poverty Line</i> (Rp/kap/bulan Rp/cap/month) | Penduduk Miskin <i>Poor People</i> | |
| | | Jumlah Total (000) | % | | Jumlah Total (000) | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Kulonprogo | 250 854 | 93,2 | 23,31 | 259 945 | 86,5 | 21,39 |
| 2. Bantul | 277 792 | 154,2 | 16,97 | 292 639 | 156,6 | 16,48 |
| 3. Gunung Kidul | 228 745 | 157,8 | 22,71 | 238 056 | 152,4 | 21,70 |
| 4. Sleman | 281 644 | 118,2 | 10,44 | 297 170 | 110,8 | 9,68 |
| 5. Yogyakarta | 333 232 | 37,4 | 9,38 | 353 602 | 35,6 | 8,82 |
| DIY | 270 110 | 565,7 | 15,88 | 303 843 | 541,9 | 15,03 |

Sumber: Propinsi DIY Dalam Angka 2014.

Jika dikonversi ke dalam angka, persentase kemiskinan ini masih tinggi, mencapai kurang lebih 35.600 warga. Tentu saja ini bukan jumlah yang sedikit. Ini memerlukan langkah-langkah yang strategis dalam penanggulangannya.

Tabel 3.4 berbicara lebih detail tentang perkembangan indeks kemiskinan Kota Yogyakarta dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Propinsi DIY. Tabel 3.4 menunjukkankecondongan penurunan presentase kemiskinan Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun.

Tabel 3. 4
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keperahan
Kemiskinan di Kota/Kabupaten di Propinsi DIY dari tahun
2009-2013

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keperahan Kemiskinan (P2) di DIY menurut Wilayah

| Kab./Kota | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | |
|------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | JK (Rp) | IK (%) | IK (%) | JK (Rp) | IK (%) | IK (%) | JK (Rp) | IK (%) | IK (%) | JK (Rp) | IK (%) | IK (%) | JK (Rp) | IK (%) | IK (%) |
| Kabupaten | 205.545 | 89,8 | 24,83 | 221.059 | 90,9 | 23,15 | 240.301 | 92,8 | 23,62 | 256.576 | 93,2 | 23,31 | 239.945 | 86,3 | 14,39 |
| Bantul | 224.275 | 100,5 | 17,54 | 241.420 | 146,9 | 16,09 | 264.556 | 190,4 | 17,28 | 288.923 | 194,2 | 16,07 | 292.639 | 176,6 | 16,89 |
| Gemuruh | 186.232 | 163,7 | 24,44 | 181.879 | 140,7 | 22,05 | 220.479 | 157,1 | 21,03 | 238.838 | 157,9 | 22,71 | 238.056 | 132,2 | 21,74 |
| Sleman | 226.256 | 117,3 | 11,45 | 267.680 | 117,9 | 10,7 | 287.107 | 117,3 | 10,61 | 288.040 | 118,2 | 10,44 | 297.370 | 110,8 | 9,48 |
| Yogyakarta | 205.110 | 83,3 | 10,05 | 290.286 | 37,8 | 9,75 | 314.333 | 37,7 | 9,62 | 340.324 | 37,4 | 9,38 | 355.602 | 35,5 | 8,82 |
| DIY | 201.130 | 115,9 | 15,85 | 235.776 | 104,1 | 15,61 | 257.300 | 104,3 | 15,4 | 273.110 | 105,7 | 15,18 | 278.143 | 101,9 | 15,03 |

Sumber: Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2014.

Dari tabel di atas, bisa kita ketahui bahwa persentase kemiskinan terus mengalami penurunan. Rerata tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta mendekati separuh tingkat kemiskinan di Propinsi DIY yang mencapai 15,03 persen. Angka ini tidak bisa dikatakan menggembirakan. Selama kemiskinan itu ada, upaya pencegahannya tidak boleh berhenti. Penurunan tingkat kemiskinan mesti diupayakan secara terus-menerus guna mendukung penurunan tingkat kemiskinan di level propinsi dan level nasional.

Tingkat kemiskinan ini ternyata secara langsung berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tentu saja ada banyak faktor lain yang turut berpengaruh dalam penentuan Indeks Pembangunan Manusia, tetapi, bagaimanapun, angka kemiskinan yang rendah sangat signifikan di dalam menentukan tingkat IPM. Tabel 3.5 memperlihatkan IPM Kota Yogyakarta dibandingkan dengan kota/kabupaten di Propinsi DIY.

Tabel 3. 5

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta
dibandingkan dengan Kota/Kabupaten Lain di Propinsi DIY
tahun 2012-2013**

| Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i> | Harapan Hidup <i>Life Expectancy (th/year)</i> | Angka Melek Huruf <i>Literacy Rate (%)</i> | Rata-rata Lama Sekolah <i>Mean Year Of Schooling (th/year)</i> | Pengeluaran Riil per kapita yg disesuaikan Purchasing Power Parity (000 Rp) | IPM HDI | Peringkat IPM HDI Rank |
|---------------------------------------|--|---|---|--|--------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Kulonprogo | 75,03 | 93,13 | 8,37 | 635,96 | 75,95 | 4 |
| 2. Bantul | 71,62 | 92,81 | 9,02 | 656,07 | 76,01 | 3 |
| 3. Gunungkidul | 71,36 | 85,22 | 7,79 | 643,88 | 71,64 | 5 |
| 4. Sleman | 75,79 | 95,11 | 10,55 | 656,00 | 79,97 | 2 |
| 5. Yogyakarta | 73,71 | 98,43 | 11,56 | 658,76 | 80,51 | 1 |
| DIY | 73,62 | 92,86 | 9,33 | 656,19 | 77,37 | 2 |

Sumber: Propinsi DIY Dalam Angka 2014

Dari tabel 3. 5 dapat kita lihat Kota Yogyakarta memiliki IPM paling tinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Propinsi DIY dengan skor rata-rata 80,51. Kecuali dalam hal Angka Harapan Hidup, Kota Yogyakarta memiliki indeks paling tinggi dalam hal aspek pembentuk indeks IPM, yang terdiri dari dari Angka Melek Huruf (*Literacy Rate*), Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli (*Purchasing Power*).

Lalu, bagaimana kondisi demografis dan *setting* sosial Kota Yogyakarta ini turut berkontribusi membentuk relasi gender, kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan di Kota Yogyakarta. Apakah ada hubungan langsung atau tidak? Tentu saja, kompleksitas sosial Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kondisi dan situasi perempuan. Namun, untuk menjawab ini secara

lebih detail diperlukan penelitian yang sangat mendalam. Tapi sebagai informasi awal, kita bisa menilik sekilas kondisi dan situasi perempuan di Kota Yogyakarta dari berbagai data statistik yang disediakan oleh instansi-instansi terkait.

Setelah memaparkan kondisi demografi dan kondisi sosial Kota Yogyakarta, bagian selanjutnya akan memaparkan kondisi dan situasi perempuan di Kota Yogyakarta secara ringkas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai gambaran awal kesetaraan gender di Kota Yogyakarta.

3. 3. Analisis Situasi Kesetaraan Gender di Kota Yogyakarta

Ada lima aspek yang akan ditelisik dalam bagian ini. Kelima aspek tersebut adalah politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga bagi kaum perempuan. Cakupan aspek ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kebutuhan strategis maupun praktis kaum perempuan terpenuhi. Aspek strategis adalah aspek yang menghubungkan kaum perempuan dengan akses pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, aspek politik berbicara banyak mengenai kebutuhan strategis kaum perempuan. Aspek praktis adalah aspek yang membantu kaum perempuan untuk memajukan kesejahteraan hidupnya dan untuk bertahan hidup. Aspek ini mencakup aspek ekonomi (pekerjaan dan pendapatan), pendidikan (akses untuk mengenyam pengetahuan di bangku sekolah), kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Pemaparan aspek ini sangat penting guna menjadi informasi awal (*background information*) untuk mengidentifikasi persoalan relasi gender dan kesetaraan gender di Kota Yogyakarta, sebelum lebih jauh menentukan peta potensi pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta. Sebagaimana disebutkan di atas, tentu saja, cakupan aspek mestinya dapat memotret situasi yang lebih lengkap dan detail, bahkan jika diperlukan sampai level mikro di dalam rumah tangga (keluarga), sebagaimana yang digarisbawahi dalam berbagai telisik konsep pemberdayaan perempuan pada umumnya. Hanya saja, dengan keterbatasan data dan sumber daya, cakupan aspek yang ditelisik hanya memotret aspek utama yang dianggap penting yaitu politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi kaum perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

3. 3. 1. Aspek Politik

Dalam aspek politik, Kota Yogyakarta telah mencatatkan prestasi yang cukup baik. Meskipun belum berhasil memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, keterwakilan perempuan di Kota Yogyakarta mencapai 25 persen. Angka ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia. Dari 40 anggota DPRD Kota yang terpilih untuk periode 2014-2019, 10 di antaranya adalah perempuan. Sekadar perbandingan, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2014-2019 sebesar 14 persen (79 orang), sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada periode sebelumnya yang mencapai 17,86 persen (101 orang). Alhasil,

keterwakilan perempuan di Kota Yogyakarta jauh melebihi pencapaian keterwakilan di tingkat nasional.

Dibandingkan dengan periode pemilu 2009-2014, jumlah keterwakilan perempuan mencapai 15 persen (6 orang) dari total 40 kursi yang diperebutkan. Secara keseluruhan, keterwakilan perempuan di Kota Yogyakarta periode 2014-2019 mengalami peningkatan sebesar 10 persen dibandingkan periode sebelumnya. Pencapaian ini juga melebihi Propinsi dimana keterwakilan perempuan DPRD DIY periode 2014-2019 hanya mencapai 12,73 persen (7 orang) dari total 55 anggota parlemen propinsi yang terpilih.

Tabel 3. 6
Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019

| Partai Politik | Total Perolehan Kursi | Jumlah Wakil Perempuan |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Gerindra | 5 | 5 |
| Partai Golkar | 5 | 2 |
| PPP | 4 | 1 |
| PAN | 5 | 1 |
| PDIP | 15 | 1 |
| PKS | 4 | 0 |
| Partai Nasdem | 1 | 0 |
| Partai Demokrat | 1 | 0 |
| Jumlah | 40 | 10 |

Sumber: Disarikan dari berbagai data media dan instansi resmi.

Dari tabel di atas, dapat kita lihat rincian keterwakilan perempuan di Kota Yogyakarta. Partai Gerindra sebanyak 5 orang

dari total 5 kursi yang diperolehnya. Partai Golkar 2 orang dari total 5 kursi yang diperoleh. PPP 1 orang dari total 4 kursi yang diperoleh. PAN 1 orang dari total 5 kursi yang diperoleh. Terakhir, PDIP 1 orang dari total 15 kursi yang diperoleh. PKS yang memperoleh total 4 kursi, serta Partai Nasdem dan Partai Demokrat yang masing-masing memperoleh 1 kursi tidak memiliki wakil perempuan di dalamnya.

Meski belum memenuhi kuota, Kota Yogyakarta memiliki potensi pemenuhan aspek kebutuhan strategis kaum perempuan yang cukup baik. Dengan jumlah keterwakilan yang relatif tinggi dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di tingkat nasional (DPR RI) dan propinsi, secara ideal kaum perempuan di Kota Yogyakarta dapat dikatakan memiliki akses yang lebih luas bagi pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Ini dapat menjadi penopang yang kuat bagi upaya-upaya advokasi-advokasi kebijakan yang sensitif gender di tingkat Kota. Langkah yang diperlukan untuk memaksimalkan potensi politik ini adalah memperkuat simpul-simpul jaringan antara organisasi dan kelompok perempuan di akar rumput, sehingga aspirasi kaum perempuan dapat tersalurkan.

3. 3. 2. Ekonomi

Bagaimanakah kondisi ekonomi, sebagai gambaran mendasar kebutuhan praktis kaum perempuan, menggambarkan kesejahteraan kaum perempuan di Kota Yogyakarta? Dari data statistik dapat kita lihat telah banyak kaum perempuan yang berpartisipasi dalam lingkup pekerjaan di ranah publik. Jumlah angkatan kerja masih jauh di bawah kaum laki-laki, tetapi dari jumlah itu yang terserap ke

dalam pasar tenaga kerja jumlahnya relatif seimbang. Tabel 3. 7 menjelaskan secara lebih detail.

Tabel 3. 7
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin 2013 (jiwa)

| Jenis Kegiatan Utama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah (2013) |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Angkatan Kerja | 111 427 | 97 011 | 208 438 |
| Bekerja | 103 333 | 91 403 | 194 736 |
| Pengangguran | 8 094 | 5 608 | 13 702 |
| Bukan Angkatan Kerja | 44 612 | 72 272 | 116 884 |
| Sekolah | 23 256 | 19 908 | 43 164 |
| Mengurus Rumah Tangga | 11 399 | 45 112 | 56 511 |
| Lainnya | 9 957 | 7 252 | 17 209 |
| Jumlah | 156 039 | 169 283 | 325 322 |

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2015 sebagaimana dalam <http://jogjakota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/3>

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa persentase angkatan kerja laki-laki dan perempuan yang terserap ke dalam pasar tenaga kerja hampir seimbang. Tetapi, jumlah perempuan bukan angkatan kerja yang terserap ke dalam lingkungan pendidikan memperlihatkan ketimpangan yang cukup signifikan. Jumlah bukan angkatan kerja laki-laki hampir separuh dari jumlah bukan angkatan

kerja perempuan. Dari jumlah bukan angkatan kerja laki-laki ini separuhnya tercatat tengah mengenyam pendidikan di sekolah.

Sementara itu, jumlah bukan angkatan kerja perempuan yang hampir dua kali lipat kaum-kaum laki, sekitar seperempatnya saja yang terserap ke dalam lingkungan pendidikan formal (sekolah). Prediksi ke depan, ini akan berkontribusi pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan juga mendominasi ranah domestik (rumah tangga). Tercatat sekira 25 persen rumah tangga di Kota Yogyakarta dikelola oleh laki-laki.

Jumlah pekerja migran di Kota Yogyakarta juga didominasi oleh kaum laki-laki. Sebagaimana dapat kita lihat ditabel 3. 8, pada tahun 2013 jumlah pekerja migran laki-laki dari Kota Yogyakarta adalah 52 orang, sedangkan jumlah pekerja migran kaum perempuan di tahun yang sama adalah 23 orang. Jumlah pekerja migran laki-laki mengalami kenaikan yang signifikan, lebih dari empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yang jumlahnya mencapai 13 orang. Jumlah pekerja migran perempuan mengalami penurunan, dari 31 orang pada tahun 2012 menjadi 23 orang pada tahun 2013. Karena jumlahnya yang sedikit, sektor ini belum secara signifikan berkontribusi bagi peningkatan rerata perekonomian keluarga. Namun demikian, tidak berarti hal ini kemudian dapat diabaikan. Upaya perlindungan bagi para pekerja migran, terlebih para pekerja migran perempuan tetap merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 3. 8
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Kota Yogyakarta
2012-2013

| Tahun | Laki-laki | Perempuan |
|-------|-----------|-----------|
| 2012 | 13 | 31 |
| 2013 | 52 | 23 |

Sumber: Propinsi DIY Dalam Angka 2014

Bagaimana tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan? UMK Kota Yogyakarta tahun 2016 tercatat sebesar Rp.1.452.000,00 naik sebesar 11,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp.1.338.000,00. UMK Kota Yogyakarta merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan UMK kota/kabupaten lain di Propinsi DIY. Secara umum, kaum perempuan telah memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki untuk berpartisipasi di ranah publik. Tetapi, seringkali perempuan ditempatkan sebagai sistem penopang sumber penghasilan keluarga. Perempuan juga lebih banyak terserap di sektor informal dibandingkan dengan laki-laki. Sayangnya, belum ada data statistik yang akurat yang menjelaskan kesenjangan maupun kesetaraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

3. 3. 3. Pendidikan

Aspek pendidikan tidak kalah menarik untuk didiskusikan. Secara umum, akses pendidikan laki-laki dan perempuan di Kota Yogyakarta dapat dikatakan terdistribusi secara merata, terlihat dari selisih persentase yang tidak signifikan. Akan tetapi, penelusuran

terhadap detail data di tiap jenjang pendidikan menyuguhkan data yang menarik. Di tingkatan pendidikan yang semakin tinggi, kaum laki-laki secara umum cukup mendominasi. Di level pendidikan yang lebih rendah, perempuan jauh lebih mendominasi. Hal ini mengindikasikan bahwa terlepas dari atribut kota pendidikan yang disandanginya, Kota Yogyakarta sejatinya masih menghadapi masalah kesetaraan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Tabel 3. 7 menjelaskan perbedaan tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan secara lebih detail.

Tabel 3. 9
Jumlah Penduduk Berumur 10 tahun ke Atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Pada Tahun 2013

| Jenis Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah (2013) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Tidak/Belum Tamat SD | 8.83 | 10.93 | 9.92 |
| SD/MI/Sederajat | 10.62 | 13.79 | 12.26 |
| SLTP/MTs/Sederajat | 16.16 | 17.42 | 16.81 |
| SLTA/MA/Sederajat | 42.63 | 40.39 | 41.47 |
| Diploma I/II | 0.84 | 0.91 | 0.88 |
| Akademi/D-III | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| PT/D-IV/S2/S3 | 16.01 | 11.65 | 13.75 |
| Jumlah | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2015 sebagaimana dalam <http://jogjakota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/5>

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2013 dalam level pendidikan dasar, yang mencakup level Tidak/Belum Tamat SD, SD/MI/Sederajat, dan SLTP/MTs/Sederajat, persentase kaum perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kaum laki-laki. Sementara, kaum laki-laki lebih dominan dalam tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Jumlah kaum perempuan yang Tidak/Belum Tamat SD, misalnya kurang lebih 2 persen lebih tinggi dibandingkan dengan kaum laki-laki. Penduduk yang tamat SD/MI/Sederajat juga 3 persen lebih banyak kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Sementara itu, di level pendidikan menengah pertama, jumlah perempuan lebih banyak kurang lebih 1 persen dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Di level pendidikan menengah atas, laki-laki lebih mendominasi dibandingkan kaum perempuan dengan 2 persen lebih tinggi. Menariknya, untuk jenjang DI/II jumlah kaum perempuan hampir seimbang dengan jumlah kaum laki-laki. Kaum perempuan hanya 0,1 persen lebih tinggi dibandingkan dengan kaum laki-laki. Jumlah keduanya sama persis untuk jenjang pendidikan Akademi/D-III. Tetapi, kesenjangan yang cukup tajam terjadi dalam level pendidikan PT/D-IV/S2/S3. Jumlah kaum laki-laki yang mampu mengenyam pendidikan di level tersebut 5,5 persen lebih besar daripada jumlah kaum perempuan. Ada 16,01 persen laki-laki yang mendapat akses untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dan hanya 11,65 persen perempuan yang dapat mengaksesnya.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa tantangan pemerintah Kota Yogyakarta ke depan adalah mendorong lebih tinggi lagi kesetaraan kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam hal akses

pendidikan di level perguruan tinggi. Kesetaraan gender di bidang pendidikan, khususnya di level perguruan tinggi merupakan salah kunci bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin setara pendidikan kaum laki-laki dan kaum perempuan, semakin luas akses yang terbuka bagi masyarakat, dan semakin setara kesempatan bagi kemajuan kesejahteraan. Bagaimanapun, pendidikan adalah investasi bagi kehidupan di masa yang akan datang.

3. 3. 4. Kesehatan

Selanjutnya, bagaimana aspek kesehatan berbicara mengenai kesehatan perempuan, khususnya sebagai ibu, dan anak/balita? Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan ibu di Kota Yogyakarta jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi kesehatan ibu di kota/kabupaten lain di Propinsi DIY. Jumlah kematian ibu dan jumlah kematian ibu bersalin terendah di Propinsi DIY. Tetapi, jumlah kematian ibu nifas tidak lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Hanya, secara rata-rata, jumlah kematian ibu yang melahirkan di Kota Yogyakarta adalah yang terendah, sebagaimana dapat kita lihat di tabel 3. 10.

Tabel 3. 10**Jumlah Kematian Ibu di Kota/Kabupaten di Propinsi DIY Tahun 2009**

| Kabupaten/ Kota | Kematian Ibu hamil | Kematian Ibu bersalin | Kematian Ibu nifas | Jumlah |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| Kota Yk | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Bantul | 5 | 10 | 4 | 19 |
| Kulonprogo | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Gunungkidul | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Sleman | 1 | 5 | 3 | 9 |
| Jumlah | 7 | 33 | 8 | 48 |

Sumber : Dinas Kesehatan Prov.DIY, 2009

Meski jumlah kematian ibu melahirkan adalah yang terendah di Propinsi DIY, tidak berarti bahwa pekerjaan rumah telah selesai. Jumlah kematian ibu bersalin masih merupakan tugas yang perlu diselesaikan. Pemerintah Kota perlu mendorong deteksi dini kelainan persalinan melalui sosialisasi dan pendidikan kesehatan bagi ibu hamil, juga penguatan fasilitas kesehatan yang mampu memfasilitasi pemberian pertolongan kepada ibu bersalin yang bermasalah. Kematian ibu nifas perlu didorong sampai level nol melalui deteksi dini, sosialisasi dan pendidikan kesehatan ibu nifas, serta penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan guna pemberian pertolongan kepada ibu nifas.

Berbicara mengenai jumlah kematian ibu melahirkan, tentu tidak lengkap tanpa melihat jumlah kematian bayi dan balita. Sebagaimana tabel 3. 11, jumlah lahir mati di Kota Yogyakarta adalah nol persen, terendah dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Propinsi DIY. Tetapi, jumlah bayi yang meninggal ada 15, dan jumlah balita yang meninggal ada 8, sebagaimana dalam tabel.

Tabel 3. 11**Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Propinsi DIY tahun 2009**

| Kab/ Kota | Lahir hidup | Lahir mati | % Lahir mati | Jumlah Bayi mati | Jumlah Balita | Jumlah Balita mati |
|--------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| Kota Yk | 4,872 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 |
| Bantul | 12,003 | 86 | 0.71 | 142 | 57,785 | 11 |
| KP | 6,041 | 15 | 0 | 95 | 27,378 | 14 |
| GK | 8,965 | 43 | 0 | 24 | 34,465 | 3 |
| Sleman | 11,843 | 51 | 0 | 54 | 75,283 | 0 |
| Jumlah | 43,724 | 195 | 0.71 | 330 | 194,911 | 36 |

Sumber : Dinas Kesehatan Prov.DIY, 2009

Sebagaimana jumlah kematian ibu, jumlah bayi/balita yang meninggal ini, meskipun termasuk di antara yang terendah tetap mesti menjadi perhatian bersama. Kematian bayi/balita harus ditekan sedemikian rupa hingga mendekati nol. Akses Jamkesmas dan BPJS dalam hal ini jelas memberikan pengaruh yang besar bagi pemeliharaan kesehatan ibu dan anak. Akses ini mesti diperkuat agar bermanfaat secara maksimal bagi keluarga-keluarga di Kota Yogyakarta. Efektivitas Jamkesmas dan BPJS terhadap berkurangnya jumlah ibu dan bayi/balita meninggal perlu dikaji lebih mendalam.

3. 3. 5. Perlindungan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terakhir, isu yang tidak kalah pelik di Kota Yogyakarta adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari tahun ke tahun, jumlahnya terus menunjukkan peningkatan. Sebagai daerah urban dengan tekanan sosial yang tinggi, kerentanan terhadap KDRT tidak terhindarkan bagi kaum perempuan. Untuk itu, pendampingan secara terus-menerus yang disertai dengan pendidikan nirkekerasan

terhadap anggota keluarga mesti menjadi kebijakan yang terus diupayakan. Tabel 3. 12 menunjukkan kecondongan kenaikan jumlah KDRT di Kota Yogyakarta dari 2012 sampai tahun 2015.

Tabel 3. 12
Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilaporkan 2012-2015

| Tahun | Jumlah | Keterangan |
|-----------------------|--------|---|
| 2012 | 265 | - |
| 2013 | 691 | - |
| 2014 | 600 | 50 diantaranya tercatat dengan korban laki-laki |
| 2015 (hingga Oktober) | 642 | |

Sumber: Disarikan dari berbagai sumber

Tentu saja, angka-angka yang menunjukkan jumlah KDRT ini perlu dibedah lebih lanjut. Angka-angka ini adalah angka yang dilaporkan. Semakin meningkatnya jumlah KDRT yang teridentifikasi, di satu sisi, memang menunjukkan semakin tingginya kesadaran warga masyarakat untuk melaporkan tindakan KDRT, sesuatu yang selama ini dianggap sebagai aib. Tetapi, di sisi lain, perlu dilakukan penelisikan angka-angka riil kejadian KDRT di luar angka yang dilaporkan. Tak kalah penting adalah identifikasi *trend* kenaikan maupun penurunannya dari tahun ke tahun. Jika hal ini bisa dilakukan, upaya pencegahan KDRT melalui pendidikan keluarga dapat lebih diintensifkan dengan sasaran yang lebih jelas. Di sisi lain, efektivitas pendidikan keluarga serta kesadaran akan pentingnya

memelihara kesetaraan di dalam rumah tangga, khususnya antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak, juga bisa jauh lebih mudah terukur. Ke depan, terkait dengan penanganan KDRT di Kota Yogyakarta, penelidikan data ini perlu diprioritaskan.

- ∞ -

BAB 4

BASELINE SURVEY PETA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA YOYAKARTA

Baseline survey merupakan *cross-sectional survey* dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai status situasi tertentu. *Baseline survey* peta pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal peta pemberdayaan perempuan di Kabupaten/Kota Yogyakarta dengan indikator kunci yang ditetapkan. Indikator-indikator kunci yang dikembangkan dalam kuesioner meliputi karakteristik lembaga, fokus program, kelompok sasaran, cakupan, pendekatan yang dilakukan, input bagi Pemerintah Kota terkait program pemberdayaan perempuan dan khususnya bagi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP).

Metode pengumpulan data *baseline survey* ini adalah melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih berdasarkan fokus kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan. *Baseline survey* dilakukan untuk mendapatkan data-data primer yang bersifat kuantitatif. Subyek yang menjadi responden penelitian adalah representasi dari NGO, ormas, universitas (Pusat Studi Gender/Wanita), PKK dan institusi pemerintah yang bergerak dalam aktifitas pemberdayaan perempuan. Sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kuesioner didistribusikan kepada lembaga-lembaga di Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul yang memiliki basis kegiatan pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta. Kuesioner yang

berhasil kembali sebanyak 21 (dua puluh satu) eksemplar atau 70 eksemplar.

Paparan berikut menyajikan temuan *baseline survey* yang telah dilakukan. Didalam deskripsi dan penjelasan dari data kuantitatif tersebut, penulis menambahkan beberapa keterangan yang didasarkan pada hasil wawancara mendalam dengan responden, untuk memperdalam pemahaman. Dengan demikian, hasil wawancara ini tidak menjadi informasi utama, melainkan sebagai pendukung atas data *baseline survey*. Bagian yang didiskusikan dalam bab ini mencakup karakteristik responden, fokus kegiatan pemberdayaan, kelompok sasaran, lingkup wilayah pemberdayaan, pendekatan (strategi), dan masukan yang diberikan kepada KPMP.

4. 1. Karakteristik Responden (Lembaga)

Tabel 4.1 berikut ini menyajikan profil responden dari beberapa aspek meliputi nama, alamat, jenis lembaga, tahun berdiri, sumber daya dan komposisi SDM, serta mitra pendukung lembaga.

Responden penelitian terdiri dari LSM, PKK, Perkumpulan atau Asosiasi, Ormas, Pusat Studi dan Perwakilan Pemerintah. Komposisi responden tergambar dalam Gambar 4.1. Tampak dalam gambar 4.1, responden penelitian didominasi oleh kelompok PKK dan LSM masing-masing sebesar 29 persen, selanjutnya diikuti oleh pemerintah dan pusat studi sebesar 9 persen dan ormas sebanyak 5,5 persen.

Tabel 4.1

Karakteristik Lembaga

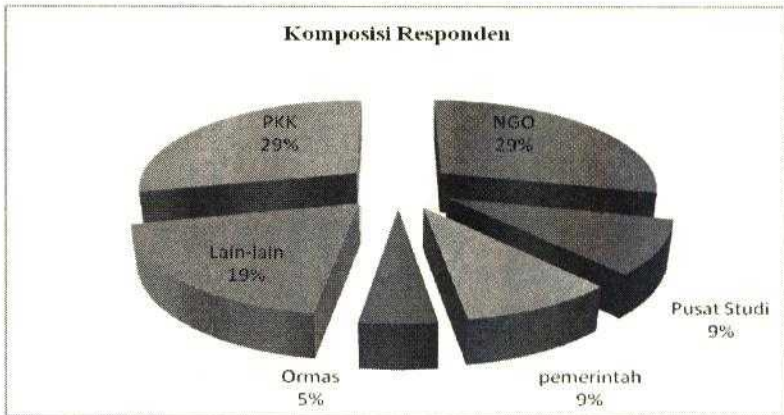
| No | Nama | Alamat | Jenis Lembaga & Tahun Berdiri | Sumber Daya dan Komposisi SDM | Mitra |
|----|----------------------------------|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | Perkumpulan PALUMA Nusantara | Perum Puri Wirokerten Asri Blok A Kav.No2, Kertopaten, Banguntapan Bantul. No Hp 085100173012 | LSM/ Berdiri Tahun 1999 | 6 staf terdiri dari 2 peneliti, 3 pendamping, dan 1 staf administrasi. Seluruh staf berjenis kelamin laki-laki. | Kemendikbud, ICED AUSAID, UN OCHA,UNDP,HIVOS |
| 2 | Yakkum Emergency Unit | Jl.Kaliurang Km 12 Dn Candi, Ngaglik, Sleman 55581 | LSM/Berdiri Tahun 2001 | 32 staf terdiri dari 15 pendamping program dan 15 staf administrasi | Huarriu Commission, HelpAge International, ACT Alliance |
| 3 | Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) | Jl.Puntodewo VII.No.1Jomogatan RT.II,Ngastiharjo,Kasihon, Bantul.Hp 0274375908 | DK NGO/28 September 1982 | 11 staf terdiri dari 10 orang perempuan dan 1 laki-laki. Rasio Perempuan dan laki-laki 10:1 | Aus-Aid Mampu, The Global Fund for Women USA, Mamacash Belanda, |
| 4 | IHAP Hak Azasi Manusia) | Perum Wirosaban Baru No IIA. Telp.0274/384611 | NGO | 12 orang staf terdiri dari 2 peneliti, 4 pendamping dan 6 staf administrasi. Rasio Perempuan dan laki-laki 9:2 | Simavi, Roger, Ford Foundation |
| 5 | Rumpun Njak Dien Tjoet | Warungboto UH IV/974 RT 34/RW.08 Yogyakarta 55164 | NGO/Berdiri Tahun 1985 | 3 orang staf terdiri dari 1 orang pendamping komunitas dan 1 orang pendamping korban. Seluruh staf perempuan | MAMPU |
| 6 | Pusat Pengarusutamaan Gender dan | Gedung LP2M (Gedung Rektorat Lama), Lantai 3, Jl.Marsda Adisutjipto YK | Pusat Studi | 11 staf terdiri dari 5 orang peneliti, 4 pendamping dan 3 orang staf administrasi. | DANIDA (Royal Danish Embassy, ISIA Studi |

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--|-------------------------|--|---|---|
| Hak Anak (P2GHA) | Anak | | | | Rasio staf perempuan dan laki-laki adalah 8: 3 | Indonesia Amerika), Kementerian LN, Konselor Kebudayaan Republik Islam Iran,Australian Institute Partnership for Justice (AIPJ) |
| 7 | Pusat Studi Gender UII | Jl.Kaliurang Km.14,5 Yk | Pusat Studi | | Jumlah Staf 5 orang, terdiri dari 4 peneliti dan 1 staf administrasi. | Badan KBPPA Sleman, KPMP Kota |
| 8 | TP,PKK Kel.Wirobrajan | Jl.Kresna RT.9,Telp.0274-370571/081327666822 | No.1 PKK | | Rasio staf perempuan dan laki-laki 4 : 1 40 orang terdiri dari Ketua, Pengurus, Anggota, Pendamping. | Yogyakarta, DIKTI, Dirjen Paudni, Tifa Foundation, DPPM UII LPMK, UKBM, Satpol PP, LSM, BLH, Dinsos, Dinkes,Aisyiyah |
| 9 | PKK Kelurahan Panembahan | Kelurahan Panembahan. Telp.0274-413839 | PKK | | Rasio perempuan dan laki-laki 70% : 30% | |
| 10 | TP,PKK Kelurahan Mantrijeron | Jl.MantrijeronMj 3/493B.Telp.0274-387182 | PKK | | Staf berjumlah 26 orang, tidak terinci jumlah perempuan dan laki-laki | - |
| 11 | PKK Kel,Notoprajan | Jl.Wahid Hasyim,Kel.Notoprajan, Ngampilan | PKK. Berdiri tahun 1978 | | Staf berjumlah 32 orang, tidak terinci jumlah perempuan dan laki-laki | LPMK, BKM, Instansi terkait |
| 12 | TP PKK Kota Yogyakarta | Komplek Balaikota YK | PKK | | Staf berjumlah 32 orang, tidak terinci jumlah perempuan dan laki-laki | LPMK, BKM |
| 13 | TP,PKK Kelurahan | Kantor Sosromenduran | PKK | | Staf berjumlah 38 orang, Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan adalah 1:37 | KPMP, CSR beberapa perusahaan |
| | | | | | Staf berjumlah 29 orang, Perbandingan jumlah laki- | - |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|---------------|--|--|--|-------------------------|
| | Sosromenduran | | | | | laki dan perempuan adalah 1:28 | | |
| 14 | Asosiasi Olahhan Kota Yogyakarta | Jl. Rotowijayan, Kraton, Yk | Asosiasi | | | Seluruh staf perempuan adalah staf perempuan | Lembaga Mikro dan Agribisnis (LKMA) Madani Yogyakarta | Keuangan Sukses Kembang |
| 15 | Yayasan Sawo Kembang | Jl. Dr. Wahidin Husodo No. 3813 | Sudiro | Sosial Gereja | | Rasio staf perempuan dan laki-laki adalah 2 : 1 | PT. Sawo Galevia | Kembang |
| 16 | Narasita | Jl. Patchan Lor Yogyakarta. Berdiri tahun 2009 | 2B | Perkumpulan | | Jumlah staf 6 orang terdiri dari 1, peneliti, 5 pendamping dan 1 orang administrasi. Seluruh staf berjenis kelamin perempuan | Global Fund for Women, Kementerian pendidikan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY | |
| 17 | Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sukses Madani Muslimat NU | Jl. Tegal Turi No 46 Yogyakarta | 46 | LKM | | Jumlah staf sebanyak 7 orang dan semuanya adalah perempuan | - | |
| 18 | Dinaskertranso s KPMP | PP. Nurul Ummah Putri Prenggan Kotagede, Yk Telp. 08562891444 Kompleks Timoho | Putri Ormas | | | Seluruh staf perempuan | Pesantren, Ormas NU | Kemenag, |
| 19 | | Balai kota Timoho | Balai kota | Pemerintah | | - | APBD | |
| 20 | | Kompicks Timoho | Balai kota | Pemerintah | | - | APBD | |

Sumber: Data Primer 2015

Grafik 4.1
Komposisi Responden Penelitian



Sumber: Data Primer diolah kembali 2015

Jika diamati dari alamat lembaga, tidak seluruh lembaga memiliki kantor sekretariat di Kota Yogyakarta seperti Paluma Nusantara, Yasanti, dan Yakkum beralamat di Kabupaten Bantul dan Sleman, namun mayoritas lembaga berlokasi di Kota Yogyakarta. Terdapat beberapa lembaga yang sudah cukup lama bergerak di isu perempuan, Yayasan Anisa Swasti dan Rumpun Tjoet Nyak Dien misalnya telah lebih dari tiga puluh tahun mengkaji isu perempuan di Yogyakarta.

Pengurus lembaga sebagian besar adalah perempuan, bahkan beberapa lembaga seperti Asosiasi Olahhan Kota Yogyakarta, Narasita, Lembaga Keuangan Mikro Madani dan Muslimat NU seluruhnya perempuan. Mitra pendukung program kerja LSM sebagian besar adalah lembaga donor internasional seperti ICED AUSAID, UN OCHA, UNDP, HIVOS, Huarriu Commission, HelpAge International, ACT Alliance, Global Fund for Women, Aus-Aid Mampu, Simavi, Roger, Ford Foundation, The Global Fund for Women USA, dan Mamacash

Belanda. Situasi yang sama juga terjadi pada lembaga level universitas, Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA) UIN Sunan Kalijaga selama ini bermitra dengan DANIDA (Royal Danish Embassy, ISIA (Institut Studi Indonesia Amerika), Kementrian LN, Konselor Kebudayaan Republik Islam Iran, dan Australian Institute Partnership for Justice (AIPJ). Sedangkan PSG UII memiliki rekanan mitra dari unsur pemerintah, donor internasional, dan internal kampus.

Lembaga yang berbentuk asosiasi, perkumpulan, lembaga keagamaan, dan ormas umumnya disokong oleh lembaga yang menjadi afiliasinya. Muslimat NU bekerjasama dengan ormas NU dan pesantren, sedangkan Yayasan Sawo Kembar yang merupakan gerakan sosial gereja bermitra dengan PT. Sawo Kembar Galevia. Sementara itu kelompok PKK umumnya menjadi mitra dari lembaga pemerintah seperti Satpol PP, Dinsos, dan Dinkes meski beberapa diantaranya juga menjalin kerjasama dengan lembaga non-pemerintah misalnya CSR perusahaan, LSM dan LKM (Lembaga Keuangan Mikro).

4. 2. Fokus Program

Subyek penelitian memiliki bidang fokus yang menjadi kegiatan utama di masing-masing lembaga, diantaranya adalah program pemberdayaan politik, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan keagamaan. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi paling banyak menjadi fokus garapan dari responden penelitian. Tercatat hanya empat lembaga yang tidak bersentuhan dengan isu tersebut yakni IHAP, Narasita, P2GHA, dan Rumpun Tjoet Nyak Dien.

Detail bidang garapan tiap lembaga terangkum dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Bidang Garapan Responden Penelitian

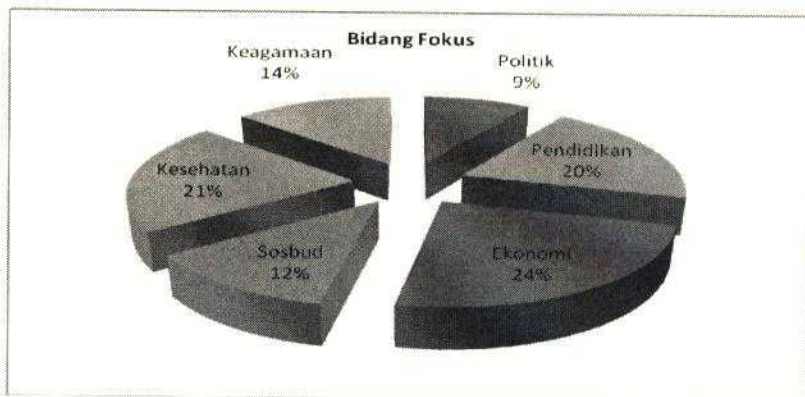
| No | Nama | Jenis Lembaga | Bidang Garapan | | | | | Total Bidang |
|----|--------------------------------------|---------------|----------------|------------|---------|--------|-----------|--------------|
| | | | Politik | Pendidikan | Ekonomi | Sosbud | kesehatan | |
| 1 | Paluma Nusantara | NGO | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
| 2 | Yakum | NGO | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | IHAP | NGO | | 1 | | | 1 | 2 |
| 4 | YASANTI Rumpun Tjoet Nyak | NGO | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Dien | NGO | 1 | | | | | 2 |
| 6 | Rifka Anisa P2GHA UIN Sunan Kalijaga | NGO | | | | | 1 | 1 |
| 7 | | Pusat Studi | | | | | 1 | 2 |
| 8 | PSG UII | Pusat Studi | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| 9 | Dinsosnakertrans | Pemerintah | | | | | 1 | 1 |
| 10 | KPMP | Pemerintah | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------|---|----|----|---|----|---|---|
| 11 | Muslimat NU | Ormas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | Asosiasi Olahhan Kota | | | | | | | | |
| 12 | YK | Asosiasi | | 1 | | | | | 1 |
| | Yayasan Sawo | | | | | | | | |
| 13 | Kembar | Sosial Gereja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Narasita | Perkumpulan | 1 | | | | | | 1 |
| | Lembaga Keuangan | | | | | | | | |
| | Mikro dan Agribisnis | | | | | | | | |
| | (LKMA) Sukses | | | | | | | | |
| 15 | Madani | LKM | | 1 | | | | | 1 |
| | Tp.PKK Kelurahan | | | | | | | | |
| 16 | Sosromenduran | PKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Tp.PKK Kota | | | | | | | | |
| 17 | Yogyakarta | PKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | PKK kel.Notoprajan | PKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | Tp.PKK Kelurahan | | | | | | | | |
| 19 | Mantrijeron | PKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | PKK Panembahan | PKK | | 1 | | | | 1 | 2 |
| | Tp.PKK | | | | | | | | |
| 21 | Kel.Wirobrajan | PKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| | Total | | 6 | 13 | 16 | 8 | 14 | 9 | |

Sumber: Data primer 2015 diolah kembali

Persentase selengkapnya dapat diamati dalam gambar dibawah ini.

Grafik 4.2
Bidang Fokus



Sumber: Data primer 2015 diolah kembali

Paluma Nusantara, misalnya, fokus pada pendampingan usaha kecil. Beberapa area kerjanya adalah Imogiri, Banguntapan, Janitan, dan Pleret untuk wilayah Bantul, dan kampung di sepanjang Kali Code untuk wilayah Kota Yogyakarta. Dalam pendampingan kegiatan usaha kecil ini, Paluma Nusantara melibatkan suami, agar partisipasi istri dalam kegiatan juga merupakan kesepakatan bersama, tidak sepihak dari sisi istri. Hal ini dikarenakan pendampingan yang dilakukan melibatkan hutang piutang dalam menjalankan usaha. Meskipun risikonya istri menjadi tidak independen, keterlibatan suami diharapkan berdampak positif karena akan meminimalkan risiko konflik internal keluarga di masa depan.

Terkait ini, informan menjelaskan sebagai berikut:

"...[N]ah itu, nah kita ya untuk itu tadi, biar hutang itu, suami juga tahu. itu sebenarnya kita juga. jadi ketika mereka mengajukan, harus ada tanda tangan suami. jadi biar suami itu juga tahu. Nanti ini tidak jadi beban bagi perempuan sendiri. Tapi itu juga dilema ketika misalnya, suaminya tidak mengizinkan padahal ini melihatnyakanwes karo hutang dinggo opo? Padahal kita itu, microfindingnya itu untuk usaha. untuk pengembangan usaha, tapi yo ada sing bojone, wes pokokmen rausah hutang, seperti itu. Keukeuh disitu tapi tidak tahu bahwa peruntukan hutang ini untuk apa. jadi ya itu, persetujuan suami ya memang. kita melihatnya biar beban hutang itu, tidak dimiliki oleh perempuan sendiri. tapi juga dilemanya, berarti ini, perempuan tidak bisa mengambil keputusan sendiri."

Selain pendampingan usaha kecil, Paluma Nusantara juga melakukan pendampingan terhadap petani dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah. Sebagaimana informan menjelaskan lebih lanjut,

"Kalau dari (kerjasama dengan) pemerintah, contohnya kita kerja sama dengan DPPM itu, kita kan mendampingi buruh tani perempuan, nah itu mereka juga kekurangan untuk sumber daya manusianya, jadi terlalu banyak program, apalagi di tingkat provinsi. Terlalu banyak program yang harus dicapai. Misalnya, desa prima sudah ada 50 (desa)."

Seperti Paluma Nusantara, Yasanti juga melakukan pendampingan terhadap pengangguran perempuan melalui Paperja (Paguyuban Perempuan Pekerja). Anggota-anggotanya adalah perempuan lulusan SMP dan SMA yang tidak terserap ke dalam pasar tenaga kerja. Informan dari Yasanti menjelaskan,

"PAPERJA, Paguyuban Perempuan Pekerja, itu hampir semua adalah orang kota, itu berasal dari dulu sekitar tahun 90-an awal, mereka lulusan SMA. Jadi setelah lulus SMA SMP tapi nganggur, nggak sempat, nggak bisa lanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya. Sehingga Yasanti menemani mereka. Memang awalnya dari men-support penguatan ekonomi dan membangun biar mereka ada kelompok untuk berbagi cerita dan diskusi, kemudian menysar pengangguran perempuan. Akhirnya teman-teman itu sekarang kemudian berkembang dan punya usaha kecil-kecilan di rumahnya."

Ia menambahkan, cara pengelolaan usaha dalam kelompok ini sangat efektif dalam menguatkan solidaritas perempuan. Ia menambahkan,

"Jadi sampai sekarang ada pertemuan rutin per bulan dan di situ mereka berbicara tentang yang pasti penguatan ekonomi simpan pinjam arisan, jadi bisa mengatasi persoalan-persoalan ekonomi di keluarga, bayar sekolah anak, bahkan kehidupan sehari mereka bisa pinjam di kelompoknya dan bisa men-support usaha-usaha yang dibangun. Paling banyak emping, jahit, jadi ada yang jahit baju sekolah nanti temen-temennya anak sekolah beli di sini, jadi kayak gitu sistemnya. Kalau kami bilang tu SSE, Sosial Solidarity Ekonomi. Jadi dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Harganya disepakati bareng, kalau ada untung bisa masuk kas kelompok. Kas kelompok itu nanti kan untuk pinjam dan untuk dikelola kas usaha kelompok. Dan kalau ada pembagian setahun sekali keuntungan usaha simpan pinjam bersama. Kita bisa pinjam, mereka bisa beli, mereka bisa jual, belajar untuk manajemen usahanya. Penguatannya ada di sini semua."

Wilayah garapan terbesar berikutnya adalah pada bidang kesehatan dan pendidikan. Secara mayoritas lembaga yang bergerak di area ini adalah NGO dan PKK, masing-masing 21% dan 20%. Selain

kegiatan Posyandu yang rutin melalui PKK, kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan adalah penyediaan makanan bergizi, pemeliharaan kebersihan, waspada HIV/AIDS.

Aisiyah, misalnya, bergerak pada penyuluhan tentang makanan bergizi di kalangan anggota-anggotanya dan pemeliharaan kesehatan lansia. Informan dari Aisiyah menjelaskan program lembaganya,

“Kalau yang kesehatan itu di (pengurus tingkat) ranting itu selain ada pertemuan dengan ibu-ibu muda, ada juga penyuluhan tentang kesehatan. Tapi ini antar majelis. Jadi 3 atau lebih majelis itu berkumpul menjadi satu. Nanti di sana ada kesehatan, pendidikan, nanti bagaimana cara untuk memberikan makanan bergizi. Kalau itu kan materi ya, programnya pertemuan bersama sebulan sekali. Ada yang sebulan sekali, ada yang dua minggu sekali, terus ada yang digabung dengan lansia. Jadi sudah all outsih untuk garapan ibu-ibu itu. Cuma ya kendalanya kalau pas pertemuan besar per tiga bulan itu dananya ya dari saku masing-masing.”

Paluma Nusantara juga fokus pada isu kebersihan lingkungan. Salah satu kegiatannya adalah mendorong pedagang makanan kaki lima di kawasan Malioboro untuk tidak membuang sampah di saluran air. Informan dari Paluma Nusantara menuturkan,

“Kemarin kan kita juga masuk ke lesehan Malioboro itu, ya di BLH itu kan memang kita disana itu saluran limbahnya itu sering mampet kerena mereka membuang disitu, dan kalau kita bongkar itu, dananya banyak, bisa milyaran itu, nah terus makanya ini penyadaran, agar ini tidak dibuang kesaluran itu dan saluran tidak terganggu, nanti bisa dikumpulkan, nanti kita beli kan bisa jadi tambahan.”

Yasanti fokus pada isu kesehatan di kalangan buruh gendong di pasar-pasar tradisional di wilayah Kota Yogyakarta, seperti Pasar Kranggan, Pasar Beringharjo dan Pasar Giwangan. Yang menjadi perhatian Yasanti adalah, meski sebagian besar buruh gendong itu berasal dari luar wilayah kota Yogyakarta, antara lain berasal dari Sleman, Bantul, bahkan hingga Klaten, hak mereka untuk menerima fasilitas kesehatan juga tetap perlu dipertimbangkan, mengingat lokus kerja mereka yang mencakup wilayah kota. Jangan sampai, hanya karena secara administratif mereka tercatat sebagai penduduk di luar wilayah kota Yogyakarta, lalu hak-hak kesehatan mereka terabaikan. Tidak hanya mengadvokasi, Yasanti juga mengupayakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi buruh gendong pasar tradisional sekali dalam sebulan.

Isu lain dalam pendampingan kesehatan adalah waspada risiko HIV/AIDS sebagaimana yang dilakukan oleh Yasanti. Informan menjelaskan,

“Nah selain itu sebulan sekali ada di Yasanti pertemuannya. Selain itu ada pendidikan kritisnya. Tapi berdasar kebutuhan mereka, bukan dari Yasanti. Misal mereka butuh pengetahuan tentang kesehatan terutama kesehatan reproduksi perempuan. Ya mencegah AIDS, alat reproduksi kita sangat rentan oleh itu, terus kesehatan umum lainnya.”

Bidang lain yang menjadi fokus kegiatan lembaga pemberdayaan perempuan adalah politik. Lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan politik terhitung minim dibanding bidang lainnya, hanya 9 persen. Termasuk di dalamnya adalah Paluma, Rumpun Tjoet Dien, Narasita, PSG UII, Yasanti dan Tim Penggerak PKK Kelurahan Mantriyeon. Meski menjadi salah satu fokus kajiannya, dalam beberapa hal, politik tidak menjadi isu utama.

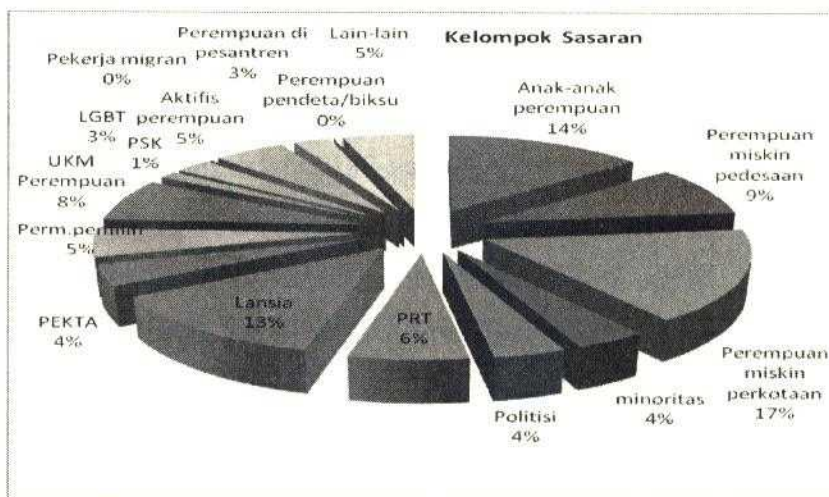
Yasanti, misalnya, menyorot isu politik hanya dalam konteks tertentu. Sebagian besar fokusnya adalah pada pendampingan usaha kecil dan pengangguran perempuan. Informan dari Yasanti menjelaskan, pendidikan politik ini hanya berdasarkan permintaan mitra kegiatan pemberdayaan mereka. Menurutnya,

“Terus tentang pendidikan kesadaran gender, hak politik juga, pokoknya hal-hal di luar tadi, mereka butuh apa, Yasanti *support*.”

4. 3. Kelompok Sasaran

Survey ini juga mengungkap keragaman kelompok sasaran program pemberdayaan perempuan yang dimotori oleh lembaga-lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan di Kota Yogyakarta. Persentase kelompok sasaran secara lebih detail digambarkan dalam gambar 4.3 berikut.

Grafik 4.3
Kelompok Sasaran



Sumber : Data Primer diolah kembali, 2015

Kelompok sasaran mencakup anak-anak perempuan, perempuan miskin pedesaan, perempuan miskin perkotaan dan pedesaan, kelompok minoritas, perempuan pemimpin/birokrat /politisi DPR/DPRD, perempuan pekerja rumah tangga, lansia perempuan, perempuan kepala rumah tangga, pemilih perempuan (pemilu), perempuan pelaku usaha kecil, perempuan pekerja seks komersial, transgender dan kelompok LGBT, perempuan pekerja imigran, perempuan pekerja migran, perempuan aktivis komunitas, perempuan pesantren, dan pendeta perempuan.

Dari gambar 4.3, dapat kita lihat bahwa program kegiatan yang menysasar kelompok perempuan miskin perkotaan tampak paling besar (17%), setidaknya terdapat 13 lembaga yang berfokus pada isu tersebut, sebagian besar dilakukan oleh Tim Penggerak PKK (TP PKK). Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan usaha produktif untuk meningkatkan kemandirian perempuan, program pemberdayaan ekonomi, pinjaman modal melalui UP2K, pinjaman berbunga ringan, dan pelatihan keterampilan (membuat hantaran, makanan ringan, membatik dll).

Lansia dan anak perempuan juga menjadi isu prioritas bagi sebagian lembaga dengan persentase masing-masing sebesar 14% dan 13%. NGO dan Tim Penggerak PKK adalah dua lembaga yang paling banyak memiliki program pemberdayaan lansia perempuan. Kegiatan yang pernah dilakukan antara lain pelatihan mata pencaharian (*livelihood*), penguatan ekonomi, lansia produktif, kesehatan lansia, pelatihan hidroponik, sekolah feminis dan penguatan dalam kelompok buruh gendong. Temuan menarik dalam survey ini adalah program sekolah kepemimpinan buruh gendong yang dilakukan oleh Yasanti. Lembaga ini membidik segmen yang

selama ini relatif jarang tersentuh program-program pemberdayaan. Kegiatan ini bertujuan agar komunitas perempuan buruh gendong mampu menggunakan kapasitas kepemimpinan dalam dirinya, kelompoknya, dan berkoalisi atau berjejaring dengan lembaga lokal, nasional bahkan regional (sesuai isu spesifik buruh gendong) untuk mengembangkan gerakan sosial yang kuat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang membatasi atau menghambat sumber mata pencaharian buruh gendong.

Isu perempuan dan anak perempuan juga menjadi perhatian besar dari banyak lembaga di Yogyakarta. Dari 21 lembaga yang di survey 11 diantaranya berfokus pada entitas ini, terutama TP PKK dan NGO. Dari kalangan NGO, proyek dengan sasaran perempuan dan anak perempuan mencakup kegiatan program beasiswa untuk anak perempuan berprestasi dari keluarga kurang mampu, dan sekolah siaga bencana. Sekolah siaga bencana melatih kepekaan para siswa terhadap kejadian bencana sehingga mitigasi dan persiapan jauh lebih mumpuni. Sedangkan dari ormas (Muslimat NU) target pelibatan anak perempuan terwadahi dalam kegiatan PAUD, TK dan pesantren.

Serupa dengan ormas, TP PKK juga menggarap segmen anak perempuan melalui kegiatan PAUD. Selain itu kelompok ini juga menangani kegiatan Posyandu di wilayah masing-masing meski peruntukannya tidak dikhususkan untuk anak perempuan. Ada juga beberapa TP PKK yang bergerak pada isu kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba pada anak. Menurut beberapa responden, isu ini telah cukup mengkhawatirkan masyarakat. Salah seorang pegiat PKK dari Kecamatan Wirobrajan menuturkan,

“Wah prihatin sekali sekarang untuk anak usia SD kelas 1 sampai 18 tahun itu rawan sekali. Yang ada

disekitar lingkungan saja, tetangga, 6 tahun memperkosa. Ngeri sekali mbak. Pengantar jemput sekolah. Anak *nggak* tahu. Ada ibu-ibu memperkosa anaknya sendiri, sekarang *kan* pintunya, setiap ada apa-apa, ini dari rumah tangga *aja*. Saya dulu saya masih awam sekali. Ini sudah sebelas tahun 9 tahun melihat perbuatan orangtuanya. Kadang-kadang anak sudah sekali itu pengen lagi terus kecanduan mbak. Kami mau memberi bekal kepada anak-anak yang perempuan itu yang kena sasaran bisa melawan. Itu satu-satunya jalan, kita mau membunuh mereka yang berbuat *nggak* bisa. Anak harus bisa melawan. Kalau sama orang lain bagaimana. Ada yang masuk ke kamar mandi *ditututi* dan disodomi. Biar anak-anak diberi kekuatan melawan.”

Untuk mengatasi itu, TP PKK Wirobrajan menggiatkan kegiatan Posyandu bagi remaja perempuan. Kegiatan yang dicakup adalah kesenian. Menurutny,

“Kalau sebagai perempuan kami perhatian sekali, saya terus terang ada Posyandu remaja. Untuk yang sudah 12 – 18 tahun. Diisi tarian, kesenian, soalnya ini orang tua sekarang sering meninggalkan anak, kerja semuanya, kita dituntun dan kalau tidak kerja ya sayang, tapi anak kalau *nggak* diperhatikan pulang sekolah ditanya nanti anak curhat ke orang lain yang remaja ke temennya gosip. Jadi sekarang rawan sekali. Digencarkan PKK Kota memerangi kekerasan seksual pada anak.”

Ia melanjutkan,

“Yang kedua merokok ini pintu gerbangnya narkoba. Jadi kalau anak biasa merokok, lama-lama ada minuman enak, ah narkoba. Rokok itu sebenarnya, besok pagi saya ke kota dipandu walikota bebas asap roko. Sebatas dirumah bebas asap rokok *nggak* masalah, justru dirumah yang merokok itu dibawa. Kalau sudah narkoba, nanti pasti perokok. Asap rokok kalau didalam rumah *nggak* boleh, kalau diluar rumah ya silahkan *nggak* bisa memaksa. Seperti saya

ini yang jualan rokok dan laris, saya nggak bisa melarang. Sebelah ada jualan nasi, otomatis. Pokoknya tempat saya nggak ada asap rokok. Kita kalau mau melarang sekali juga nggak bisa. Seksual anak. Narkoba, rokok. Jumat pagi ada pengarahan mengenai masalah sanitasi kota berbasis masyarakat.”

Perempuan miskin dan pelaku UKM perempuan menjadi isu penting berikutnya. Setidaknya terdapat tujuh lembaga dengan target sasaran perempuan miskin pedesaan, mayoritas dilakukan oleh kalangan NGO. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui program UMMI dan BangkitUMMI, advokasi, kampanye, siaran radio, publikasi media, pendampingan dan konseling, sekolah feminis, dan CRF (kelompok ketangguhan perempuan berbasis akar rumput di wilayah rawan bencana). Sementara itu lembaga yang *concern* terhadap perempuan pengusaha mikro relatif beragam mulai dari NGO, Pusat Studi, PKK, ormas, perkumpulan dan asosiasi gereja. Jenis kegiatannya yaitu PSM Livelihood, Program Peningkatan Kecakapan Hidup (PKH), pelatihan peningkatan ekonomi, dan PI2KM (Persatuan Ibu-Ibu Kawasan Malioboro).

Target sasaran lain seperti perempuan pemilih, politik perempuan, PSK, PRT, kelompok minoritas, perempuan aktifis, PEKTA (Perempuan Kepala Rumah Tangga) hanya digarap oleh lembaga-lembaga tertentu yang memang secara khusus menangani isu tersebut. Misalnya pemberdayaan politik dengan sasaran politik perempuan pemilih secara konsisten dilakukan oleh Narasita. PSG UII juga melakukan aksi serupa namun hanya dilakukan menjelang momentum hajatan demokrasi (pemilu).

Pemberdayaan untuk perempuan kepala rumah tangga dilakukan oleh tiga lembaga yakni Yayasan Sawo Kembar, Lembaga

Keuangan Mikro dan Agribisnis, dan TP PKK Kota Yogyakarta. Bentuk kegiatan yang dilakukan mencakup pemberian pinjaman berbunga lunak, peningkatan ketrampilan ekonomi berupa pelatihan pembuatan *snack*, dan kebun hidroponik.

Kegiatan dengan sasaran aktifis perempuan diinisiasi oleh tiga lembaga terdiri dari P2GHA UIN Sunan Kalijaga, Narasita, dan Yayanti melalui program penguatan jejaring, sekolah gender, *capacity building*, kepemimpinan feminis, publikasi jurnal Islam dan Gender, Training of The Trainer, seminar nasional dan internasional.

Satu-satunya lembaga yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan PSK adalah TP PKK Kelurahan Sosromenduran. Kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan HIV Aids dan pembinaan keagamaan. Sementara itu untuk kegiatan dengan target kelompok LGBT hanya dilakukan oleh IHAP dan Dinas sosial dan ketenagakerjaan. Sayangnya tidak dijelaskan secara terperinci program pemberdayaan yang pernah dikerjakan. Di luar itu terdapat beberapa lembaga yang juga membidik sasaran dari kelompok remaja perempuan, hakim perempuan dan perempuan pengurus partai.

Sebagai tambahan, kelompok sasaran lain yang belum tercakup dalam survey adalah keluarga. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nasyiatul Aisyiah, yang merupakan sayap organisasi perempuan di Muhammadiyah. Selain memberikan perhatian pada pemberdayaan ekonomi keluarga dan isu kesehatan dan gizi, Aisyiah juga menaruh perhatian penting pada pendidikan keluarga. Seorang informan di Aisyiah menegaskan, penekanan pendidikan di keluarga diperlukan karena banyak sekali orangtua yang sudah merasa cukup dengan hanya memberikan pendidikan formal di

sekolah bagi anak-anaknya. Padahal, cakupan pendidikan itu sangat luas. Terkait dengan ini, informan menjelaskan,

“Nah kalau sisi keagamaan kita ini mencerahkan, sekarang kan banyak ibu-ibu, eh bukan hanya ibu-ibu, semuanya, laki-laki dan perempuan sama. Mereka menganggap bahwa pendidikan anak itu tidak penting, oleh karena itu wes anak disekolahkan beres, anak di rumah harus patuh dengan orang tua. Entah di sekolah mau diapakan, ya pokoknya tahunya di rumah harus patuh. Nah itu juga kita pikirkan. Ternyata pendidikan dalam keluarga itu sangat penting, walaupun memang sangat sempit lhawong bapak-ibunya sekarang kalau harus hidup sederhana ya rada susah ya. Anak harus punya gadget yang bagus-bagus, hapenya bisa internetan.”

Ia melanjutkan, faktor orangtua bekerja juga tidak bisa dinafikan,

- “*Nah iya, orangtua kan pasti kerja, anaknya dititipke sopo. Nah daripada dititipin pembantu nanti malah dibawakabur, akhirnya dititipin mbahnya, padahal mbahnya kerjaane nonton sinetron.*”

Sasaran Aisyiyah dalam hal ini utamanya adalah ibu-ibu muda, dengan memanfaatkan waktu luang mereka. Kegiatannya melalui pengajian. Dari pengajian itulah disisipkan pendidikan tentang pola asuh anak. Informan menjelaskan sebagai berikut.

“Kalau Aisyiyah, jadi di kampungkan ada ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru menikah, usia pernikahannya masih setengah tahun, pokoknya masih muda. Terus mereka punya anak yang masih balita diajak bareng-bareng. Pertamanya sih pengajian tapi nanti setelah itu ada kegiatan mereka bagaimana pola asuh si anak. Terus di TK ABA kita arahkan pendidikannya ke ibu-ibu yang nunggu. Kan banyak ibu-ibu itu nunggu, kalau mereka merasa sudah cukup suaminya kan mereka tidak akan kerja, kalaupun kerja, buka warung, jemput anaknya kan

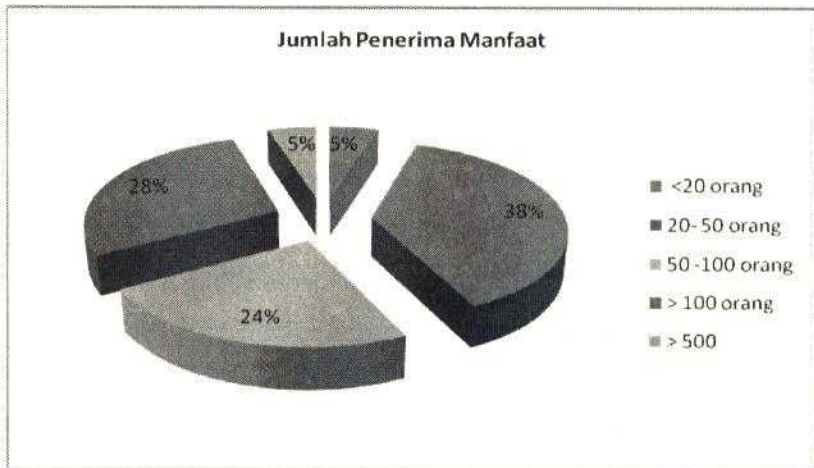
tutup. Biasanya gitu. Kan jemput, nunggu, nah sambil nunggu itu kita masuki, jam berapa ibu-ibu datang itu ada yang ngisi pengajian seperti itu. Jadi di kampung itu kalau dulu namanya RK, Rukun Kampung, kalau dulu. Sekarang gabung ke kelurahan.”

4. 4. Lingkup

Survey ini berusaha mengidentifikasi daya jangkau program pemberdayaan perempuan dari responden yang terpilih menjadi subyek penelitian. Cakupan kegiatan meliputi jumlah penerima manfaat, dan lokasi sasaran baik di dalam kota maupun di luar Yogyakarta.

Gambar 4.4 berikut menyajikan gambaran komposisi penerima manfaat program.

Grafik 4.4
Jumlah Penerima manfaat Program



Sumber : Data Primer diolah kembali, 2015

Sejumlah 8 lembaga (38%) menyatakan penerima manfaat terbesar dari program mereka berada di Kota Yogyakarta dengan melibatkan 20-50 orang perempuan. Sementara itu jumlah penerima

manfaat program dengan cakupan lebih dari seratus orang (>100 orang) dilakukan oleh 6 lembaga (28%), terdiri dari ormas, NGO dan satu kelompok TP PKK. Sebanyak 24% dari total lembaga mengakui *beneficiaries* program berkisar antara 50-100 orang, umumnya dilakukan oleh NGO dengan lokasi sasaran tidak hanya di Kota Yogyakarta namun juga di luar provinsi. Satu-satunya lembaga dengan pelibatan peserta kurang dari 20 orang dilakukan oleh Yayasan Sawo Kembar. Cakupan peserta lebih dari 500 orang juga hanya dilakukan oleh satu lembaga yakni Yasanti.

Jika diamati dari spektrum lokasi sasaran program seperti terinci dalam Tabel 4.3, mayoritas lembaga melakukan aksi pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta.

Tabel 4.3 Cakupan Program

| No | Nama | Jenis | Jumlah penerima manfaat | Coverage | | |
|----|------------------------|-------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | Lokasi sasaran di Yogyakarta | Lokasi sasaran di Kota DIY, selain kotaYK | Lokasi sasaran di luar DIY |
| 1 | Paluma Nusantara | NGO | 50-100 orang | Bumijo, Suronatan, Kauman | Bantul, Gunungkidul | Magelang, Jawa Tengah |
| 2 | Yakum | NGO | 50-100 orang | Sapen, Gambiran, Pakuncen Sidomulyo, Dongkelan, Mantrijeron, Gondokusuman & Jetis | Sleman, Gunungkidul, Bantul | Magelang, Medan, Papua, Sidoharjo, Aceh Tengah dan Nias |
| 3 | IHAP | NGO | 20-50 orang | Pasar Bringharjo, Warung Notoprajan, Kab. Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul, Wonolelo, | Kulon Progo, Gunungkidul | Boyolali, Kupang |
| 4 | YASANTI | NGO | > 500 orang | Jogokaryan, Krapyak, Bugisan, Wirobrajan, Patuk Warungboto, Umbul Harjo, Gambiran, Bener, Tegairejo dan Demakan | Progo, Sleman, Gunungkidul, Sleman, Gunungkidul, Bantul | Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Magelang, Ungaran |
| 5 | Rumpun Tjoet Nyak Dien | NGO | 50-100 orang | Jetis | Bantul, Gunungkidul | |
| 6 | Rifka Anisa P2GHA UIN | NGO | > 100 orang | Kota Yogyakarta | Sleman | |
| 7 | Sunan Kalijaga | Pusat Studi | 50-100 orang | Kota Yogyakarta | | |
| 8 | PSG UII Dinsosakertra | Pusat Studi | 20-50 orang | Kota Yogyakarta | | |
| 9 | ns | Pemerintah | 20-50 orang | Kota Yogyakarta | | |
| 10 | KPMP | Pemerintah | 20-50 orang | Kota Yogyakarta | | |

| | | | | | |
|----|--|---------------|--------------|--|-----------------------------------|
| 11 | Muslimat NU Asosiasi Olahhan | Ormas | >100 orang | Kota Gede, Umbul Harjo, Wirobrajan, Tegalrejo | |
| 12 | Kota Yk Yayasan Sawo | Asosiasi | 20-50 orang | Kota Yogyakarta Gondokusuman, Lembah | |
| 13 | Kembar | Sosial Gereja | < 20 orang | Code Gunungkidul | |
| 14 | Narasita Lembaga Keuangan Mikro dan Agribisnis (LKMA) Sukses | Perkumpulan | > 100 orang | Kotagede, Umbul Harjo, Ngampilan, Tegalrejo | Kalimantan Utara Provinsi DIY, |
| 15 | Madani TP,PKK Kelurahan | LKM | 50-100 orang | Kota Yogyakarta | |
| 16 | Sosromenduran | PKK | > 100 orang | Kelurahan sosomenduran PKK RT,PKK Dasawisma, TP.PKK 45 kelurahan, TP.PKK 14 Kecamatan | |
| 17 | TP.PKK Kota Yogyakarta | PKK | | | |
| 18 | kel.Notoprajan TP,PKK Kelurahan | PKK | 20-50 orang | Kelurahan Notoprajan | |
| 19 | Mantrijeron PKK | PKK | 20-50 orang | Kelurahan Mantrijeron | |
| 20 | Panembahan TP,PKK | PKK | 20-50 orang | Kelurahan Panembahan | |
| 21 | Kel.Wirobrajan | PKK | > 100 orang | Kelurahan Wirobrajan | |

Sumber : Data Primer diolah Kembali

Tidak seluruh lembaga menjelaskan secara spesifik lokasi program kegiatan, seperti pusat studi dan lembaga pemerintah misalnya hanya menyebutkan lokasi proyek di Kota Yogyakarta tanpa merinci kecamatan atau kelurahan. Bisa jadi penerima program memiliki karakteristik tertentu dengan wilayah domisili tersebar di berbagai kecamatan, contohnya program pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan usaha yang dilakukan oleh Dinakertransos menasar pelaku UKM perempuan di seluruh kota Yogyakarta. Demikian pula yang dilakukan oleh PSG UII dengan program *Pendidikan Politik Untuk, Oleh, dan Bagi Pemilih Pemula Dengan Metode Peer Based and Political Participatory* secara umum diperuntukkan bagi remaja atau siswa SMU yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Praktik yang sama juga terjadi di P2GHA UIN Sunan Kalijaga, dengan sasaran program hakim, politisi, akademisi dan mahasiswa maka lokasi sasaran tidak spesifik di kecamatan tertentu.

Lain halnya dengan TPPKK dimana lokasi program kegiatan dilakukan di wilayah atau kelurahan masing-masing. Mayoritas kelompok NGO juga secara eksplisit merinci cakupan kegiatan dengan lokasi kegiatan meliputi Kecamatan Gondomanan, Gondokusuman, Jetis, Kota Gede, Tegalrejo, Wirobrajan, Umbulharjo, dan Ngampilan, Mantrijeron. Dari 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta terdapat lima kecamatan yakni Kraton, Danurejan, Mergangsan, Pakualaman, dan Gedong Tengen yang belum tersentuh program pemberdayaan oleh 21 lembaga yang menjadi responden dalam riset ini.

Studi ini juga mengungkap hampir semua NGO berkegiatan tidak hanya di Kota Yogyakarta, wilayah sasaran juga mencapai Kabupaten lain seperti Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo.

Bahkan beberapa NGO seperti Paluma Nusantara, Yakum, Narasita dan IHAP melakukan penetrasi program pemberdayaan perempuan ke beberapa wilayah di luar Propinsi DIY.

4. 5. Pendekatan

Pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai lembaga dalam pemberdayaan kaum perempuan adalah melalui riset, advokasi hukum dan kebijakan, pelatihan/workshop, dan pendampingan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta, sebagian besar lembaga yang di survey menggunakan metode pelatihan dan workshop. Pendekatan ini memiliki porsi terbesar, sebanyak 41%. Aktifitas penyelenggaraan pelatihan dan workshop dilakukan oleh seluruh lembaga kecuali Lembaga Keuangan Mikro dan Agribisnis.

Bentuk pelatihan secara umum berorientasi pada upaya peningkatan kecakapan hidup (*life skill*) dan kemampuan (*capability*). Pemberdayaan perempuan secara simultan akan berujung pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat dan produktivitas perempuan itu sendiri. Peningkatan produktifitas perempuan dapat dilihat dari indikator-indikator, misalnya, adanya perubahan sikap yang lebih positif dan maju, meningkatnya kemampuan kecakapan hidup (*life skills*), serta hasil karya baik berupa barang dan jasa untuk keperluan diri dan masyarakat.

Grafik 4.5
Pendekatan Pemberdayaan Perempuan



Sumber : Data Primer diolah kembali, 2015

Metode selanjutnya adalah pendampingan masyarakat, sebanyak 37% responden menyatakan pendekatan ini menjadi acuan dalam memberdayakan kelompok perempuan di Kota Yogyakarta. Dari seluruh lembaga yang di survey baik berjenis NGO, ormas, pusat studi, perkumpulan, dan PKK memberdayakan perempuan melalui pendampingan masyarakat, hanya tiga institusi yang belum menggunakan metode ini yakni Yasanti, Rumpun Tjoet Nyak Dien, dan Yayasan Sawo Kembar.

Advokasi hukum dan kebijakan, meski tidak sepopuler dua metode sebelumnya juga dirujuk oleh 18% responden penelitian dalam merespon isu perempuan di Kota Yogyakarta. Lembaga yang memilih pendekatan ini adalah NGO, ormas, dan TP PKK. Advokasi tidak saja menjadi piranti penting dalam reformasi kebijakan publik, akan tetapi juga dapat menjadi sarana transformasi sosial dan politik,

karena dampak yang ditimbulkannya bisa berupa peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan, akuntabilitas dalam struktur dan proses pembuatan kebijakan.

Pendekatan pemberdayaan perempuan melalui riset tidak banyak dilakukan, tercatat hanya empat lembaga yang menggunakannya yakni Rifka Anisa, PSG UII, P2GHA UIN Sunan Kalijaga, dan Muslimat NU. Aktifitas advokasi berbasis riset umumnya dilakukan oleh Lembaga yang berafiliasi dengan universitas, kultur akademik menguntungkan pusat-pusat studi terutama dalam penguasaan metodologi, pembacaan atas kepustakaan yang relevan dan kemudian menuangkan hasil temuan penelitian ke dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah baku.

4. 6. Masukan

Survey ini juga mendokumentasikan berbagai masukan yang ditujukan pada pemerintah Kota Yogyakarta dan KPMP terkait isu sosial dan perempuan. Berikut adalah rangkumannya ;

Tabel 4.4
Masukan Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta

| Bidang | Keterangan |
|----------------|---|
| Ekonomi | a. Memfasilitasi pelatihan dan peningkatan ketrampilan perempuan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, produktifitas dan meminimalisir angka KDRT; b. Pendampingan terhadap perempuan yang |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>termarginalisasi secara ekonomi dan sosial;</p> <p>c. Pendampingan ekonomi bagi perempuan mulai dari proses produksi sampai dengan pemasaran.</p> |
| Hukum | a. Pendampingan hukum bagi korban KDRT. |
| Pendidikan | a. Pendampingan dan pendidikan kritis bagi perempuan melalui kelompok PKK dan Dasawisma. |
| Sosial | <p>a. Pendampingan ODHA;</p> <p>b. Optimalisasi konselor mitra keluarga dengan pelibatan laki-laki sebagai konselor;</p> <p>c. Menetapkan Dasawisma sebagai ujung tombak pencegahan kekerasan terhadap anak;</p> <p>d. Peningkatan program pemberdayaan perempuan dengan menggandeng instansi-instansi terkait;</p> <p>e. Intensifikasi program pemberdayaan di daerah tertinggal dan rawan bencana yang berkelanjutan;</p> <p>f. Penyediaan ruang konsultasi perempuan dan anak serta tempat penitipan anak;</p> <p>g. Sosialisasi P2TP2A Kota Yogyakarta;</p> <p>h. Perbaikan mekanisme kontrol dan monitoring terhadap bantuan yang disalurkan terhadap masyarakat (kelompok perempuan).</p> |

Masukan untuk pemerintah Kota Yogyakarta guna meningkatkan status perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum cukup beragam. Aspek ekonomi dan sosial paling banyak mendapat perhatian. Penguatan program ekonomi dalam

bentuk pendampingan dan pelatihan bagi perempuan pelaku usaha ekonomi mikro dianggap sebagai isu yang selayaknya mendapat prioritas. Hal ini cukup beralasan mengingat jumlah perempuan di Kota Yogyakarta yang terserap dalam sektor informal lebih besar dibanding laki-laki. Sektor informal seperti Usaha Kecil dan Mikro merupakan area yang paling banyak diminati oleh kaum perempuan karena dipandang mampu menjadi penyangga (*buffer*) bagi ekonomi rumah tangga. Sulitnya menembus bursa kerja di sektor formal menjadi faktor pendorong masuknya kaum perempuan ke dalam usaha informal sebagai lahan alternatif untuk dapat mempertahankan hidup.

Permasalahan sosial seperti pengawalan hak-hak ODHA (Orang Dengan HIV dan Aids) juga menjadi perhatian responden, karena memang jumlah ODHA terus mengalami peningkatan. Data Dinas Kesehatan DIY menyebutkan hingga Desember 2014, jumlah kasus HIV/AIDS mencapai 802 kasus. Sebagian besar penderita berusia produktif antara 30-39 tahun dan 46% dari populasi tersebut adalah perempuan. Persoalan kekerasan terhadap anak tidak luput dari sorotan, sejumlah responden menyatakan pentingnya peran Dasawisma untuk menjadi ujung tombak pencegahan kekerasan anak. Masukan lain untuk pemerintah Kota Yogyakarta adalah penyediaan akses perempuan dan anak terhadap layanan konsultasi termasuk pendampingan hukum bagi korban kekerasan.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta juga menerima sejumlah masukan yang menitikberatkan pada bidang pendidikan dan politik. Di bidang pendidikan misalnya, isu gender dan keluarga ditanggapi oleh responden dengan gagasan pelatihan pendidikan keluarga

berwawasan gender dan sekolah gender. KPMP juga diharapkan lebih aktif dalam mesosialisasikan program-program pemberdayaan sehingga lebih mudah diakses oleh perempuan di akar rumput. Beberapa NGO yang bergerak dalam advokasi perempuan dan politik mengharapkan KPMP berpartisipasi secara aktif dalam mengejar ketertinggalan perempuan di ranah politik melalui program pendidikan politik dalam keluarga, pelatihan peningkatan kapasitas untuk politisi perempuan serta program afirmasi untuk Musrenbang khusus perempuan.

Tabel 4.5
Masukan Untuk KPMP Kota Yogyakarta

| Bidang | Keterangan |
|-------------------|---|
| Ekonomi | a. Penguatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh komunitas perempuan. |
| Pendidikan | a. Peningkatan status perempuan melalui program pendidikan; b. Penyebaran informasi, pendampingan dan edukasi bagi perempuan melalui kelurahan, RT dan RW; c. Pelatihan pendidikan keluarga berwawasan gender. d. Menyelenggarakan sekolah gender; e. Sosialisasi program perempuan dan anak; f. Ketersediaan data pilah gender; g. Lebih banyak melakukan survey dan penelitian; |

| | |
|----------------|---|
| | h. Publikasi program kerja sehingga dapat terakses secara mudah terutama di wilayah pedesaan. |
| Sosial | a. Merangkul komunitas remaja dan peningkatan kerjasama dengan LSM dan komunitas lain di Kota Yogyakarta . |
| Politik | <p>a. Pendidikan politik bagi keluarga;</p> <p>b. Peningkatan kapasitas/training bagi perempuan anggota DPRD Kota;</p> <p>c. <i>Affirmative action</i>“Musrenbang khusus perempuan” dikelurahan/kecamatan/KotaYogyakarta.</p> |

Sumber : Data primer 2015 diolah kembali

- ∞ -

BAB 5

PETA PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA YOYAKARTA

Bab ini menjelaskan potensi pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta berdasarkan hasil FGD dan *in-depth interview*. FGD dilaksanakan pada 20 November 2015 diikuti kurang lebih 25 peserta. Analisis dalam bab ini merangkum temuan dalam FGD dan *in-depth interview* yang merupakan persepsi dan informasi dari para informan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka sebagai praktisi, pelaku maupun penerima manfaat dalam pemberdayaan perempuan, baik di ranah pemerintahan, PKK, LSM maupun kajian akademik. Berdasarkan telaah hasil FGD dan *in-depth interview*, bab ini dibagi ke dalam 3 bagian.

Pertama, isu paling krusial yang membutuhkan respon segera dalam pemberdayaan perempuan. Kedua, pendekatan yang paling tepat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Terakhir, masukan bagi program pemberdayaan perempuan, baik yang dilaksanakan pemerintah kota secara umum, maupun Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan secara khusus. Sekedar catatan, guna menghormati kerahasiaan informan, nama-nama informan secara detail tidak ditulis. Hanya saja, jika diperlukan, identitas organisasi dan pernyataan informan tetap dikutip sebagaimana hasil transkrip wawancara.

5. 1. Isu Paling Krusial dalam Pemberdayaan Perempuan di Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil FGD dan *in-depth interview*, isu paling krusial yang mesti segera direspon dalam program pemberdayaan perempuan, adalah:

Pertama, kekerasan domestik. Pegiat perlindungan perempuan dan anak, Rekso Diah Utami menjelaskan masalah yang dihadapi kaum perempuan yang saat ini paling krusial adalah kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya,

"Memang masalah yang krusial (bagi perempuan adalah) sebagai korban kekerasan. Karena memang dari hasil kami di pendampingan memang banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan baik itu di rumah tangga maupun pelayanan umum". Ia melanjutkan, "terutama untuk ibu-ibu yang dari sosial ekonomi menengah ke bawah, anak-anak dilingkup sekolahan yang gurunya terlalu keras sehingga anak trauma masuk sekolah kembali".

Ia mengidentifikasi hal-hal semacam ini mengakibatkan anak-anak trauma untuk sekolah kembali.

Sementara menurut pegiat P2GHA (sebelumnya disebut PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

"Isu yang hangat tentang kekerasan seksual pada anak. Hukuman yang harus diberikan pada pelaku misalnya dikebiri atau bagaimana biar jera. Isu umumnya KDRT, beban ganda."

Kedua, upaya peningkatan penghasilan perempuan. Salah seorang informan menjelaskan,

"Di Yogya akses untuk mendapatkan informasi terkait program peningkatan kapasitas, misalnya dalam bidang ekonomi, politik dan sosial masih sangat minim diakses, terutama bagi perempuan. Informasi belum

terbuka atau karena perempuan merupakan kelompok termarjinalkan sehingga tidak dibuka.”

Pemberdayaan ekonomi juga diperlukan, karena, menurut salah seorang informan,

“Wanita tidak berpenghasilan sendiri atau penghasilan minim menjurus terjadinya KDRT dan sebagainya. Ini yang mungkin KPMP sudah ada pemikiran pemberdayaan perempuan dimana mereka punya penghasilan sendiri sehingga KDRT minim, penghasilan sendiri tidak menimbulkan KDRT yang baru. Ada selain mereka punya penghasilan mereka juga punya pendidikan agar tidak merasa penghasilan tinggi dia yang menjadi pelaku KDRT.”

Ketiga, pendidikan untuk perempuan. Salah satu informan menyatakan,

“Tingkat pendidikan perempuan di Kota Yogyakarta sekitar 60-70% dibawah garis kemiskinan sehingga dibutuhkan pelatihan yang ada hubungannya dengan peningkatan ekonomi, pendidikan rendah dan ekonomi rendah sehingga terjadi kekerasan di rumah tangga.”

Informan dari KPMP menyadari, persoalan pendidikan ini sangat terkait dengan akses. Menurutnya, program pendidikan atau pelatihan untuk perempuan sendiri sudah cukup banyak. Akan tetapi, yang turut aktif sebagai partisipan seringkali terbatas. Ia mengatakan,

“Kalau menurut saya itu aksesnya ya. Karena ketika saya membuat sosialisai entah pelatihan itu yang dapat orangnya saya hafal. Padahal perempuan itu *kan* banyak dan saya tidak mengerti juga kemungkinan nanti bisa *dikroscek* di kecamatan atau kelurahan kenapa yang dihadirkan itu-itu saja. Jadi aksesnya yang mau apa cuma itu atau mungkin aksesnya hanya didapat oleh itu. Mungkin perempuan itu hampir saya

tidak bisa menghafal wajah-wajah yang ikut pelatihan ini ikut pelatihan itu sosialisasi itu tapi hampir ada yang sama. Mungkin aksesnya kalau bisa diperluas atau mungkin motivasinya untuk perempuan untuk meningkatkan lebih itu seperti apa.”

Keempat, persamaan hak dalam bekerja. Perempuan tidak semua memiliki penghasilan sendiri. Kalau punya, seringnya berpenghasilan rendah sehingga KDRT sering terjadi. Pemberdayaan ekonomi perempuan perlu selain juga dari peningkatan pendidikan. Seorang informan mengatakan,

“Menurut saya ini mungkin budaya Jawa, misalnya ada wanita punya pendidikannya sama tapi kesempatan kerja itu pria dulu *kan*, jadi menurut saya wanita atau ibu itu harus dibekali sesuatu yang memang dia itu harus bisa mengangkat generasinya misal dibekali kesehatan, manajemen keuangan, karena budaya dia *kan* biasanya dibelakang.”

Kelima, perhatian untuk lansia perempuan. Informan mengatakan,

“Saya lebih menekankan untuk penanganan lansia dan perempuan miskin. Ini sebetulnya belum terlantar tapi karena memang miskin dan sebatang kara anaknya dijauh. Ini kadang menurut saya perlu penanganannya kesejahteraannya, dulu *kan* ada upaya pendampingan untuk yang kita hadapi yang nyata, itu ada dana-dana untuk lansia, saya kurang tahu persis tapi ada, dulu ada 2 orang jompo dapat dana 1.250.000, mungkin nanti kedepan kalau ada kita upayakan karena itu sangat dibutuhkan terutama lansia.”

Selain itu, pemberdayaan lansia terkait tanggap bencana juga diperlukan. Informan mengatakan,

“Tanggap darurat bencana, pendampingan kelompok perempuan dan lansia di daerah rawan bencana juga perlu menjadi prioritas.”

Informan lain menambahkan,

“Selama ini yang saya alami yang saya ketahui untuk lansia terlantar juga ada pendampingan dari dinas sosial itu mendapat jaminan sosial, itu ditangani LSM perbulan 200.00 dari dinas sosial pusat, yang diterima ada pendampingannya sendiri dari BSM. Kalau untuk penanganan lansia bisa sendiri.”

Lansia miskin juga kurang terjaring dalam program karena minim jaringan dan akses. Pengurus RW kurang peduli pada kelompok perempuan yang secara usia sudah tua dan kurang bersosialisasi sehingga penerima program tidak menyeluruh.

Keenam, perhatian pada pendidikan reproduksi bagi remaja perempuan. Salah seorang informan menilai, pendidikan ini penting terutama terkait dengan dampak teknologi dan media sosial untuk remaja perempuan dalam hal pergaulan bebas. Ia menjelaskan,

“Bertambahnya kemajuan jaman dan perkembangan teknologi perlu kita cermati adanya sisi lain membawa hal negatif yakni melalui media sosial ada risiko yang bagi wanita terutama anak muda anak kecil bisa terbawa pada tindak-tindak kekerasan kejahatan, terjebak, pergaulan bebas terkait dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Di Jogja ini *kan* sekarang tidak hanya dikota tetapi seluruhan dari rumah anak muda tidak selalu mendapat didikan dari orang tua yang baik, itu saya cermati. Hal yang tidak sopan dan tidak baik itu saya amati.”

Ia melanjutkan,

“Sebagai orang tua dilingkungan muda harus diajari. Kecenderungan anak muda sekarang, anak putri pada *ngrokok*, tidak pantas. Saya sering bertemu mereka.

Dari rumah orangtua tidak memberi didikan yang baik. Orangtuanya merokok. Di lingkungan pergaulan sering dibujuk teman laki-laki. Mereka merokok ada yang baru saja karena desakan lingkungan. Saya memang pernah dulu saya kamu anak putra *nggak ngrokok* banci, yang *ngrokok* putri dipaksa juga dilingkungannya. Ini sangat riskan sangat risiko terjerumus pada pergaulan bebas.”

Informan lain menambahkan, pergaulan bebas ini kadang menjebak remaja putri pada isu prostitusi dan narkoba, sehingga diperlukan pendidikan karakter untuk remaja putri. Seorang informan mengatakan,

“Yang sangat riskan kebawah ini, yang mereka hadapi banyak masalah, yang menurut saya kalau tadi disebutkan dan masalah kekerasan, pendidikan perlu ditingkatkan, melengkapi lainnya yaitu seiring digunakannya wanita oleh orang lain yang dia sendiri tidak sadar dan iming-iming pihak lain dalam persoalan yang mengesankan, misal narkoba yang kita khawatirkan. Tidak hanya mereka yang berpendidikan dan yang berwawasan, ini riskan juga mereka yang disebut kelas menengah yang berpendidikan baik, ini satu hal yang mengkhawatirkan.”

Seorang aktivis LSM menilai, “

“Seringkali masalahnya di kota, ada penolakan dari sekolah bahwa tidak boleh memberi pendidikan seksual, padahal kasusnya mulai merambah pada siswa (SMP-SMA). Di lapangan sulit, karena pemerintah tidak memberikan akses. Remaja masih banyak percaya pada “mitos” daripada informasi akurat tentang seksualitas. Hal ini berimbas pada tindakan yang tidak diinginkan. Kita melakukan poendampingan, pihak sekolah negeri menolak, hanya pada sekolah swasta yang memiliki otoritas tersendiri.”

Hal ini yang ia sayangkan, karena menurutnya,

“Padahal, bila tidak dikasih tahu takutnya angkanya semakin meningkat. Dinas Pendidikan sendiri juga belum *welcome*. Kalau untuk Dinkes sudah memberi respon yang baik. Kedua, layanan berbasis remaja tidak bisa diakses. Di Kota ada Puskesmas ramah anak tapi tidak efektif karena masalah waktu pelayanan yang tidak sesuai. Desain tidak *friendly* sehingga aksesnya kurang menarik minat remaja.”

Ketujuh, perempuan pekerja di sektor informal. Mereka adalah para Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan buruh perempuan, seperti buruh gendong di pasar-pasar tradisional di sekitar Yogyakarta, seperti Pasar Beringharjo, Pasar Giwangan, dan Pasar Kranggan, serta buruh rumahan, yaitu pekerja pabrik yang melakukan pekerjaannya di rumah (bukan di pabrik). Buruh rumahan dikategorikan sebagai pekerja informal, meski statusnya pekerja formal. Kewajiban pekerjaan yang harus mereka tunaikan layaknya pekerja formal akan tetapi hak-hak kesejahteraan maupun perlindungan cenderung seperti pekerja informal.

Sebagaimana dikemukakan oleh informan dari LSM, yang perlu diperhatikan, pekerja-pekerja informal ini tidak hanya berasal dari Kota Yogyakarta. Mereka berasal dari Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul. Bahkan, sebagaimana diinformasikan oleh informan tersebut, tidak sedikit yang berasal dari kota-kota di Jawa Tengah, seperti Klaten. Buruh gendong perempuan yang dari Yogyakarta sendiri sudah memiliki paguyuban yang bernama Paperja (Paguyuban Perempuan Pekerja). Tetapi, ini belum mencakup buruh-buruh dari luar Kota Yogyakarta. Meski berasal dari luar wilayah Kota Yogyakarta, keberadaan mereka juga perlu mendapatkan perhatian. Mereka perlu mendapatkan perlindungan yang layak

dalam bidang kesejahteraan (upah yang cenderung jauh di bawah UMK), akses kesehatan, keamanan, perlindungan kerja, dan sebagainya.

Informan menyebutkan, sebenarnya sudah mulai ada komunikasi dengan walikota dan istri walikota, misalnya terkait berbagai pelatihan, dan informasi terkait kebijakan buruh perempuan. Demikian juga dengan para kepala pasar. Sudah mulai ada pengajian dan pemeriksaan kesehatan rutin. Yang diperlukan kemudian adalah penguatan komunikasi, dan tindak lanjut perlindungan mereka untuk diimplementasikan.

Kedelapan, perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan dan kejahatan seksual. Seorang kader PKK menjelaskan,

"Wah prihatin sekali sekarang untuk anak usia SD kelas 1 sampai 18 tahun itu rawan sekali. Yang ada disekitar lingkungan saja, tetangga, 6 tahun memperkosa. *Ngeri* sekali, Mbak. Pengantar jemput sekolah. Anak *nggak* tahu. Ada ibu-ibu memperkosa anaknya sendiri. Sekarang kan pintunya, setiap ada apa-apa, ini dari rumah tangga (saya) aja. Saya dulu saya masih awam sekali. Ini sudah sebelas tahun 9 tahun melihat perbuatan orangtuanya. Kadang-kadang anak sudah sekali itu pengen lagi terus kecanduan. Kami mau memberi bekal kepada anak-anak yang perempuan itu yang kena sasaran bisa melawan. Itu satu-satunya jalan, kita mau membunuh mereka yang berbuat *nggak* bisa. Anak harus bisa melawan. Kalau sama orang lain bagaimana. Ada yang masuk ke kamar mandi *ditututi* dan disodomi. Biar anak-anak diberi kekuatan melawan."

Dia menambahkan,

"(Perlu) Digencarkan PKK Kota memerangi kekerasan seksual pada anak." Menurutnya, "kalau sekarang ya itu mbak (perlu diperhatikan persoalan) reproduksi

remaja, remaja belum tahu reproduksinya dia, kekerasan seksual pada anak, penyakit HIV & AIDS. Kalau AIDS ada kader setiap hari, narkoba juga ada kader setiap hari, Puskesmas sama PKK belum sinkron *gini* mbak. Kalau Puskesmas *pengen* kader kesehatan jiwa. Belum sinkron antara PKK dan Dinas Kesehatan. Tim penggerak PKK kecamatan sudah ada. Kalau *nggak* kerjasama *nggak* bisa."

Kesembilan, agar fokus pemberdayaan tidak hanya perempuan tapi juga pihak terkait, misal suami, remaja atau keluarga. Dalam kaitannya dengan ini penting untuk memberi pengertian kepada orang tua untuk membebaskan anak dari tanggungjawab ekonomi (*child labour*). Perlu juga ada pemahaman pornografi dan KDRT bagi laki-laki mulai tingkat RT dan RW guna memperkuat perlindungan terhadap anak dari predator seksual. Hal lain, remaja kurang tersentuh oleh program pemerintah maupun KPMP, karena fokus yang terlalu besar pada balita dan lansia. Menurut informan,

"Ini memperhatikan balita dan lansia ternyata remaja kecolongan. Sekarang pengisian kegiatan positif kegiatan untuk anak-anak usia SD-SMP-SMA."

5. 2. Hambatan dalam Program Pemberdayaan Perempuan

Para informan juga memberikan pendapatnya terkait hambatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Di antara hambatan yang paling krusial adalah hambatan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan itu sendiri oleh pemerintah. Kedua, hambatan di dalam masyarakat sendiri.

Terkait dengan hambatan di dalam pemerintahan, ada beberapa isu yang dimunculkan oleh para informan. *Pertama*, dalam tataran perencanaan, program yang responsif gender sudah cukup

ditekankan. Akan tetapi, dalam hal implementasi, masih banyak penguatan yang diperlukan. Salah seorang informan dari Bappeda menjelaskan,

"*Nggih, gini* kalau kami mungkin dari sisi perencanaan dulu *aja* ya. Dari bidang perencanaan *kan* dari gender apa yang *udah* kami lakukan di bidang perencanaan itu kita bedah. Sebenarnya isu gender itu *udah* lama ya isu gender seperti itu, kalau kami *kan* terus mencoba untuk mengintegrasikan itu dalam perencanaannya. Sehingga apapun kebijakannya kalau menurut kami ya harus terintegrasi dengan perencanaan sampai nantinya ke penganggaran kalau mau kita intervensi apapunlah, kami berpikir seperti itu. Jadi kalau hanya sekedar wacana, mau begini mau begini dan seterusnya, itu hanya takaran dibicarakan tidak pernah diimplementasikan kok ya cuma lama *gituloh*, menurut kami, sehingga harusnya ya harus masuk ke dalam dokumen perencanaan."

Ia melanjutkan,

"Nantinya akan diikuti pasti dengan penganggaran sampai ke APBD nya. Itu pola pikir kami seperti itu. Sehingga gender ini meskipun *leading-nya* - kalau kami Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat itu - KPMP kami harapannya itu hanya sebagai *leading* saja, harapannya semua SKPD itu sudah *ngeh gitu* lho dengan gender. Dan selalu di dokumen kami juga kebijakan gender kami itu sebenarnya tidak hanya perempuan."

Menurutnya, gender sendiri masuk ke dalam salah satu dari lima aspek afirmatif kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta. Ia menuturkan,

"Kami selalu afirmatif gender itu kelima kelompok. Ya perempuan, ya anak, ya lansia, ya difabel, ya miskin."

Jadi lima. Jadi tidak spesifik hanya perempuan aja tidak. Jadi selalu kami gaung-gaungkan kalau dalam ke SKPD itu lima kelompok afirmatif gender itu yang disasar. Harapannya semua SKPD lihatlah kelima kelompok sasaran apa yang sudah kita intervensi di lima kelompok sasaran itu.”

Dalam hal ini, ia menjelaskan, pemerintah Kota juga banyak bekerjasama dengan beberapa lembaga nonpemerintah. Ia mencontohkan,

“Itu yang kami lakukan. Dari AKSARA sebenarnya saat tahun-tahun kemarin itu juga sudah ada kerjasama untuk mendampingi SKPD dengan BPPM DIY juga, ada diklat atau pelatihan kaitan penyusunan GAP (Gender Analisis Publik) untuk *memetani*lah ibaratnya. Cuma yang kami rasakan memang itu belum efektif. Meskipun semua SKPD sudah memberikan satu, minimal *memetani* satu kegiatan yang kira-kira ada GAP *gitu* di analisis dan seterusnya sampai timbul penganggaran analisis terhadap keuangan, sampai rekomendasinya mau seperti apa. Beberapa SKPD sudah menindaklanjuti itu. Cuma menurut kami belum begitu efektif. Menurut kami ya.”

Terkait dengan kelemahan dalam hal efektivitas itu, ia menjelaskan,

“*Gini*. Seolah-olah analisis itu ada *form* tersendiri yang butuh waktu, butuh SDM, butuh untuk menganalisis itu sebenarnya proses itu bagus, kami tidak bilang jelek, tidak. Cuma sekedar dianalisis, sudah, tapi tidak apa ya, jadi seolah-olah kami melihat SKPD itu masih melihat itu suatu beban.”

Ia melanjutkan, yang ia maksud dengan beban adalah,

“(Semacam) Beban kerja tambahan. Karena menurut kami *gini* mbak, kalau semua hal seperti itu bagi kami memang karena SDM kan yang *nglakoni* ya itu-itu aja,

kalau sekian laporan, ada matrik tersendiri, harus ada *form* tersendiri, harus ini itu dan seterusnya, kita kok hanya tatanannya tatanan kertas, yang kami rasakan. Jadi lebih ke situ. Jadi dokumennya banyak, kita *tuh* selalu hanya seolah-olah mencetak dokumen, karena sudah terlalu banyak sesuatu kalau menurut kami sudah terlalu banyak, jadi yang prioritas malah *nggak* kena, karena semua hal begitu, tidak hanya gender, untuk analisis risiko, untuk setiap kegiatan harus ada ini itu, itu bagus sebenarnya.”

Lebih lanjut, ia mengatakan,

“Kita tidak menyalahkan, tidak, tapi ketika semua itu harus dilakukan akhirnya terus mungkin karena kelelahan barangkali ya, akhirnya mana yang mau di ini, apa dulu ya yang mau dilakukan? Jadi kami sudah merasakan seperti itu. Mungkin daerah lain juga sama. *Kayak* sistemnya kita itu *kayak* mencari bentuk. Kenapa sih tidak ada yang – kita kan rutinitasnya dokumen perencanaan ya ini, evaluasi ya ini, *ha mbok* ya masuk ke dalam situ saja gitu.”

Ia menyarankan, jika semua bisa diintegrasikan akan sangat memudahkan kinerja SKPD-SKPD di dalam merespon pemberdayaan perempuan. Ia mengatakan,

“Terintegrasi saja *gitu loh*. Evaluasi ya di dalam situ saja *gitu*. Tidak usah bikin ini sendiri, bikin itu sendiri *gitu lo*, seolah-olah jadi akhirnya itu tadi. Harus ada SDM lagi yang dikirim untuk pelatihan. Yang dilatih belum tentu pada saat jam pelatihannya kadang-kadang yang dikirim *nuwunsewu*, yang malah tidak punya pekerjaan di kantor- yang justru ini kirim untuk pelatihan itu. Itu menurut kami ketidakefektifannya di situ. Akhirnya pada saat kami meminta ke SKPD, la kemarin yang dilatih siapa *e?* Ini hanya sekedar baru - SK ada, ini ada, tapi sekedar apa ya? Di atas kertas. Terlalu ini, meskipun sebenarnya secara riil, sudah banyak yang dilakukan, hanya kita sebenarnya langsung saja menukik ke dokumen perencanaan

gitu. Yang rencana –karena ini perencanaan kami 2016 sudah mau APBD- 2017 nanti justru lima kelompok afirmatif gender itu langsung mau kami tuangkan di dalam PRA RKN-nya.”

Menurutnya, sebagai individu yang bekerja di sektor pemerintah, ia juga ingin segala sesuatu berjalan secara efisien. Sebaiknya, menurut sarannya,

“Langsung saja tidak usah tambah itu tadi. Dan itu tidak dilakukan pun sebenarnya bisa kita mengintervensi, seolah-olah begitu. Kenapa harus dengan cara panjang kalau cara cepatnya bisa? Sehingga yang akan kami lakukan adalah di *form* RKAT sebenarnya memungkinkan, kan ada *input*, *output*, *outcome*, dan ada kelompok sasaran. Di form kelompok sasaran itu yang akan kami giring ke SKPD kegiatan –kan masih ada RKA nya- kegiatan itu *tuh* menysasar ke kelompok sasaran apa? Apakah menysasar ke perempuan ada *nggak*? lansia ada *nggak*? Ke anak ada *nggak*? Ke difabel ada *nggak*? Ke miskin ada *nggak*? Kalau pun semua *nggak* ada yang sifatnya internal, yang internal SDM yang melaksanakan itu paling tidak *pegawaine* perempuan itu ada *nggak* di situ *gitu lo*. Ke situ kami maunya, jadi langsung. Soalnya kalau tidak memlilih satu dari sekian banyak kegiatan di SKPD kapan *rampunge*, saya pikir *gitu*. Jadi mau 10 tahun dianalisis SKPD hanya memilih satu, dua, *gitu* jadi malah *nggak* komperehensif *gitu lho*.”

Kedua, belum kuatnya mekanisme untuk memastikan keberlanjutan dalam pendampingan. Sudah ada program namun jika tidak ada kontrol dan pendampingan maka seringkali tidak ada kelanjutan. Bantuan pada KUBE sering tidak berkelanjutan. Program KUBE belum juga menysasar remaja, sementara mereka adalah segmen yang sangat potensial. Tentu saja, diperlukan format yang

berbeda dengan KUBE yang selama ini ada untuk kelompok rumah tangga. Usaha-usaha yang dijalankan remaja seringkali merupakan usaha kreatif. Dengan demikian, desain programnya pun memerlukan model yang sesuai dengan tingkat usia mereka.

Ketiga, perlunya kontrol terhadap kualitas pelayanan. Raskin yang diterima, misalnya, rata-rata tidak layak konsumsi. Beras dalam kualitas kurang layak (saat dibersihkan banyak beras yang jelek). Di sisi lain, warga yang dahulu tidak mampu kemudian sudah *ter-cover* dalam KMS dan program lain kemudian sudah sejahtera seringkali masih terus menurus mendapat bantuan sedangkan kelompok yang tidak mampu lainnya tidak pernah terdaftar. Dalam penyelenggaraan program anak misalnya, perlu didesain program bagi anak yang disesuaikan usia dan tingkat pemahaman.

Keempat, terkait dengan koordinasi antar instansi. Informan menjelaskan,

“Itu koordinasi instansi terkait untuk menangani kegiatan PKK Pokja 1 atau 4 misal kekerasan anak atau KDRT ini mungkin ditangani Pokja 1 dan tetap harus bekerjasama dengan Puskesmas, Kapolsek dan KUA. Ini semua belum merata dan bisa menjadi koordinasi dari instansi terkait. Kemudian juga napza itu masuknya kesehatan dengan Pokja 1. Kemudian BKL yang hubungannya dengan lansia jadi PLKB yang di Puskesmas harus kerjasama. Mungkin BKR dengan Puskesmas remajanya. BKB dengan Posyandu lansia itu simpang siur, misal dengan PAUD. Masalah semua ini tergantung koordinasi instansi dan ekonomi sosial di masing-masing rumah tangga belum terjalin baik.”

Informan dari KPMP sendiri bukan tidak menyadari persoalan ini. Hanya saja, memang tidak mudah menyiasatinya. Menurutny,

"Sebenarnya kita pengen memetakan karena kita banyak tumpang tindih kegiatan itu *nah* kalau perempuan yang miskin itu berapa? Yang berdaya itu berapa? Kita juga *pengin* seperti itu dan harapannya itu strateginya ya dalam peningkatan kualitas itu kita masuk di semua lini ada dipemberdayaan masyarakat ya kita ada di LPMK, di RT, di RW, di beberapa komunitas yang kita mungkin bisa masuk disitu, dan itu tidak mudah. Karena misalnya kelompok PKB itu *kan* binaannya ke kantor KB *gitu* kan. Kita pelan-pelan masuk disitu karena kita berharap kader itu tidak *miopi* gitu tahunya cuma KB *doang* tapi kita tetap kesetaraan gender *gak* tahu. KKDRT *gak* tahu. Perlindungan anak *gak* tahu. Itu *kan* sangat berbahaya. Ada balita tapi tidak tahu tentang undang-undang perlindungan anak. Kader PAUD tidak tahu tentang undang-undang perlindungan anak, tahun lalu saja kita mengundang kader PAUD dan PKB mereka sama sekali tidak tahu undang-undang perlindungan anak itu *kan* sangat berbahaya. Mereka tahunya tentang *parenting* dan seperti itu tapi tidak tahu bagaimana melindungi anak-anak dari korban kekerasan."

Ia mencontohkan,

"Jadi kalau kita lihat di tupoksinya itu abu-abu sangat. Tempat saya (KPMP) dengan yang di Dinsos tempatnya Mbak Nani itu persis sama, jadi memang kita agak abu-abu *gitu*. Ketika kita melangkah ini tupoksi saya dan ini juga tupoksi saya *gitu*. Jadi ketika ada kalau diajak seperti saya seperti ditempatnya Ibu Nani di Dinsos, sudah diketemukan itu kita berbagi istilahnya Bu Indra apanya, saya apanya. Kalau yang nggak kenal ya akhirnya tabrakan terus. Tupoksinya agak abu-abu juga melangkahnya terlalu luas."

Tumpang tindih kegiatan ini, lebih lanjut juga berimplikasi pada tumpang tindih peserta. Sebagaimana diceritakan informan dari KPMP,

"Kalau proses sosial itu kan hampir sekota. Jadi tidak bisa didaerah satu dua tiga atau beda fisik itu bisa ketahuan pembangunan jembatan disini, jalan disini. Bisa *gak* tumpang tindih. Tapi kalau kegiatan sosial itu *kan* kaya Perindagkoptan, Dinsos, KPMP, dan KB itu kan kegiatan sosial kalau Dinkes itu agak mirip-mirip ketika berbicara tentang Posyandu padahal tepoksinya kita juga tentang Posyandu. Akhirnya kami berbagi kalau teknis sana saya kelebagaannya tapi itu *deal* antar SKPD sama miripnya itu. Jadi ketika kami dengan Dinsos tentang sama-sama pemberdayaan ekonomi perempuan untuk korban kekerasan saya pendampingan perempuan korban kekerasan, sama yang ekonomi. Saya yang hukum. Jadi *deal* tidak diatas kertas sebenarnya untuk tupoksi saja biar *ga* nabrak gitu sama-sama bisa menysar.

" Menyikapi ini, informan menjelaskan,

"Harusnya sudah tertulis dan itu bisa dipaparkan di awal diplenokan dengan semua SKPD biar ketahuan ini masuk dimana untuk dimana selama ini *kan* eksaminasi SKPD sendiri-sendiri tidak pernah diplenokan. Jadi masing-masing tahu kegiatan saya masih disitu misalnya. *Nah* kalau misalnya ada renstra atau apa itu *kan* kalau bisa diplenokan misalnya dikegiatan sosial seperti ini atau mungkin isu perempuan misalnya seperti itu diplenokan itu kan lebih bagus biar *gak* duplikasi padahal mungkin fasilitasnya berbeda kalau saya kan lebih *support* ke motivasi *gak* bisa memberikan modal lebih kalau Dinsos, Disnaker itu juga bantuan yang lain. Sering membandingkan di Perindagkoptan ada modal ada juga pameran. Jadi saling membandingkan *gak* mau kalau sama KPMP. *Iya* nanti kalau saya dengan Perindagkoptan banyak yang untuk pemberdayaan ekonomi perempuan ya saya yang rintisannya yang *ngopyak-opyak* menumbuhkan jiwa kewirausahaan ketika jadi saya serahkan ke Perindagkoptan agar lebih bisa *di-push* lagi. Beberapa tahun tidak ada masalah. Sekarang juga ada *deal* antar *deal* gitu."

Ia mengakui, hal-hal seperti ini cukup menyulitkan sejak dari perencanaan. Ia menjelaskan,

“Ada kesulitan karena jujur saja kalau sasaran program itu kan ketika kita menyusun program itu kan tidak *by name by address*. Nah ketika menjelang pelatihan muncul *by name by address* bisa tiga instansi itu berebutan peserta. Jadi mungkin kedepan itu dan sama-sama pelatihan di naker itu berapa puluh angkatan bisa 50 angkatan disini di Perindagkoptan dan juga bisa berpuluh-puluh angkatan. Jadi alangkah indahnya jika kita mau menyusun programnya sudah ada sasarannya *by name by address*. jadi jelas tidak ada duplikasi itu sudah disusun dari Bapeda dan itu usulan dari kami juga. Matur yang diawal akses yang ikut pelatihan itu *kan* ya itu-itu saja yang miskin itu banyak tapi yang ikut kok itu-itu saja. Aksesnya itu loh.” Ia melanjutkan, “Sudah ada pembagian kalau Dinsos itu yang fakir miskin, hampir miskin dan miskin itu KPMP sama Perindagkoptan tapi usulan dari bawah kelurahan dari kecamatan *nah* ketika muncul itu sudah itu-itu saja. Kita kan tidak bisa mengambil sendiri karena kita pun mengusulkan dari bawah itu garansi untuk kami berkelanjutan karena beberapa warga miskin itu memang tidak mau dinaikkan derajatnya menjadi setingkat lebih tinggi mungkin beberapa fasilitas warga miskin banyak yang di Kota (Kota sendiri sudah mengidentifikasi *by name by address*). Sudah, karena itu *kan* dari bawah semua. Hasil pendataan *kan* kita lempar ke bawah. Kalau laku *by name by address* itu jaminan kesehatan sama jaminan pendidikan mereka mau. Tapi kalau pelatihan *gak* mau kalau pelatihan tinggi nanti *gak* dapat KMS memang kita mentalnya ya itu tadi yang kedua aksesnya kita juga *gak* tahu dimana masalahnya. Kalau kita tahu mereka ikut pelatihan ini saya *kasih* tahu, mbak *njenengan* mau ikut pelatihan mana? Masak, rajut, batik, *njenengan* ikut terus? Pernah saya suruh pulang salah satu ibu karena saya lihat seharusnya dia batik tulis malah dia ikut batik jumptuan. *Ngapain* ibu ikut batik jumptuan?”

Njenengan kan diusulkan untuk ikut batik tulis ya itu yang harus anda ikuti tidak boleh melompat ke jumpitan *ntar gak* fokus akhirnya *clup-clup*. Saya lihat ada yang kuliner akhirnya ke batik. Turunan kita dan kesetaraan *gender* itu ada program P2SS ada PKK, rintisan usaha, gerakan sayang ibu, anti kekerasan, persamaan gender, kampung ramah anak seperti itu. Jadi memang semuanya itu diarahkan untuk bagaimana ke persamaan dan kesetaraangender dan tidak perkara mudah.”

Kelima, terkait perlindungan terhadap anak, misal dalam hal kesehatan reproduksi dan perlindungan dari kekerasan seksual, implementasi dari pemerintah masih kurang. Perlu sosialisasi ke semua masyarakat, dengan menggunakan metode sosialisasi yang ramah, dan nyaman bagi anak dan masyarakat. Hal ini dikarenakan anak cenderung malu untuk membuka apa yang telah terjadi, sementara komunikasi orangtua dengan anak juga susah. Demikian juga yang dialami dengan para pencari data, kesadaran untuk tahu masih sangat minim. Sosialisasi hendaknya dilakukan dengan metode yang ramah dan nyaman bagi masyarakat. Sudah ada perda, tetapi belum sampai pada perlindungan di tingkat desa.

Terkait dengan hambatan di dalam masyarakat sendiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, adanya hambatan dari lingkungan sekitar perempuan guna mendapatkan dukungan bagi perlindungan perlindungan. Lingkungan ini mencakup keluarga, tetangga, bahkan RT dan RW setempat. Secara kultural, ada rasa sungkan untuk asertif terhadap persoalan-persoalan yang merugikan perempuan, dengan alasan tidak enak dengan tetangga sendiri atau keluarga sendiri. Misalnya, dalam kasus narkoba. Mitra Keluarga sudah merujuk korban narkoba, namun pada pelaporan masih sering

susah sebab terkait dengan hukum dan pendekatan kader mitra keluarga juga cukup susah (BKR mungkin menjadi solusi). Informan mengatakan,

“Kalau masalah narkoba kita takut, dan ini yang ditinggalkan ini punya anak, bagaimana kita merangkul dia. Bagaimana menarik dia untuk gabung ke masyarakat.”

Kedua, kekerasan pada perempuan seringkali tidak dilaporkan sebab korban juga takut melapor, tetangga dan saudara juga takut melapor sebab takut dimusuhi oleh pelaku. Sehingga banyak kasus kekerasan perempuan yang tidak tertangani. Saat ada masalah dan akan dilaporkan, namun ketua RT, RW terkadang masih saudara sehingga sering ada pembelaan pada pelaku. Korban kekerasan sering tidak melapor karena ada budaya agama yang terkait AIB keluarga tidak boleh dilaporkan pada yang lain. Di masyarakat banyak terjadi kekerasan khususnya pada perempuan lemah yang suaminya berpenghasilan rendah lalu melampiaskan amarah pada anaknya, kepedulian masyarakat baik tetangga dan lingkungan juga kurang. Informan menjelaskan,

“Di KUHP bagi yang melihat wajib membantu korban, di masyarakat, kalau melapor justru dia dimusuhi pelaku, banyak ekrasan terjadi dan tidak terlapor tidak tertangani dan mereka menganggap kekerasan itu tidak perlu tahu, yang kami rasakan selaku petugas pelayanan, dari korban sendiri tertutup, lingkungan tetangga malah takut, bisa memusuhi tetangga.”

Ketiga, perempuan sendiri belum paham mengenai hak yang mereka miliki, misal terkait pengembangan diri sendiri maupun perlindungan diri sendiri terhadap tindak kekerasan. Seorang informan dari sebuah Yayasan Kristen menjelaskan, masih banyak perempuan yang tidak yakin dengan potensinya. Menurutnya,

"Umumnya itu dia memahami kodratnya hanya di *perumahtangga* aja. Jadi dia mau mengembangkan talentanya, dia itu seperti ragu-ragu, apa kurang *pede gitu lho*."

Budaya Jawa juga masih menghalangi perempuan untuk sadar terhadap haknya untuk bebas dari kekerasan. Informan menjelaskan,

"Warga Negara Indonesia belum tahu persis haknya, harus lapor siapa takut, kalau dia tahu hanya dia pasti berani, penyuluhan mengenai hukum kurang apalagi di lingkungan kampung."

Tidak hanya sampai pada kemampuan dan keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan, kesadaran akan hak juga perlu dikuatkan sampai pada level pengelolaan diri pasca-pelaporan. Tidak hanya perlu fasilitasi perlindungan hukum dan pendampingan psikologis, perempuan korban kekerasan juga perlu pemberdayaan ekonomi. Adanya pendampingan ekonomi akan membantu perempuan bertahan hidup selama suaminya menjalani hukuman karena melakukan kekerasan.

Salah seorang informan dari Bappeda menambahkan,

"Ya mungkin itu ya, pemahaman terkait dengan hak anak, itu juga masih menjadi catatan. Terus kemudian pemahaman mereka terhadap apa *sih* yang disebut dengan kekerasan, terhadap perempuan, maupun terhadap anak itu dalam petik kemudian biasanya kalau kekerasan dalam rumah tangga itu *kan* masalah privat ya, *nah* itu mereka masih menganggap ketika itu masalah privat ya harus diselesaikan secara privat. Sebenarnya itu benar, tapi kemudian ketika kekerasannya sudah parah sekali mungkin, sudah secara fisik *gitu*, ya itu kan harus didampingi. *Nah* itu yang memang belum terlalu terbuka, walau secara berjenjang di level masyarakat sudah - kader itu sudah lumayan bagus *kok*."

Keempat, antar anggota keluarga juga sering tidak bisa saling melindungi. Dalam satu keluarga yang perokok berat misalnya, anak dan istri sering menjadi korban yang tidak diperhatikan. Sedangkan suami tidak sadar jika merokok merugikan keluarga baik dari segi kesehatan maupun keuangan keluarga. Perlu juga ada indikator penerima program bagi kepala keluarga yang merokok, mereka harus disadarkan dahulu baru program diberikan.

Seorang informan menjelaskan,

“Sangat merugikan tapi dianggap biasa, misalnya bapak perokok berat, otomatis istri anak akan terpapar zat yang merugikannya. Sebagai perokok pasif. Sementara bapaknya itu tidak merasa akan merugikan orang lain. Satu kesehatan, konsumsi anggaran harusnya untuk pokok tapi dianggarkan untuk hal yang tidak penting. Yang seperti itu harusnya tidak pantas mendapat bantuan. karena akan dibelanjakan untuk rokok, sasaran langsung untuk warga itu harus diingatkan. Itu yang harus disiapkan adalah anak-anaknya bahwa merokok merusak diri hakekatnya.”

Kelima, meski program pemberdayaan itu penting, yang tidak kalah penting namun belum banyak mendapat perhatian adalah pendidikan pengasuhan anak bagi ibu-ibu muda. Dalam kasus pelecehan seksual pada anak misalnya, banyak sekali pengetahuan tentang pelecehan seksual pada anak yang kurang di antara ibu muda. Padahal, risiko pelecehan dapat berasal dari perilaku orang-orang sekitar lingkungan anak-anaknya. Informan menjelaskan,

“Orangtua tidak mengetahui anaknya kena pelecehan seksual karena kurangnya pengetahuan seksual. Ketika anak ditiptikan orang lain, ada yang *ngelus-elus* dengan maksud lain dan orang tua tidak paham.”

5.3. Perbaikan yang Diperlukan dalam Program

Pemberdayaan Perempuan

Terkait dengan berbagai isu paling krusial dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, para informan juga memberikan pendapat mengenai poin-poin perbaikan yang bisa dilakukan. Perbaikan yang diusulkan adalah sebagai berikut.

Pertama, melakukan pendidikan kritis. Perempuan masih terpaku pada budaya patriarki jadi takut melakukan segala hal. Perlu dilakukan penyadaran pada perempuan agar berani bicara. Penyadaran untuk menyelesaikan persoalan dari perempuan tersebut. Sebagai penguat, perlu dilakukan penyadaran pada laki-laki (melalui gerakan laki-laki baru). Ketika memberdayakan perempuan, juga perlu mendidik suami agar terjadi kesepahaman pemikiran. Ketika masih berpegangan pada dalil agama juga harus diluruskan pemahamannya karena masalah utamanya hambatan terjadi bila dikaitkan dengan dalil agama. Materi bisa diselipkan di khotbah Jumat untuk mendorong kesadaran laki-laki. Pendidikan dan pelatihan untuk suami dan istri, suami istri duduk bersama untuk mendapat pemahaman tentang gender.

Kedua, semua kegiatan harus mendapat dukungan penuh sampai level pengurus RT dan RW, juga kelurahan. Pemangku masyarakat di tingkat lokal harus aktif dalam mengawal program dan memastikan pendanaan. Relawan tidak bisa berjalan sendiri. Ketua RT dan RW di beberapa daerah masih terlalu muda dan istri mereka tidak semuanya terlibat dalam organisasi kemasyarakatan misalnya PKK. Padahal, banyak program masuknya melalui PKK. Jika ketua RT atau RW tidak membangun komunikasi dengan PKK

komunikasi tentu akan sulit. Di samping mendapat dukungan penuh sampai level RT/RW, program-program tersebut juga harus melibatkan lingkup RT. Bagaimanapun juga, yang paling dekat dengan warga adalah lembaga RT. Bantuan pemerintah yang berupa ATK (sebab di aturan harus berwujud alat tulis) justru sering menumpuk di tingkat RT dan RW, mengindikasikan identifikasi kebutuhan di level RT/RW tidak maksimal. Harus ada pemahaman holistik terhadap permasalahan masyarakat bagi pemangku masyarakat mulai tingkat RT, RW, dan pemerintah kelurahan.

Ketiga, perlunya memperkuat aspek transparansi yang mencakup baik pendata di tingkat RT/RW, pelaksana program, dan penerima program. Pendataan dari BPS melalui ketua RT sering tidak obyektif karena adanya hubungan saudara dan lain-lain. Di sisi lain, perlu mendorong pegiat sosial yang amanah, transparan pada masyarakat dan manajemen keuangan yang baik dan amanah dalam pelaksanaan program pemerintah. Petugas pendamping juga harus benar-benar menguasai permasalahan sampai level bawah sehingga program tidak hanya menghasilkan kesejahteraan semu. Hal yang sama mesti ditekankan kepada penerima manfaat program. Kadang, program tidak efektif disebabkan, pertama, adanya persepsi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Kedua, bantuan tidak digunakan sesuai dengan tujuan program (kadang dipentingkan untuk kebutuhan anak atau yang lain yang tidak sesuai program). Perlu adanya pendampingan lanjutan dan kontrol program.

Keempat, program pemerintah sebenarnya sudah banyak, ada yang sesuai ada yang tidak. Kontrol dan evaluasi program harus dilakukan. Sebagai contoh, tambahan modal harusnya digunakan membeli peralatan namun hanya dimintakan nota kosong untuk SPJ

dan tidak ada kesesuaian antara peruntukan anggaran dan realisasi penggunaannya. Pemberian bantuan pada warga perlu ada pendampingan dan evaluasi. Sejak awal perlu dipahami mengenai cara berpikir masyarakat, jangan sampai menjadi masyarakat yang hanya mengharapkan program saja (tidak mandiri), dan niat baik pemberi program. Pendata penerima program harus memahami bahwa penerima tidak hanya keluarga yang kurang mampu, pendata juga harus melihat karakter calon penerima program tersebut. Program pemerintah sudah banyak, namun yang perlu diperhatikan adalah aspek kejujuran baik penerima maupun pemberi anggaran/pelaksana program. Kesungguhan/niat dan kejujuran menjadi kunci.

Informan menambahkan, dana dan program baik dari Kota, Provinsi, maupun Pusat sudah banyak. Namun, kontrol program yang belum berjalan menyebabkan kelanjutan program tidak berhasil, untuk itu diperlukan ada kontrol kejujuran penerima program. Karakter masyarakat yang tidak terbentuk dengan baik, baik itu pada masyarakat yang paham program atau yang tidak, mengakibatkan program tidak berjalan dengan baik (adanya penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan nota kosong dan lain-lain). Terkait dengan ini, Paluma Nusantara yang fokus pada pendampingan usaha kecil membenarkan, kadang terjadi kasus kemacetan dana *microfinance* akibat rendahnya keahlian pengelolaan keuangan. Informan dari Paluma Nusantara menjelaskan,

“Jadi ya, banyak program-program yang masuk, jadi pas kita masuk ke *microfinance*, itu banyak macetnya, dikarenakan *anu, wespinterngakalinya iku mau*. Ini diajukan untuk apa, apa, apa usahanya, *wes ketok* meyakinkan itu, tapi terus akhirnya itu, lari *enggak* mengembalikan pinjaman.”

Informan lain menilai, manajemen keuangan keluarga di masyarakat yang masih buruk, lebih besar pasak daripada tiang, menjadi penjas hambatan-hambatan dalam kegiatan program *microfinance* seperti ini. Buruknya manajemen keuangan keluarga ini juga mendasari penyalahgunaan anggaran/bantuan yang dikucurkan pemerintah. Informan menyarankan agar pemerintah maupun organisasi non-pemerintah tidak hanya memberi bantuan namun juga melakukan pelatihan bagi penerima bantuan. Penerima, pemberi, dan pendamping program harus melakukan evaluasi bersama, semacam audit bersama, terkait pelaksanaan program. Pendataan kebutuhan juga perlu dilakukan sehingga program sesuai.

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh informan dari Paluma Nusantara. Menurutnya, sebenarnya ketersediaan dana bukan kendala besar, yang menjadi kendala adalah kemampuan pengelolaannya. Ia menjelaskan,

“Sebenarnya pemerintah itu punya andil besar ya, kalau disana anggaran pasti setiap tahun rutin ada. Jadi sebenarnya anggaran itu tidak terkendala. *Nah* mungkin ada sinergi, ketika implementasi di lapangan mereka tidak mampu, tapi ketika ada lembaga, LSM *gitu kan* cari donor, *nah* mungkin itu bisa di sinkronkan, jadi ketika ini punya duit, kita punya sumber dayanya, ya itu *di-klikkan*.”

Sinkronisasi inilah yang menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Terkait dengan ini, informan dari Bappeda mengatakan, meski penting, tetapi praktiknya mendesain evaluasi bukan hal mudah. Menurutnya,

“Saya itu masih bingung kalau evaluasi ke lapangan, terus apanya yang mau dilihat itu *loh*. Perempuan itu *kan* sulit juga. Jadi PUG itu karena cuma strategi, yang

bisa kami lakukan adalah evaluasi terhadap strategi itu sudah seberapa jauh dilaksanakan. Kalau ke lapangan, apakah kami harus tanya perempuan satu per satu, atau metode apa, masih belum ya. Karena strategi itu sifatnya kan lebih makro *gitu loh*. Tidak terus kalau ke lapangan –kalau fisik kan gampang, tinjau ke lapangan, *oh* sudah jadi. Kalau yang sifatnya strategi ini apakah, saya masih belum ini. Strategi terus metode yang akan dilakukan apakah harus survei, terus menjangkau keluhan masyarakat, itu paling juga *sample* lagi. Kembali lagi ke situ. Kenapa energi kami bagus ya sensus. Tapi butuh anggaran yang besar. Menurut kami lebih bagus itu langsung diselesaikan itu yang paling penting. Daripada menganalisis. Banyak yang melakukan itu. Paling tidak gambaran itu sudah memberikan cerminan, kita harus punya arah yang jelas. Paling nggak itu menurut saya. Jadi dengan berbagai keterbatasan itu energi kami akan lebih ke situ *kayaknya*. Jadi nggak langsung ke itu. Kenapa harus membuang uang lebih untuk menganalisis? Lebih baik langsung intervensi hal-hal yang bermasalah ini? Masalah sudah banyak, kenapa harus ke dalam lagi? Langsung saja, *mbok* ini *toh*. Saya lebih ke situ. Lebih dipangkas, ayo kita intervensi ini ini. Mungkin ada titik lemahnya. Seperti kayak Jokowi. Kerja, kerja, kerja. Orang banyak mencerca, hanya *waton* kerja tanpa ada ranah. Ya tidak. Kerja juga ada data kok. Masalah juga ada *kok* yang dibawa. Saya kira *kok nggak* masalah. *Nggak* usah terlalu dalam. Nanti akan kembali pada saat duduk bersama. Apalagi yang mau kita lakukan? Jadi apapun yang dilakukan akan kesitu. Ya sudah langsung aja intervensi. Itu akan lebih berdampak bagi kami. Masyarakat jenuh *loh*. Survei apa lagi? Mau ditanyakan apa lagi? Banyak masyarakat sudah jenuh. Itu mungkin kami begitu. Karena sekarang menurut kami ada kejenuhan begitu. Sudahlah, kami harus intervensi. Cukuplah rambu-rambu ini. Sudah cukup.”

Kelima, sebagaimana pendapat beberapa pegiat PKK, pegiat sosial seperti PKK baiknya diberikan uang stimulan saja bulanan

daripada melaporkan pengeluaran yang justru seringkali dibuat-buat. Program pemerintah seringkali meminta LPJ dahulu sebelum anggaran diberikan pada masyarakat. Sistem seperti ini mengakibatkan masyarakat melakukan kecurangan dalam penggunaan anggaran dan pelaporan. Evaluasi pada program harus diperkuat khususnya pada kebenaran penggunaan anggaran dan pelaporan. Namun, informan dari Bappeda menjelaskan, hal ini terbentur dengan aturan. Menurutnya,

“PERMENDAGRI 32 Tentang Hibah, kemudian PP 2 Tentang Hibah juga, bagaimana hibah itu tidak boleh sembarangan diberikan. Harus berbadan hukum.” Hal ini menyebabkan bantuan kepada PKK yang notabene bentuknya hibah tidak bisa diwujudkan dalam bentuk uang tunai.

Keenam, penguatan perempuan harus sampai pada level RT/RW sebab kelembagaan tersebut paling dekat dengan keluarga, sebagaimana diutarakan para pegiat PKK di Kota Yogyakarta. Menurut mereka, Musrenbang harus mengakomodir program-program bagi perempuan, namun sejauh ini di Musrenbang di tingkat RT dan RW tidak terlibat dalam Musrenbang dan tidak bisa menikmati program. Kebanyakan ketua RT/RW adalah bapak-bapak, sehingga masukan pada Musrenbang lebih pada aspek fisik. Masukan Musrenbang dari tingkat RW dijaring oleh kelurahan pada bulan Januari. Informan dari KPMP mengkonfirmasi,

“Kalau isu-isunya sosial budaya jelas ya karena kita tahu sendiri Jogja itu kota patriarkis, dalam hal pengambilan keputusan laki-laki memang lebih mendominasi entah di Musrenbang. Terus juga kalau di Musrenbang sendiri memang bapak-bapak memang lebih banyak mendominasi walaupun mungkin ibu-ibu juga ada yang mendominasi tapi masih berputar pada kegiatan perempuan saja tidak melihat bahwa ketika

kita membuat MCK pun juga harus ada sentuhan perempuan. Jadi mereka masih melihat perempuan itu sama dengan PKK. Jadi kegiatan-kegiatan yang rutinitas senam lansia dan sebagainya *tuh* yang mereka ajukan. Kita mengharapkan di Musrenbang itu ibu-ibu menyentuh kalau jalan jangan banyak yang peruntukannya seperti itu. Untuk perempuan seperti apa. MCK yang layak yang bisa untuk berbasis perempuan seperti apa. *Kan* yang menggunakan sehari-hari itu *kan* ibu-ibu *nah* itu mereka tidak mau masuk ke situ. Maunya kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan perempuan itu ya PKK. Masih mungkin kita pelan-pelan lah agak lama juga kita membuka seperti itu.”

Hambatan-hambatan teknis yang lain, di antaranya seperti waktu pelaksanaan Musrenbang yang tidak sensitif terhadap hambatan kaum perempuan. Sebagaimana diutarakan para informan yang mewakili PKK tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta, pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan pada malam hari juga tidak memungkinkan bagi keikutsertaan perempuan.

Peserta Musrenbang di tingkat kelurahan kurang melibatkan peserta perempuan ditingkat RT dan RW padahal kebutuhan masyarakat hanya dapat diketahui dari level bawah (RT/RW). Perlu adanya pemetaan masalah di tingkat lokal RT/RW (pra-Musrenbang) sebagai masukan pada Musrenbang kelurahan. Perempuan peserta Musrenbang sendiri juga perlu didorong untuk berani mengutarakan kebutuhan perempuan supaya anggaran APBD tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik. Dengan demikian, kehadirannya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu memberikan wacana yang lain yang selama ini dominan, tetapi kurang menyentuh persoalan mendasar.

Salah seorang pegiat LSM memberikan contoh,

“Isu masalah KDRT, pernikahan dini, ODHA, meningkat tajam pada 2015. Ada 817 (kasus) hingga Maret. Di tingkat kelurahan sebenarnya telah ada lembaga, misalnya Mitra Remaja, untuk kesehatan reproduksi juga ada di tingkat kelurahan. Cuma bagaimana kita meningkatkan kinerjanya, karena masyarakat salah stigma tentang gender. Penyadaran masyarakat bahwa masalah ini tanggung jawab bersama (ibu, anak, dan bapak) perlu dilakukan. Di Kota, dana yang bisa dimanfaatkan adalah *blockgrant*, P2KP ada namun tidak optimal. Bagaimana kita bisa menggerakkan agar pembagian prosentase banyak yang masalah sosial. Selama ini hanya 10-20 persen yang 90 persen untuk fisik. Dana bisa untuk mendukung aktivitas dan ada info ada dana untuk masyarakat, karena selama ini tertutup. Informasi langsung ke tingkat bawah.”

Beberapa informan menekankan, pra-Musrenbang sebaiknya melibatkan ketua PKK RT, ketua PKK RW, ditingkat kelurahan melibatkan ketua Pokja1 sampai Pokja 4. Tim perumus sesudah Musrenbang keterwakilan perempuan minim (terkadang hanya 2 perempuan) seharusnya sesuai dengan kuota, yaitu minimal 30 persen. Semua tingkat kelembagaan lokal dimasyarakat baik di tingkat RT, RW dan kelurahan harus melibatkan perempuan. Sayangnya, yang terjadi selama ini pemilihan ketua RT, RW, lurah kurang melibatkan perempuan, PKK, dan remaja. Di samping itu, suami biasanya melarang perempuan untuk berorganisasi. Jadi, perempuan harus menunjukkan bahwa perempuan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat.

Informan dari Bappeda mengkonfirmasi kelemahan keterlibatan perempuan, termasuk di dalam Musrenbang. Menurutnya,

“Kalau menurut saya, secara partisipasinya sudah bagus dalam hal apapun, cuma kita perlu mendorong

dari sisi kualitasnya. Jadi misalkan dalam merencanakan, dalam Musrenbang, partisipasinya *udah* bagus. Datang, hadir, tetapi belum semua yang hadir itu secara kualitas dia ungkapkan. Saya yakin sebenarnya, kalau ngobrol *gitu*, si ibu itu pintar *gitu loh*. Tahu mau begini begini, tapi mungkin terbentur ketakutan, saya kalau *gini* bener *nggak* ya."

Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah, terlepas dari persoalan dan akses perempuan di Musrenbang, penentuan anggaran di dalam pemerintahan terikat dengan format yang baku. Informan dari Bappeda mengingatkan,

"Kalau yang namanya program dari kegiatan itu, kalau saya bilang, apapun makanannya minumnya teh botol sosro, saya selalu bilang *gitu*. Karena apapun program kegiatannya formatnya tetap seperti itu. Itu sudah baku, jadi saya masih *pake* yang UU 32 dulu, saya belum pakai UU yang 23 karena baru berlaku mungkin tahun depan. Di Undang-undang 32 itu format baku itu *floating* anggaran itu adalah dengan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Jadi semua itu kan harus terangkan. *Kan* tidak mungkin kita hanya menganggarkan urusan pemberdayaan perempuan saja, perlindungan anak saja, tidak. *Nonsense* itu kami lakukan. Jadi bagaimana seluruh APBD kita terdistribusi secara proporsional, saya tidak bilang merata, secara proporsional dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, *gitukan*. Di sana ada urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, statistik dan sebagainya sampai pertanian dsb itu semua harus terangkan. Tapi kemudian secara proporsional itu adalah secara kebutuhan di masing-masing sektor itu. Pendidikan itu patokannya 20%, minimal dari penganggaran."

Ia menambahkan,

"Bahwa kita melakukan perbaikan program itu tidak *cash money*, tapi adalah dalam bentuk program. Turun ke bawah ke masyarakat dalam bentuk program. Tapi,

masyarakatnya mintanya *cash money*. Belum kalau tahu masyarakat yang nakal, gali dan sebagainya. *Cash money*-nya sudah berubah wujud *kan*. Itu kontrol dari institusinya juga sulit. Tapi begitu masuknya ke dalam bentuk program kegiatan, *kan* jadi tanggung jawab SKPD untuk mengontrol program kegiatan itu.”

Dengan demikian, isunya bukan sekedar menekankan ‘perempuan’ sebagai segmen dalam pengertian promosi kesetaraan gender dalam kebijakan, tetapi lebih penting adalah sebagai perspektif. Dalam diskusi kebijakan publik, ini yang disebut dengan pengarusutamaan gender, gender tidak melulu dimaknai secara harfiah sebagai kehadiran ‘perempuan’ dalam mata anggaran, tetapi sebagai perspektif yang memungkinkan kebijakan sensitif terhadap kompleksitas kebutuhan perempuan dan anak-anak.



BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Bab ini menyimpulkan poin-poin yang sudah didiskusikan pada bab-bab terdahulu. Dalam penulisan kesimpulan, bab ini mencoba mengulas kembali temuan pada bab-bab sebelumnya, dan menganalisis aspek-aspek krusial dalam pemberdayaan perempuan guna mempermudah peta penelusuran dan pelaksanaan program ke depan. Bab ini dibagi menjadi empat sub-bab, meliputi prioritas isu, prioritas pendekatan, prioritas desain pengelolaan program, dan penutup, yaitu agenda riset ke depan. Telaah pada bab sebelumnya yang menunjukkan beragam isu, hambatan dan rekomendasi dari *stakeholders*, yang kemudian disarikan sebagai ulasan dan analisis dalam bab ini, diuraikan sebagai rekomendasi guna menjawab isu dan hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan.

Rekomendasi yang dipaparkan dalam bab ini, selain berdasarkan pada telaah bab-bab sebelumnya, juga memperhatikan situasi dan hambatan, sekaligus berbagai usulan dari *stakeholders*. Analisis situasi, sebagaimana dipaparkan dalam bab 2 menjadi basis dalam melihat kondisi kesetaraan sekaligus ketimpangan gender dalam berbagai sektor di kota Yogyakarta. Sementara itu, diskusi temuan *baseline survey* dan wawancara mendalam terkait peta potensi pemberdayaan perempuan baik yang dilakukan oleh NGOs, Dinas, PKK maupun pusat studi universitas menjadi basis

penelusuran aspek-aspek yang telah tercakup dan belum tercakup dalam program pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta.

6. 1. Prioritas Isu Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan oleh berbagai lembaga pemerintah dan nonpemerintah telah menysasar berbagai bidang antara lain ekonomi, politik, sosial, kesehatan, pendidikan, perlindungan pekerja formal dan informal, perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan perlindungan anak-anak dan remaja perempuan, dengan corak *community development* maupun advokasi. Program-program yang bercorak *community development* antara lain berupa kredit mikro dan pelatihan ketrampilan kerja. Ini semua ditujukan untuk menjawab kebutuhan praktis yakni akses ke pekerjaan, pendapatan, dan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, program yang bersifat advokasi umumnya berwujud pelatihan yang bertujuan memberikan pendidikan politik dan kebijakan, kapasitas berorganisasi, dengan target mengubah kebijakan. Yang penting untuk menjadi perhatian, bidang politik masih sangat minim disentuh sebagaimana ditunjukkan baseline survey yang hanya 9 persen. Padahal, bidang politik merupakan wahana utama mencapai kebutuhan strategis, dalam hal ini mempengaruhi kebijakan agar berpihak pada perempuan. Penjelasan lebih detail aspek per aspek adalah sebagai berikut.

Pertama, aspek ekonomi. Pemberdayaan ekonomi, baik yang dilakukan oleh pemerintah melalui Disperindakop maupun nonpemerintah melalui LSM, dapat dikatakan telah mencakup aspek-aspek penting. Pendampingan dan bantuan modal melalui

microfinance bukan lagi menjadi hal yang sulit diakses oleh perempuan maupun kelompok perempuan di Kota Yogyakarta. Tentu saja, beberapa kelemahan, misalnya dalam hal kontrol dan *monitoring* masih menjadi perhatian lembaga-lembaga terkait. Pemberdayaan yang menysasar individu atau kelompok spesifik, misalnya korban kekerasan dalam rumah tangga, memang belum banyak disentuh. Namun, melihat penuturan informan dari PKK, instansi pemerintah dan LSM, dapat dikatakan bahwa aspek ekonomi sudah banyak tercakup. Poin utama perbaikan, mungkin terletak pada bagaimana program itu didesain dan dievaluasi.

Kedua, aspek politik. Meskipun Kota Yogyakarta termasuk daerah dengan tingkat keterwakilan kuota perempuan tertinggi di Indonesia, yaitu 25 persen, namun seberapa jauh ini berdampak pada penyaluran aspirasi perempuan belum jelas. Hal ini dikarenakan, meski terdapat berbagai LSM perempuan di Kota Yogyakarta, yang fokus pada pendidikan politik perempuan masih sangat terbatas.

Bahkan, dalam wawancara, isu ini tidak banyak disentuh oleh para informan, baik yang berasal dari PKK, maupun LSM. PKK, misalnya, memang menyadari bahwa mereka sering diabaikan di dalam Musrenbang, baik tingkat RT, kelurahan maupun kecamatan. Tetapi, di sisi lain, mereka juga belum melihat potensi besar penyaluran aspirasi perempuan melalui wakil rakyat di DPRD Kota. Pendidikan politik kemudian dapat dikatakan menjadi celah, sekaligus kesempatan, baik bagi KPMP, dan kantor instansi pemerintah, juga lembaga LSM untuk menggiatkan kegiatan pemberdayaan perempuan mereka. Terlebih, sudah ada KPI di DIY. Ini tentu saja merupakan potensi untuk bekerjasama.

Ketiga, isu kesehatan, sebagaimana dijelaskan para informan, sudah cukup baik tertangani. Kota Yogyakarta termasuk kota dengan tingkat kematian ibu dan anak terendah di Propinsi DIY. Namun demikian, bukan berarti bahwa Kota Yogyakarta bebas dari risiko kesehatan yang terkait secara khusus dengan kaum perempuan. Sebagaimana para informan menjelaskan, karena terlalu fokus pada balita dan lansia, kalangan remaja perempuan seringkali terlewat. Padahal, mereka sangat rentan terhadap kesehatan, utamanya yang terkait dengan kesehatan reproduksi.

Kemajuan teknologi, akses sosial media, kualitas relasi dengan orangtua yang makin lama makin menurun, diyakini sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan kepedulian remaja perempuan terhadap hak-hak kesehatan reproduksi mereka. Memberikan pengetahuan mengenai hal ini, termasuk di sekolah-sekolah, akan sangat membantu.

Keempat, perlindungan terhadap perempuan dapat dikatakan sudah cukup baik direspon oleh pemerintah kota, khususnya melalui KPMP. Namun demikian, terdapat beberapa isu khas yang sangat terkait dengan karakter urban masyarakat Kota Yogyakarta yang mendesak perhatian pemerintah, terkait dengan KDRT. Selama ini, KDRT masih dipahami sebagai kekerasan terhadap perempuan dewasa, dalam hal ini istri, atau ibu rumah tangga, di samping laki-laki dewasa, sebagai suami maupun kepala rumah tangga. Elemen lain dalam keluarga, misalnya anak-anak, khususnya anak perempuan, belum banyak disentuh.

Sebagaimana dijelaskan di bagian terdahulu, anak dan remaja perempuan sangat rentan terhadap kekerasan dan kejahatan seksual, tidak hanya dari anggota keluarga terdekat, tetapi juga tetangga

maupun lingkungan sekitar. Tentu saja, ini tidak menafikan potensi kejahatan seksual terhadap anak dan remaja laki-laki. Sebagaimana informan dari PKK menjelaskan, isu ini sudah sangat meresahkan di masyarakat. Tetapi, perhatian masih sangat kurang, baik dari instansi pemerintah maupun LSM. Untuk itu, ke depan, fokus perlindungan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke depan perlu diperluas.

Terakhir, perlu juga memperhatikan perempuan pekerja informal. Informan dari LSM menyebutkan, pekerja informal ini bisa berasal dari luar wilayah Kota Yogyakarta, ataupun dalam wilayah Kota Yogyakarta, tetapi tidak terdata secara resmi, dan cenderung melakukan pekerjaan di rumah. Beberapa LSM sudah berupaya mencakup sektor ini, tetapi dukungan pemerintah lebih jauh kasih diperlukan.

6. 2. Prioritas Pendekatan (Strategi)

Beberapa pendekatan yang diaplikasikan oleh instansi pemerintah maupun LSM sangat menarik untuk dicermati, dan bisa mengisi satu sama lain, baik dari sisi pendanaan, penentuan penerima manfaat, maupun pelibatan laki-laki dalam pelaksanaan program. Sub-bab ini mendiskusikan pendekatan-pendekatan (strategi) yang diterapkan berbagai lembaga yang fokus pada program pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta.

6. 2. 1. Variasi Cakupan Penerima Manfaat

Dari sisi cakupan penerima manfaat, sebagian besar lembaga telah menyoar kelompok perempuan di Kota Yogyakarta. LSM dan universitas basis penerima manfaatnya adalah lintas geografis dan tidak merinci asal wilayah. Lingkupnya bahkan sampai wilayah di

luar Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY. Sementara itu, PKK adalah perempuan di wilayah yang terdefinisi semisal RT, RW atau kelurahan tertentu. Ini dikarenakan isu yang digarap oleh LSM dan universitas bersifat sektoral. Persoalan tumpang tindih program dan penerima manfaat penting dicari jalan keluarnya melalui peningkatan komunikasi, koordinasi dan sinergi. Bagaimana konkretnya? Lembaga seperti Yasanti telah membangun kelembagaan baru di luar yang sudah ada seperti PAPERJA. Jejaring berbagai pelaku pemberdayaan perempuan akan memperluas jangkauan kelompok penerima manfaat program. Ini, misalnya, bisa membantu SKPD yang selama ini menempuh jalur kelembagaan kelurahan/RT/RW yang berisiko menduplikasi atau *overlapping*.

6. 2. 2. Variasi Sumber Pendanaan.

LSM dan pusat studi universitas umumnya bergantung pada lembaga donor internasional. Tim penggerak PKK menjadi pelaksana program pemerintah berbagai level, serta menjadi mitra dari LSM dan CSR perusahaan. Di satu sisi, variasi ini menunjukkan potensi sumber pendanaan, tapi di sisi lain ada beberapa konsekuensi. Seiring berkurangnya dana yang bersumber dari donor internasional, LSM penting mengembangkan sumber-sumber pembiayaan domestik. Untuk itu diperlukan strategi guna menjalin mitra pendanaan dengan pemerintah dan swasta. Di tengah masih kuatnya persepsi negatif terhadap LSM dari kalangan birokrasi, upaya-upaya untuk membangun rasa saling percaya atas kredibilitas dan itikad baik masing-masing kian mendesak. Di tengah aturan pengadaan barang dan jasa yang membatasi peran LSM menjadi pelaksana program pemerintah, relasi yang baik akan memungkinkan LSM dan

pemerintah mengupayakan peluang yang ada untuk bisa bekerjasama.

6. 2. 3. Pelibatan Laki-laki (Suami) dalam Program Pemberdayaan Perempuan

Gender merupakan isu yang sensitif, namun program pemberdayaan perempuan baik yang dilakukan pemerintah melalui KPMP dan instansi lain di jajaran pemerintah kota, maupun nonpemerintah, seperti NGO dan Ormas, telah terlihat cukup responsif dan diupayakan untuk dilaksanakan dengan strategi yang tepat. Dalam program pelatihan, KPMP misalnya, telah melibatkan anggota PKK di kecamatan-kecamatan di Kota Yogyakarta secara keseluruhan. Dalam pendampingan kegiatan usaha kecil, Paluma Nusantara juga berusaha melibatkan suami agar partisipasi istri dalam kegiatan juga mejadi kesepakatan bersama. Keterlibatan perempuan dalam usaha mikro, yang didesain sedemikian rupa agar tidak hanya sepihak dari sisi istri, ditujukan sebagai upaya antisipatif jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pasalnya, dalam pendampingan ini, berbagai pihak meliputi perempuan, rekan sesama penerima manfaat, dan NGO fasilitator, terlibat dalam persoalan hutang piutang dalam menjalankan usaha. Sebagai pihak yang tidak langsung merasakan manfaat, sekaligus terkena dampak dari kegiatan, suami, mewakili anggota keluarga mesti mendapat informasi dengan baik.

6. 2. 4. PKK sebagai Penerima Manfaat Inti

PKK merupakan pelaku utama pemberdayaan perempuan sebagaimana ditunjukkan *baseline survey*. Baik program

kementerian, dinas provinsi maupun dinas kabupaten PKK menjadi ujung tombak pelaksanaan. Dibanding aktor atau lembaga pelaku pemberdayaan perempuan lainnya, *baseline survey* menunjukkan, PKK memiliki bidang program paling banyak yakni enam yang mencakup politik, ekonomi, pendidikan, sosbud, keagamaan, dan kesehatan. Ini membuktikan PKK adalah institusi yang paling holistik dan cakupan kerjanya lintas sektoral. PKK juga semakin bermetamorfosis dari insitusi yang dibentuk oleh negara Orde Baru sebagai sekedar saluran kebijakan dan program dari atas (*top down*), menjadi institusi yang mewadahi prakarsa masyarakat. Di samping berpengalaman dalam melaksanakan program berbagai sektor, PKK juga mampu menyelami persoalan lingkungannya (*spatial*). Pendek kata, PKK adalah aktor pemberdayaan terdepan, dan terdalam pengetahuannya tentang problem dan potensi masyarakat. Konsekuensinya, pelibatan PKK oleh para pihak di atas kelurahan harus semakin intensif. Ketika melakukan perencanaan program CSR, misalnya, perusahaan harus melibatkan PKK karena mereka memiliki pengetahuan mendalam masalah di lingkungannya sekaligus berpengalaman menjalankan aneka program sektoral. Implikasi dari sisi kajian, agenda riset selanjutnya penting untuk melihat lebih dalam bagaimana perkembangan peran PKK dalam pemberdayaan perempuan.

6. 3. Prioritas Desain Pengelolaan Program

6. 3. 1. Sinergi dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan

Telah ada inisiatif sinergi program terutama dalam hal implementasi. PALUMA Nusantara merupakan salah satu LSM yang telah bekerjasama dengan dinas di provinsi untuk melakukan pendampingan terhadap buruh tani perempuan. Namun demikian, masih diperlukan proses *engagement* yang lebih intensif sejak perencanaan program agar LSM tidak hanya menjadi seperti pelaksana program. Kendati Forum SKPD sering menjadi arena partisipasi LSM, harus kita akui forum ini sangat terbatas. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan wahana dimana LSM, PKK, universitas dan dinas bisa saling bertemu. *Pertama*, masing-masing pihak memiliki strategi, program, kegiatan yang relatif berbeda. Logika LSM, logika kampus, logika pemerintah, dan logika PKK memiliki keunggulan dan kelemahan. Sumber daya baik uang, SDM, desain program juga tidak ada yang sempurna. Alhasil, pertemuan dan keterlibatan berbagai pihak akan menghadirkan adanya saling berbagi dan saling belajar. *Kedua*, masalah pemberdayaan gender sangatlah kompleks. Jika bekerja sendiri, terbukti betapa masing-masing tidak memiliki kapasitas untuk sendirian menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Misalnya, ketika cakupan wilayah suatu program provinsi atau daerah sedemikian luas dan menyasar banyak penerima manfaat. Kerjasama antara pemerintah dengan sebuah LSM sudah tentu tak memadai. Ini akan berbeda jika ada relasi yang saling percaya, di suatu forum rutin, sehingga banyak pekerjaan sejatinya bisa saling didistribusikan.

6. 3. 2. Penguatan Gender Mainstreaming di Level

Pemerintah Kota

Sisi Perspektif Kebijakan

Pemberdayaan perempuan penting dikembalikan ke hakikatnya yakni *mainstreaming gender*. Pemberdayaan perempuan sebagai visi, semangat, ruh melekat pada semua program; ia tidak selalu harus diwujudkan dalam program tersendiri dan dikelola oleh SKPD tersendiri. Ini sama dengan logika penanggulangan kemiskinan, yang mana ia bukanlah suatu program/kegiatan melainkan penajaman atau pengarusutamaan. Penanggulangan kemiskinan menjadi semangat program pembangunan infrastruktur oleh Dinas PU, pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan, dan seterusnya. Kembali ke soal pemberdayaan perempuan, maka *mainstreaming gender* dalam rangka membuat perempuan berdaya adalah bahwa di berbagai program yang dilakukan SKPD-SKPD, kepentingan perempuan harus terakomodasi. Di bagian analisis situasi sebelumnya, contohnya, perempuan perlu mendapat perlakuan khusus dalam program pendidikan mengingat aksesnya yang masih terbatas. Makin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil persentase perempuan dibanding laki-laki terkait akses. Pendidikan tentunya merupakan wilayah SKPD yang tupoksinya adalah mengurus pendidikan. Karena itu perlu ada SKPD yang berperan sebagai *leading* koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bukan menjadi “juri” atau “pengawas” melainkan memfasilitasi dan memastikan agar suatu SKPD sektoral seperti pendidikan menyadari dan mengadopsi kebijakan yang pro-perempuan. Di masa mendatang, berkaitan dengan tupoksi, KPMP akan sangat strategis jika memainkan peran *leading* koordinasi, monitoring dan evaluasi. Jika

dianalogikan, KPMP seperti Bappeda. Hanya saja, bila Bappeda bersifat umum KPMP (dalam rumusan badan maupun yang lainnya) lebih terfokus isu pemberdayaan perempuan. Kekhususan ini sejalan dengan semangat afirmasi mengingat posisi perempuan yang telah sekian lama marjinal.

Sisi Koordinasi

Koordinasi sejauh ini cukup berhasil dilaksanakan oleh KPMP. Komunikasi personal yang baik menjadi kunci agar tumpang tindih program dan sasaran tidak terjadi. Pembagian tupoksi antar SKPD tampaknya masih kurang definitif sehingga terjadi tumpang tindih program dan sasaran. Sejauh ini, KPMP cukup berhasil membangun komunikasi dengan SKPD lainnya guna menghindari hal tersebut. Selain itu, pengawalan implementasi ke bawah oleh SKPD juga kurang. Sebaliknya, ketika secara personal tidak saling mengenal dengan baik, kesepahaman relatif lebih sukar dibangun. Kajian ini merekomendasikan, ketika misalnya KPMP dijadikan SKPD *leading sector* untuk pemberdayaan perempuan, maka tumpang tindih program akan lebih mudah dimitigasi. Bersama-sama dengan Bappeda sebagai *leading sector* perencanaan, KPMP bisa didesain untuk mengawal substansi pemberdayaan perempuan di semua SKPD. Riset lapangan menunjukkan bahwa pengawalan implementasi merupakan masalah tersendiri. Dari sisi perencanaan, analisis *gender gap* telah dilakukan. Berbagai *form* telah diisi. Yang diperlukan adalah adanya SKPD mendukung SKPD melalui koordinasi berkala guna memastikan substansi program tercapai. Koordinasi yang rutin memungkinkan deteksi dini ketika terjadi persoalan dalam implementasi. Persoalan yang tidak hanya menjadi

beban SKPD tertentu, yang jika gagal direspon kemudian menjadi rapor merah SKPD tersebut.

Sisi Program

Dari sisi program, penelitian ini menemukan bahwa pemberdayaan perempuan dari sisi program, anggaran, dan sektor yang disasar sebenarnya sudah banyak. Di sisi aspek kebutuhan praktis (pemenuhan kebutuhan dan pelayanan), yang penting adalah program-program yang menysasar pada lansia dan anak-anak. Diperlukan perubahan dalam desain program, pendekatan/strategi pelaksanaan agar program bisa dilaksanakan lebih efektif. Ini misalnya untuk merespon masalah kekerasan seksual pada anak, yang selama ini kurang optimal diatasi karena pendekatan program justru membuat anak-anak dan remaja korban malu atau enggan terbuka.

Sisi Kebutuhan Strategis

Di tataran kebutuhan strategis (penguatan kapasitas perempuan untuk terlibat dan berpengaruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, *monitoring-evaluasi* kebijakan/program), penting dilakukan upaya-upaya terobosan. Para narasumber dari PKK menyatakan bahwa akses mereka terhadap proses perencanaan dan pembuatan keputusan masih terbatas. Musrenbang masih didominasi oleh kepentingan laki-laki. Di sisi lain, kendala budaya membuat perempuan sulit bersuara. Penguatan peran PKK di level perencanaan kota juga penting. Dengan melihat situasi representasi politik di DPRD, tampak bahwa sejatinya ada potensi besar. Jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD

cukup signifikan. Sinergi arus bawah dari PKK, renstra dan renja SKPD yang berperspektif gender, serta para anggota dewan perempuan cukup strategis untuk mempengaruhi penganggaran.

Tawaran mengenai Policy Cluster atau Policy Communities

Guna menindaklanjuti rekomendasi *mainstreaming* gender, upaya menghindari tumpang tindih program dan sasaran, penguatan koordinasi dan sinergi serta pemenuhan kebutuhan strategis maka bagian ini menyarankan sebuah pendekatan yakni *policy cluster* atau *policy communities*. Sederhananya, koordinasi dan sinergi yang menyangkut aspek praktis (pemenuhan kebutuhan layanan melalui program pemberdayaan) dan strategis (peningkatan pengaruh perempuan dalam kebijakan dan politik) dilakukan setiap bidang terkait. Di setiap kluster bidang, semua pihak bekerjasama dan berbagi tugas guna memenuhi kebutuhan praktis dan politis tersebut.

6. 3. 3. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Program/ Kebijakan

Terakhir, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan di dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan adalah aspek monitoring dan evaluasi program. Sebagian besar informan menegaskan, kelemahan utama program pemerintah adalah dalam hal monitoring dan evaluasi. Rata-rata, informan, utamanya dari unsur PKK menjelaskan, pada dasarnya menyatakan program yang ditawarkan sudah cukup banyak, fasilitas dan dukungan pendanaan juga tidak kurang-kurang, akan tetapi yang menyebabkan program-program tersebut tidak optimal efektivitasnya adalah lemahnya

kontrol di dalam pelaksanaan, di samping isu koordinasi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Kontrol yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek pelaksanaan saja, tetapi juga kontrol terhadap para penerima manfaat, dan para pendukung pelaksanaan program di lapangan di level RT/RT, kelurahan dan kecamatan, juga para fasilitator. Mekanisme kontrol ini diperlukan untuk menjamin agar tiap-tiap orang yang terlibat dan tiap-tiap tahapan pelaksanaan program akuntabel, baik secara finansial maupun substansi (materi program pemberdayaan).

Tentu saja, sangat disadari bahwa, meskipun krusial, monitoring dan evaluasi bukan hal yang mudah dilakukan. Tidak seperti LSM, dimana monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan oleh lembaga independen, instansi pemerintah sangat terikat dengan peraturan yang ada di atasnya. Mekanisme monitoring dan evaluasi program pun sejauh ini hanya bisa dilakukan dengan mengikuti garis ketentuan pemerintah, yang menitikberatkan pada aspek finansial. Padahal, aspek finansial hanya merupakan satu dari sekian aspek dalam program pemberdayaan. Mendorong inovasi kebijakan terkait dengan monitoring dan evaluasi kemudian menjadi pekerjaan rumah ke depan.

6. 4. Agenda Penelitian ke Depan

Penelitian pemetaan program pemberdayaan perempuan ini masih mencakup hal-hal yang bersifat umum, mencakup isu, pendekatan (strategi) dan desain. Tentu saja, diperlukan kajian lebih lanjut, khususnya kajian wilayah per wilayah, baik di level kecamatan maupun kelurahan, agar gambaran tentang cakupan isu, pendekatan

in program pemberdayaan dapat diidentifikasi secara lebih
Pasalnya, meskipun secara general terdapat persoalan
ngan gender di tiap wilayah di Kota Yogyakarta,
anapun juga tiap-tiap wilayah ini memiliki karakter dan
an yang berbeda satu sama lain. Di samping itu, wilayah-
h di level bawah ini yang secara harian bersentuhan dengan
detail persoalan perempuan dan ketimpangan gender.

Dalam kaitannya dengan kebutuhan penelitian ke depan,
penting untuk fokus kepada organisasi PKK, baik di level
W, kelurahan maupun kecamatan. Berdasarkan pengalaman
litian di lapangan selama kurang lebih tiga bulan ini, PKK sangat
terlihat sebagai lembaga yang paling memahami kompleksitas
solan perempuan di akar rumput di berbagai sektor. Untuk itu,
as pada kajian terhadap PKK sangat disarankan.

Hanya saja, diakui, PKK memang tidak memiliki kapasitas
vokasi sebagaimana LSM, juga kapasitas riset sebagaimana pusat
y di universitas, di samping memang advokasi dan kajian bukan
erupakan tugas utama PKK. Namun demikian, bukan berarti bahwa
SM dan pusat studi di kampus-kampus tidak memahami persoalan-
ersoalan perempuan sehari-hari. Sifat dan cakupan pemberdayaan
SM yang cenderung sektoral dan sangat spesifik sasarannya,
demikian juga dengan sifat dan cakupan pusat studi yang lebih
banyak bergerak di tataran kajian, tidak cukup untuk mengatasi
persoalan pemberdayaan perempuan yang cakupannya sangat
kompleks dan luas. Belum lagi menyebut persoalan keterbatasan
sumber daya LSM dan pusat studi yang tidak memungkinkan
menangani persoalan di semua sektor dan wilayah. Karakteristik
advokasi didalam LSM dan kajian didalam pusat studi akan sangat

dan desain program pemberdayaan dapat diidentifikasi secara lebih detail. Pasalnya, meskipun secara general terdapat persoalan ketimpangan gender di tiap wilayah di Kota Yogyakarta, bagaimanapun juga tiap-tiap wilayah ini memiliki karakter dan persoalan yang berbeda satu sama lain. Di samping itu, wilayah-wilayah di level bawah ini yang secara harian bersentuhan dengan detail-detail persoalan perempuan dan ketimpangan gender.

Dalam kaitannya dengan kebutuhan penelitian ke depan, sangat penting untuk fokus kepada organisasi PKK, baik di level RT/RW, kelurahan maupun kecamatan. Berdasarkan pengalaman penelitian di lapangan selama kurang lebih tiga bulan ini, PKK sangat jelas terlihat sebagai lembaga yang paling memahami kompleksitas persoalan perempuan di akar rumput di berbagai sektor. Untuk itu, fokus pada kajian terhadap PKK sangat disarankan.

Hanya saja, diakui, PKK memang tidak memiliki kapasitas advokasi sebagaimana LSM, juga kapasitas riset sebagaimana pusat studi di universitas, di samping memang advokasi dan kajian bukan merupakan tugas utama PKK. Namun demikian, bukan berarti bahwa LSM dan pusat studi di kampus-kampus tidak memahami persoalan-persoalan perempuan sehari-hari. Sifat dan cakupan pemberdayaan LSM yang cenderung sektoral dan sangat spesifik sasarannya, demikian juga dengan sifat dan cakupan pusat studi yang lebih banyak bergerak di tataran kajian, tidak cukup untuk mengatasi persoalan pemberdayaan perempuan yang cakupannya sangat kompleks dan luas. Belum lagi menyebut persoalan keterbatasan sumber daya LSM dan pusat studi yang tidak memungkinkan menangani persoalan di semua sektor dan wilayah. Karakteristik advokasi didalam LSM dan kajian didalam pusat studi akan sangat

ideal jika diintegrasikan dengan karakteristik PKK yang cakupan isunya holistik, konkret dan sangat sehari-hari di dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Untuk ini, tentu saja diperlukan kajian pendahuluan, guna menemukan formula dan desain yang sesuai.



Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Bappeda DI Yogyakarta 2014, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014*, BPS Provinsi DI Yogyakarta, Yogyakarta.
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Yogyakarta 2015, <http://jogjakota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/5> diunduh pada 1 Februari 2016, jam 1:13.
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Yogyakarta 2015, <http://jogjakota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/3> diunduh pada 1 Februari 2016, jam 1:16.
- Baglione, L 2012, *Writing a research paper in political science*, CQ Press, Thousand Oaks.
- Boyce, C dan Neale, P 2006, *Conducting in-depth interviews: A guide for designing and conducting in-depth interviews for evaluation input*, Pathfinder International Tool Series, Monitoring and Evaluation-2, Pathfinder International
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY 2015, *Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)*, diakses dari <http://www.dataperlindungandiy.org/siga/> tanggal 26 Desember 2015
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY 2011, *Profil Gender dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, DIY.
- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2009, *Jumlah Kematian Ibu di Provinsi DIY*, Dinas Kesehatan Kota, Yogyakarta.
- Food and Agriculture Organization (FAO) 2013, "Chapter 5: Baseline Study in PRCA", dalam *Participatory Rural Communication Appraisal: A handbook*, SADC Center of Communication for

Development in collaboration with the Communication for Development Group Extension, Education and Communication Service Sustainable Development Department, FAO, Roma.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 2014, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2014*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Jakarta.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 2013, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Jakarta.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta 2014, *Profil Gender dan Anak Kota Yogyakarta*, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Overseas Development Institute (ODI) 2009, *Research tool: Focus Group Discussions*, diunduh dari <http://www.odi.org/publications/5695-focus-group-discussion>, pada 1 Februari 2016, jam 12:38.

Biodata Singkat



Ninik Sri Rahayu, Kepala Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Dosen Tetap Program Diploma III Fakultas Ekonomi UII. Selama 12 tahun terakhir konsisten melakukan berbagai riset dan program pengabdian masyarakat terkait isu gender dan pemberdayaan perempuan. Aktif mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal, bukumaupun proceeding seminar nasional dan internasional di beberapa negara di Asia.



Laila Kholid Alfirdaus, analis kebijakan, staf pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Mendalami kajian kebijakan, yang terkait dengan isu perempuan, advokasi, civil society, citizenship, civic engagement, dan pemberdayaan masyarakat. National expert dalam evaluasi program pemberdayaan masyarakat sipil dan akuntabilitas sosial, United Nations Democracy Funds (UNDEF).



Ashari Cahyo Edi, Manager Polgov dan staf pengajar, Departement Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Mendalami kajian non-profit sector, CSR dan think tank dalam kebijakan. Telah lebih dari satu dekade berkecimpung dalam aktivitas penelitian, pendampingan, fasilitasi dan advokasi masyarakat sipil dalam isu demokrasi dan governance. National expert dalam beberapa evaluasi program, di antaranya yang didukung oleh Oxfam, GIZ (dulu GTZ) dan USAID.

Peta Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Yogyakarta

Keterpinggiran perempuan masih menjadi isu di Kota Yogyakarta. Hal ini tercermin dari angka Gender Development Indeks dan Gender Empowerment Measure yang menunjukkan disparitas gender di hampir semua indikator. Indeks Pemberdayaan Perempuan pun menunjukkan hal yang sama. Pada semua komponen pembentuk IDG, baik dalam partisipasi politik, pengambilan keputusan, maupun dalam bidang perekonomian, perempuan tertinggal dibanding laki-laki.

Terkait dengan keperluan inventarisasi dan pemecahan masalah, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta bekerjasama dengan (PSG) Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta berupaya untuk mengidentifikasi peta potensi pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta. Pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Buku ini menyajikan temuan penting berupa inventarisasi isu-isu prioritas terkait pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta termasuk identifikasi bagaimana prioritas pendekatan, prioritas desain pengelolaan program, dan agenda riset yang ke depan perlu dilakukan. Sumber informasi dalam riset ini adalah para pelaku langsung kegiatan program pemberdayaan perempuan di Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY yang meliputi para pegiat PKK, organisasi masyarakat (Ormas), LSM, pusat studi di universitas, dan instansi pemerintah di Kota Yogyakarta.

Meskipun masih merupakan assessment awal, pemetaan ini diharapkan menjadi informasi yang penting bagi identifikasi permasalahan dan pemecahan masalah kesetaraan gender di Kota Yogyakarta dan daerah lain terkait. Pemetaan lebih mendalam, diharapkan akan dapat dilakukan dalam waktu-waktu ke depan.

**Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta
dengan Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Indonesia (UII)**

ISBN 978-602-7677-93-7



9 786027 677937